



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI
DENGAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, MENTERI
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, DAN MENTERI
KEBUDAYAAN RI**

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	:	Rabu, 06 November 2024
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Acara	:	1. Perkenalan Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan beserta jajaran. 2. Gambaran umum arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan periode 2024—2029. 3. Lain-lain.
Waktu	:	Pukul 09.11 WIB s.d. 13.52 WIB
Ketua Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Komisi X/F-P.GOLKAR)
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Komisi X DPR RI)
Hadir	:	PIMPINAN DAN ANGGOTA: 38 orang Anggota hadir dari 44 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

PIMPINAN:

1. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Komisi X/F-P.GOLKAR)
2. My Esti Wijayati (Wakil Ketua Komisi X/F-PDI PERJUANGAN)
3. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komisi X/F-P.GERINDRA)
4. H. Lalu Hadrian Irfani, S.T. (Wakil Ketua Komisi X/F-PKB)
5. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos. (Wakil Ketua Komisi X/F-PKS)

ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. Sofyan Tan
2. I Nyoman Parta, S.H.
3. Puti Guntur Soekarno, S.IP.
4. Bonnie Triyana, S.S.
5. Once Mekel, S.H.
6. Denny Cagur, S.Pd.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P.
GOLKAR)**

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Muhamad Nur Purnamasidi, S.Sos.
2. Ferdiansyah, S.E., M.M.
3. Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
4. Ashraff Abu
5. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
6. Drs. Juliyatmono, M.M., M.H.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(F-P. GERINDRA)**

3 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ali Zamroni, S.Sos., M.A.P.
2. Ruby Chairani Syiffadia, B.A. (Hons)., M.Sc.
3. Melly Goeslaw

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.
NASDEM)**

6 orang Anggota dari 6 Anggota

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
2. Lestari Moerdijat
3. Eva Stevany Rataba, S.H.
4. Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M.
5. Lita Machfud Arifin
6. Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, S.P., M.P.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.
2. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.
3. Habib Syarief Muhammad

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-
PKS)**

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
2. dr. Gamal
3. Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd.
2. Verrell Bramasta
3. Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., M.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Anita Jacoba Gah
2. Bramantyo Suwondo, M.IR.
3. Drs. Sabam Sinaga, M.M.

PEMERINTAH/UNDANGAN

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Saudara Profesor Abdul Mu'ti, M.Ed., beserta jajarannya.

Kita kasih semangat *dulu* dong *nih* jajarannya juga lengkap, sudah ditunggu-tunggu *nih* rapat hari ini.

Dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Saudara Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya.

Sepertinya harus disebutkan *nih* ya wamen-wamennya juga ya. *Tapi* saya sebutkan *dulu* ketiga menteri nanti setelah itu tentunya kita juga ingin

berkenalan dengan para wamen yang juga hadir kebersamaian kita pada hari ini.

Dan kalau ini kayaknya kita semua *udah* kenal ya, karena sahabat lama di DPR yang sekarang menjadi mitra.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Saudara Dr. Fadli Zon, M.Si., beserta jajarannya.

Teman-teman semuanya seperti kita ketahui tiga kementerian ini juga dilengkapi dengan para wakil menteri. Sekaligus saya perkenalkan Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., nah, ini Wamennya Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ada juga Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.Si., nah, dua wamen.

Dan untuk Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kita dibantu, di sini dua wamen yang juga sudah sangat *viral*, ada Prof. Fauzan, M.Pd. dan Prof. Stella Christie, Ph.D.

Untuk Kementerian Kebudayaan, kita juga memiliki Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganessa Djumaryo, S.I.Kom., ini sahabatnya teman-teman dari Dapil Bandung ini kelihatannya *udah* akrab sekali.

Dan tentu hadir Ibu Suharti, Ibu Chatarina, Mas Iwan, Pak Tatang, yang kalau ini *udah bestie*, *bestie* kita ya. Kemudian Pak Abdul Haris, Pak Abdul Haris, saya belum lihat sih ya, oh belum hadir. Dan juga Mas Nino ya, Mas Anindito. Beserta juga Prof. Amin. Mohon izin ini. Prof. Nunu juga ada di sini. Tepuk tangan juga untuk teman-teman yang sudah bekerja sama dengan begitu baik dengan Komisi X selama lima tahun ke belakang, Bu Vivi dan juga semua Eselon II yang hadir pada pagi hari ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami Pimpinan dan tentu saja seluruh Anggota Komisi X begitu antusias untuk mengikuti rapat perdana dengan tiga kementerian yang merupakan kementerian utama untuk bekerja sama lima tahun ke depan. Dan selain dari itu tentu saja kita ingin secara lebih dalam mendapatkan informasi bagaimana perkembangan terkini, persiapan-persiapan. Ya, selain berkenalan ya Pak.

Saya kenalkan *dulu* mungkin teman-teman dari meja pimpinan karena tadi sudah diperkenalkan dari meja mitra. Hadir di sebelah kanan saya, Bapak H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., dari Fraksi PKB. Dan juga di sebelah kiri saya, Ibu My Esti Wijayati, S.H., dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan Pak Mahfudz Abdurrahman, S. Sos., dari Fraksi PKS. Nanti dapil-dapilnya pas bicara ya diperkenalkan sekaligus.

Sudah hadir delapan fraksi lengkap. Mungkin saya tidak perkenalkan sekarang, ya, nanti biar Kapoksi-Kapoksinya bisa memperkenalkan anggotanya. Dan izinkan mungkin secara resmi saya membuka terlebih dahulu Raker kita pada hari ini karena sudah lengkap delapan fraksi, dan dengan demikian kuorum, sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang

Tata Tertib. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami membuka Raker hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.11 WIB)

Baik, agenda Rapat Kerja pertama yang paling penting tentunya perkenalan para pejabat kementerian dari ketiga kementerian yang sudah kami undang. Dan juga gambaran umum arah kebijakan, baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan untuk periode 2024-2029.

Dan selain itu, jika ada hal-hal yang dirasakan *urgent* atau krusial untuk kita diskusikan tentu bisa menjadi tambahan agenda lain-lain. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, izin Bapak/Ibu teman-teman Komisi X dan juga Saudara Menteri. Saya memberikan sedikit saja pengantar, karena sebenarnya yang paling penting kita ingin lebih banyak mendengar. Tetapi tentunya tidak ada salahnya kita mengingat kembali bahwa amanat konstitusi sudah dengan tegas dan jelas memosisikan pendidikan nasional dalam posisi yang strategis, sebagai instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa *tapi* juga untuk membangun peradaban.

Ada banyak landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa undang-undang lainnya, ada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan tentu saja tidak usah dilupakan ini ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Dan Bapak/Ibu sekalian, untuk mewujudkan amanat konstitusi dan juga undang-undang yang mungkin jauh lebih banyak dari apa yang tadi saya sebutkan yang terkait dengan bidang pendidikan. Pada periode sebelumnya telah cukup banyak langkah-langkah program dan kegiatan yang dilakukan. Namun diakui bahwa kondisi pendidikan kita masih menyisakan beberapa permasalahan, baik terkait akses, mutu, relevansi, daya saing, dan tata kelola.

Nah, oleh sebab itu, Renstra Pendidikan, baik Dasar, Menengah Pendidikan Tinggi saat ini dan juga Kebudayaan masih perlu untuk mampu menjawab beberapa masalah, seperti layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan, dan juga pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, pendidikan dasar menengah yang unggul dan bermutu khususnya di era digitalisasi dan persaingan global, termasuk perguruan tinggi. Jadi kemarin, Prof., kami mengundang beberapa *stakeholder* pendidikan tinggi semacam matrikulasi untuk Anggota. Dan khususnya di bidang riset dan teknologi, Prof. Stella, pendidikan tinggi ternyata belum sepenuhnya mampu merealisasikan hasil riset dan inovasi ke arah hilirisasi

riset yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha dan industri, Prof. Fauzan, dan juga nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

Dan di bidang kebudayaan, ini untuk sahabat kita, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia perlu memberikan perhatian dan keberpihakan untuk melakukan upaya-upaya pemajuan kebudayaan, khususnya 10 objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Nah, Mbak Reri hadir *nih* hari ini ya. Kita juga sangat serius *gitu* ya bagaimana *nih* anggarannya *gitu* ya karena banyak sekali museum, cagar budaya dan juga diplomasi budaya dan betapa masih sulitnya para pelaku kebudayaan mengakses Dana Indonesiana atau dana-dana fasilitasi bagi mereka.

Saya kira mungkin terkait dengan apa permasalahan, nanti kita masih cukup banyak waktu untuk mendiskusikan. Namun, ada beberapa *nih* Prof. Mu'ti terkait dengan kebijakan konstitusi, ini memang menjadi PR kita *gitu* ya bagaimana literasi, numerasi, sains, dan karakter bisa terus ditingkatkan di semua jenjang, khususnya pendidikan dasar. Kemudian juga terkait tata kelola guru ya Prof. Nunuk, LPTK juga menjadi satu sistem yang berkeadilan dan terfokus pada mutu dan kesejahteraan guru. Bahkan akhir-akhir ini isu perlindungan guru juga mencuat di publik.

Dan capaian wajib belajar. Nah, ini juga kurun waktu 10 tahun hanya mengalami kenaikan sebesar 1,2%. Kemudian juga kebijakan perlindungan anak yang masih banyak mengalami kekerasan dan predator seksual di satuan-satuan pendidikan. Dan juga perbaikan sistem dalam pengelolaan standar nasional pendidikan.

Nah, di sisi lain, ini yang kami bahas di ujung-ujung akhir periode lalu, anggaran pendidikan dari tahun 2009 bahkan sampai tahun 2024 walaupun mengalami kenaikan karena APBN-nya meningkat. Tetapi Kemendikbudristek, waktu itu mitra kami itu hanya mengelola 15% dari *mandatory spending* 20% anggaran fungsi pendidikan tersebut. Dan pemerintah daerah juga belum dapat memenuhi 20% anggaran pendidikan dalam APBD-nya sebagaimana amanat konstitusi. Sebagaimana diindikasikan hanya enam dari 34 provinsi dan hanya dua dari 514 kabupaten/kota yang mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan di luar dana transfer daerahnya.

Nah, mungkin kami di Komisi X tentunya siap untuk berkolaborasi dalam fungsi anggaran kami, fungsi legislasi kami, fungsi pengawasan kami untuk melakukan pengawalan terhadap berbagai program-program kerja Bapak/Ibu dan saudara sekalian.

Demikian teman-teman mungkin sedikit gambaran umum kondisi dan permasalahan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia.

Nah, dalam Rapat Kerja ini kami ingin mengenal seluruh jajaran kementerian dan juga ingin mendapatkan gambaran umum program kerja dan langkah-langkah yang sedang atau akan dilakukan oleh para menteri dan wakil menteri selama mungkin dalam jangka pendek maupun untuk lima tahun ke depan.

Baik, sebelum kita berikan kesempatan untuk Saudara Menteri memberikan paparannya. Saya mohon izin minta kesepakatan waktu, bisakah ini kita selesaikan pada pukul 12.00 WIB?

Teman-teman, Bapak/Ibu kita usahakan untuk diselesaikan pada pukul 12.00 WIB. *Tapi* saya yakin mungkin kalau masih ada waktu perpanjangan tidak lebih dari 30 menit *gitu* ya Pak ya.

Bu Hima sudah hadir?

Karena pada pukul 13.30 WIB kita sudah ada Raker lain dengan menteri.

Oke, bisalah sampai 13.00 WIB, kalau begitu ya Bu ya.

Kita sepakati *dulu* untuk sementara pada pukul 12.00 WIB ya. *Tapi nggak* begitu yakin kayaknya kalau selesai pukul 12.00 WIB.

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Baik, kami persilakan kepada Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk menyampaikan paparan, nanti dilanjutkan oleh Menteri Diktisaintek dan Menteri Kebudayaan.

Silakan Prof. Mu'ti.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Terima kasih Ibu Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Ibu Ketua Komisi X beserta seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X, Bapak-Bapak para Menteri Kabinet Merah Putih, senior saya Prof. Satryo, juga sahabat saya Pak Dr. Fadli Zon, dan para wakilnya.

Saya ditemani oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, para Eselon I dan juga

ada Eselon II dan juga para staf khusus menteri yang juga bersama dengan kami.

Kalau diizinkan, saya perkenalkan staf khusus menteri yang bersama saya, ada Pak Dr. Didik Suhardi.
ole

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Pak Didik.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Saya kira Ibu sudah kenal.

Kemudian sebelahnya Pak Dr. Muchlas Rowi.
Di sebelahnya lagi Pak Arif Jamali M.Pd.
Dan yang berikutnya, Bung Ma'ruf El Rumi.

Saya ingin menyampaikan secara singkat saja beberapa hal yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan mungkin juga sudah banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan apa yang akan kami lakukan, bahkan juga sudah banyak tuntutan dari masyarakat padahal kami belum lama bekerja. Ini menunjukkan betapa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Saya ingin memulai dari *tagline* besar kami adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa. Ini kami ambil dari tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga sering sekali dikutip oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari Undang-Undang 20 2003 tentang Hak Warga Negara. Nah, dalam kami melaksanakan program, ini harus pakai ini ya, mungkin malah lebih lama. Saya, saya mungkin akan langsung saja membacakan karena mungkin juga sudah ada naskahnya di Bapak/Ibu sekalian, supaya lebih cepat.

Landasan kami dalam melaksanakan program ini adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 ayat (1) tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian Pasal 31 ayat (3) meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana Pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemudian juga kami kaitkan pelayanan pendidikan untuk semua itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perpres 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2005, 2025-2045 dan Asta Cita Kabinet Merah Putih yang di dalamnya disebutkan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Dalam kaitan itu kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial-budaya yang mendukung serta pembelajaran adaptif, adaptif dan bermakna.

Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif serta pengembangan talenta unggul.

Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan dan beberapa program prioritas kami. Kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ada lima program prioritas.

Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Di mana kami akan melakukan program-program pelatihan, bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan guru agama. Penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, *tapi* tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12.00 mudah-mudahan juga ada praktik makan siang bergizi di Gedung DPR ini, mudah-mudahan pelaksanaannya.

Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada dua program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah

belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar.

Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1. Karena banyak guru yang belum memenuhi Undang-Undang Guru dan Dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1. Kemudian pelatihan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, poin c ini yang kami, insyaAllah nanti akan sampaikan itu pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu yang akan datang.

Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. Kami sudah merancang, insyaAllah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak. Dan saya sudah praktikkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang. Di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara dan kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. Saya didampingi oleh Bu Ketua Komisi X pada waktu itu. Kemudian pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian yang ketiga penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan.

Yang kelima pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ini sangat banyak sehingga tidak perlu kami sebutkan.

Kemudian yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra, yang meliputi pemertabatan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, penginternasio, penginternasionalan Bahasa Indonesia dan peningkatan literasi. Sekadar informasi bahwa beberapa minggu yang lalu dalam peringatan bahasa 28 Oktober, kami menyampaikan program besar yaitu kedaulatan Bahasa Indonesia, bangga, kemudian kita mahir dan maju dengan Bahasa Indonesia. Dan kami memberikan penghargaan untuk pejabat publik yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan *alhamdulillah* menurut dewan juri pemenangnya adalah Ibu Ketua Komisi X, Ibu Dr. Hetifah. Saya tidak ikut menjadi dewan juri karena waktu ada penjurian saya belum jadi menteri.

Nah, strategi yang kami coba lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan dan mencapai program serta tujuan itu dengan prinsip partisipasi semesta. Pendidik ini kami juga merujuk kepada Undang-Undang 20 2003 Pasal 4 ayat (6) yang di dalamnya disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan partisipasi semesta itu ada tiga pilar penting, yaitu kebaruan yang meliputi upaya-upaya kita mewadahi gagasan kreatif, mempromosikan praktik baik, dan mengutamakan relevansi.

Kemudian terkait dengan kemitraan, kami berusaha untuk bermitra dengan dunia usaha dan industri, kemudian juga mitra pembangunan, dan juga kemitraan dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan pemerintahan, kemudian juga kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, ormas penyelenggara pendidikan, dan sebagainya.

Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita berusaha untuk bagaimana ada pembiayaan yang adil, sarana dan prasarana yang setara, tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas.

Demikian presentasi kami, dan karena di sini ada Ibu Melly Goeslaw, kami mohon untuk anggaran ini, jangan digantung. Sebagaimana lagunya beliau, Jangan Kau Gantung Cintaku.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Mel, nanti dibalas ya dengan beberapa bait ya, lagunya.

Baiklah terima kasih Pak, Pak Mu'ti atas paparannya yang singkat, padat.

Dan sekarang kita lanjutkan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kepada Prof. Satryo, kami persilakan

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Ir. SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO, M.Sc. Ph. D.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera,
Salam sehat untuk kita semua.

**Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi X,
Yang kami hormati Bapak/Ibu jajaran Pimpinan Komisi X,
Yang kami hormati para Anggota Komisi X.**

Pada pagi hari ini, perkenankan kami didampingi oleh dua wamen. Dan karena ini kementerian yang dipecah, dipisah dan ditambah, kami masih memproses OPK dari kementerian kami, sehingga sementara yang sudah *onboard* di dalam tempat kami ya bertiga ini.

Baik, kami sampaikan beberapa hal yang mungkin dapat dipahami oleh kita semua di ruangan ini tentang pendidikan tinggi. Kita mulai dari apa yang

diamanatkan oleh Bapak Presiden pada pidato perdananya tanggal 20 Oktober 2024 bahwa target kemajuan pembangunan ekonomi itu ada lima unsur yang beliau canangkan, yaitu pertama pangkas kemiskinan, kedua swasembada pangan, ketiga swasembada energi, yang keempat penyaluran subsidi tepat sasaran dengan pemanfaatan teknologi digital, kelima hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pada saat kami serah terima dari pendahulu kami, Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim. Kami menyampaikan suatu konsep atau pendekatan yang kita sebut sebagai paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi. Tidak berarti kita kemudian meniadakan yang lalu, kemudian mengganti dengan yang baru. Tidak sama sekali, *tapi* berproses secara dinamis, berkelanjutan dengan memperbaiki atau menguatkan faktor-faktor, aspek-aspek yang perlu dilakukan.

Di dalam acara tersebut, saya menyampaikan suatu pemikiran bahwa kita harus mempersiapkan diri bagaimana pembelajaran pada masa depan yang tidak menentu dengan metode pembelajaran yang mentransformasi dan membuat peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis. Kebijakan pendidikan tinggi menganut kolaborasi dengan pola pemberdayaan yang memungkinkan setiap perguruan tinggi berperan secara unik dengan berpikir inovatif untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan nasional, yaitu tadi mewujudkan harapan dari Bapak Presiden supaya Indonesia menjadi negara yang maju.

Setelah itu, kami membuat suatu telaahan mengenai posisi saat ini, apa yang harus dikerjakan dan target yang harus dicapai ke depan. Di mana kita lihat di dalam tayangan, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi, ini bukan baru *tapi* sudah ada, pasti terus ada, kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai.

Yang pertama adalah keberkerjaan lulusan perguruan tinggi yang relatif masih sangat rendah, bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita.

Kemudian kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi, ya. Kita menuju Indonesia Emas 2045, diharapkan PDB kita naik signifikan dari negara yang nomor empat atau lima besar di dunia dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi. Itu hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Terkait dengan itu, ada juga hal lain yang perlu kita upayakan, yaitu efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian. Karena pengembangan sains teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian.

Hal lain lagi adalah terputusnya hubungan dari kebutuhan masyarakat. Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu yang kalau mendidik itu menurut apa yang dia inginkan, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, memang

kalau lihat dari sejarahnya universitas, tahun 1.600 sekian, itu di Bologna, *dulu* memang belum ada industri, perguruan tinggi memang mengembangkan ilmu-ilmu yang memang di, dikuasai atau dipahami oleh para peneliti. Dia punya *passion* di bidang itu, dia bikinlah suatu kajian, belum ada industri.

Kemudian revolusi industri di Inggris kan baru tahun 18 sekian dan sekarang sudah terbalik sebetulnya, *dulu* iya, perguruan tinggi yang *men-drive* suatu pembangunan, sekarang perguruan tinggi yang *men-support* kebutuhan akan pembangunan. Jadi adanya suatu upaya pembalikan dari *supply driven* kepada *demand driven*. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kita punya pendidikan tinggi.

Juga regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat selama ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi kita ke depan juga kita minimalkan terjadinya upaya-upaya, perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi, bahkan ke depan kami juga mengupayakan supaya pendidikan tinggi itu di-deregulasi sedemikian rupa, memberikan ruang gerak yang inovatif kepada para pengampunya supaya pendidikan tinggi ke depan itu memang betul bermanfaat untuk pembangunan nasional Indonesia.

Lalu sedikit mungkin saya ingin mengaitkan bagaimana pendidikan tinggi itu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau bisa dilihat pada *slide* yang nomor sembilan, di mana di sebelah kiri adalah pendidikan tinggi, ada talentanya, institusinya, dan sebagainya. Di kanan kita berharap adanya pembangunan ekonomi, supaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Memang pendidikan tinggi di sini adalah sektor yang diharapkan bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari kebijakan yang disampaikan Bapak Presiden yang lalu, maka perguruan tinggi berharap untuk mempersiapkan warga terampil dan produktif, termasuk talenta sains dan teknologi, meningkatkan perguruan tinggi yang berdampak.

Jadi yang kita ingin lihat adalah dampaknya perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional. Dan dia mengembangkan ekosistem, penelitian, dan pengembangan melalui akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak. Ini bukan hal baru, *tapi* memang sudah terus dikumandangkan selama ini, meskipun kita belum pernah, bisa sepenuhnya mencapai karena berbagai macam kendala ataupun hambatan.

Yang kedua pengembangan talenta sains dan teknologi. Ini betul-betul dibutuhkan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan talenta-talenta yang mempunyai daya saing global yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%.

Yang ketiga, penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, *scientific culture* dalam penelitian dan pengembangan. Sedikit ilustrasi Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, kita kalau melihat Undang-Undang Dasar-nya India itu ada satu pasal yang menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai *scientific temper* ya, *scientific culture*. Jadi suatu apa, kekuatan

untuk berpikir ilmiah. Itu sebabnya India sangat maju dalam hal *scientific* atau ilmiah ini karena memang mereka itu punya kepercayaan, karena *dulu* Gandhi yang menetapkan itu. Kita harus punya *mindset scientific*. Nah, kita juga berharap ke depan Indonesia juga akan maju, kita perlu didukung oleh suatu *mindset* atau *attitude* yang ke arah ilmiah.

Dan yang keempat, penyelesaian masalah sosial dan ekonomi nasional. Dan di sebelah kanan kita lihat mudah-mudahan kita mencapai penggunaan ekonomi seperti yang kita harapkan.

Kemudian mungkin yang terakhir supaya tidak terlalu panjang, yaitu *slide* nomor 10 di mana ada sedikit pergeseran paradigma, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati ya, dari sebelah kiri yang konvensional, jadi akademik, vokasi, itu pembagian jalurnya. Kegiatannya adalah Tridharma pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, kita ber-*transform* ya, untuk lebih maju lagi ke depan sesuai tantangan zaman. Sehingga kalau kita lihat di kotak yang sebelah kanan, investasi pendidikan tinggi. Itu diupayakan untuk mengangkat pendidikan tinggi yang transformatif. Di mana kita, pendidikan tinggi itu kita kembangkan kaitkan juga dengan kegiatan litbang (penelitian pengembangan), dan pengembangan kemampuan sains dan teknologi.

Dari situ kita bisa melihat aplikasinya kepada tujuan pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan sosio-ekologis dan ekonomi. Dan itu akan menjadi umpan balik kepada investasi pendidikan tinggi. Kalau ekonominya maju, pendidikan tinggi maju juga, maju juga pertumbuhan. Jadi, ada siklus dari situ supaya kita mencapai harapan target yang disampaikan oleh presiden pada saat pidato pertama.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Barangkali demikian *dulu* yang kami sampaikan sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Waalaikumsalam.

Terima kasih Prof. Satryo.

Sangat jelas ya teman-teman bagaimana pendidikan tinggi kita ini akan bertransformasi dan juga tantangan ini terkait kebudayaan karena mengubah *mindset* menjadi lebih bersikap ilmiah dan *scientific*. Pasti harus dimulai juga Prof. Mu'ti ya dari pendidikan dasar menengah bahkan dari PAUD-nya. Jadi ini tiga hal ini tidak mungkin transformasi dan paradigma pendidikan tingginya berubah kalau dua menteri di sebelah ini tidak men-*support*.

Baik, selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Menteri Kebudayaan kita. Kami persilakan kepada sahabat kita, Fadli Zon.

MENTERI KEBUDAYAAN RI (Dr. FADLI ZON, M.Sc.):

Ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi,
Salam sejahtera,
*Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,*
Rahayu.

Yang saya hormati Ibu Hetifah Sjaifud, Ibu Hetifah Sjaifudian dan Pimpinan Komisi X para Anggota Komisi X, sebagian besar rekan-rekan yang saya kenal dengan baik.

Dan ini baru pertama kali berada di meja yang agak berseberangan.

Yang saya hormati para Menteri Pak Profesor Abdul Mu'ti, Profesor Satryo, para wamen yang hadir tadi telah diperkenalkan.

Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam konteks Rapat Kerja ini untuk menggambarkan, karena ini adalah satu kementerian baru, maka tentu saja perlu banyak juga perubahan-perubahan terkait dengan struktur organisasi, tata kelola, dan hal-hal lain. Sebagaimana tadi juga disampaikan karena ini pecahan jadi tentu saja ada hal-hal yang memang masih menjadi prioritas.

Saya ingin mulai *dulu* Pimpinan dengan landasan yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, hak pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar memperoleh manfaat seni dan budaya. 28 ayat (3), penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 32 ayat (1), negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Pasal 32 ayat (2), pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Saya kira amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat jelas dan kemudian tentu saja melalui proses legislasi telah diturunkan Undang-Undang Nomor 5 2017. Waktu itu saya masih Pimpinan DPR saya kira dan Komisi X yang melahirkan ini soal pemajuan kebudayaan, upaya, sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Lalu ada rencana induk pemajuan kebudayaan, Indonesia bahagia, bahagia berdasarkan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Jadi tujuan dari RI, PK ini adalah kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Lalu ada sejumlah undang-undang apa, PP, Perpres, dan lain-lain.

Namun keberadaan Kementerian Kebudayaan untuk pertama kalinya ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara, saya kira merupakan komitmen bahwa kebudayaan di dalam Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini menjadi satu hal yang sangat penting dan fokus terutama di dalam membangun identitas jati diri, karakter yang terkait dengan manusia pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan juga bagaimana kebudayaan menjadi landasan di dalam perumusan program pembangunan, meningkatkan identitas nasional dan sebagai perekat atau *binding power*.

Jadi ada narasi strategis ini, kebudayaan juga sebagai pemersatu, sebagai kekuatan ekonomi, sebagai kekuatan diplomasi, sebagai pembentuk jati diri bangsa. Dan empat pilar kebudayaan ini yang saya kira kita coba rumuskan bisa digambarkan di dalam *slide* berikutnya, yaitu kebudayaan yang mengikat ke-Indonesia-an, internalisasi nilai di dalam pendidikan, ekonomi budaya dalam bentuk produk, ekspresi budaya, dan juga industri inovasi di dalamnya film, musik, digital media, media-media baru, video game, animasi, seni pertunjukan, seni visual, dan lain-lain. Dan juga budaya sebagai *soft power* untuk meningkatkan citra dan pengaruh Indonesia di tataran global.

Selanjutnya visi dan misi Kementerian Kebudayaan. Ini melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan di dalam *mission* ini juga sesuai dengan tertera di situ melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, namun tidak semata-mata urusannya masa lalu. Saya kira juga ke depan justru bagaimana budaya ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan lain-lain, pemanfaatan.

Untuk selanjutnya adalah tujuan strategis kebijakan budaya. Ini juga saya kira bagian dari yang tadi telah dijelaskan elaborasinya. Lalu selanjutnya soal *connection* atau *creating connection* dengan pendidikan, dengan *policy*, dengan industri dan *community* di dalam *slide* berikutnya. Saya kira sebagian besar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak perlu kami menjelaskan soal ini.

Lanjut, nah, SDM yang ada tentu saja sejauh ini adalah dari pecahan yang ada di kementerian dan sedang kita lakukan konsolidasi. Lanjut, ada 23 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, tujuh di antaranya masih berkantor di BPMP yang menumpang ini. Dan kita juga ada UPT, BLU Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Nah, mengenai cagar budaya di Indonesia, kita mempunyai data objek yang diduga cagar budaya itu jumlahnya ada sekitar 49.701 objek pemajuan kebudayaan (OPK) dan *intangible cultural heritage* itu ada sekitar hampir

30.000. Lalu jumlah museum di Indonesia, bermacam-macam ini angkanya, *tapi* kurang dari 500, 454 dari data kita, ada museum pemerintah pusat, museum milik pemerintah daerah, milik perorangan.

Objek pemajuan kebudayaan sebagaimana kita ketahui ada 10 di sini, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Ada beberapa irisan saya kira nanti dengan K/L lain yang mungkin perlu ada koordinasi, di mana urusan kebudayaan, di mana urusan hilir, dan sebagainya. Kita berharap juga, mungkin kita selesaikan *dulu*.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan Kementerian Kebudayaan. Nah, di sini kita ingin ada pendekatan yang holistik melalui beberapa pilar utama, perlindungan kebudayaan dan tradisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kebudayaan dan tradisi, lalu diplomasi dan promosi kebudayaan. Ini menjalankan kebijakan diplomasi budaya untuk memperkenalkan keunikan budaya Indonesia, kekayaan budaya Indonesia, dan meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Lalu pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Ini menyelaraskan kebijakan dengan tren budaya modern seperti budaya digital, industri budaya yang memicu pertumbuhan ekonomi budaya.

Dan ini tentu saja saya kira menunggu dari Perpres yang akan segera kita terima, terutama terkait dengan nomenklatur dan struktur organisasi di keditjenan. *Tapi* kurang lebih kemungkinannya akan seperti ini. Kita akan ada tiga Eselon I yang terkait dengan dirjen ini. Saya kira akan seperti ini porsinya, perlindungan kebudayaan dan tradisi, diplomasi promosi dan kebudayaan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Kira-kira inilah yang kita tunggu resminya dari Perpres tersebut.

Selanjutnya tentu saja ada program prioritas Kementerian Kebudayaan yang memang tidak ada satu diksi 100 hari *gitu* ya, menurut garis dari pemerintah. Karena memang harus dilakukan ada yang jangka pendek, menengah, maupun panjang dalam konteks lima tahun ini. Namun ini adalah beberapa program yang mencerminkan pilar kebijakan itu, warisan budaya dunia, program ini berfokus pada konservasi situs warisan budaya, pengakuan UNESCO dan advokasi internasional. Memang kita ingin meningkatkan pengakuan UNESCO atau registrasi di UNESCO ini lebih banyak lagi.

Tahun ini, bulan Desember rencananya ada tiga yang diajukan itu Reog Ponorogo, kemudian kebaya, dan juga kolintang dari Sulawesi Utara ya. Nah, tetapi kita ingin mencoba melobi kepada UNESCO, karena sebetulnya *intangible culture heritage* kita ini banyak. Sekarang ini baru 13 yang mendapatkan pengakuan itu. Namun, di negara-negara lain sebenarnya jumlahnya cukup banyak lebih dari itu.

Jadi kita berharap proses yang sudah ada dilakukan dari bawah, dari kabupaten kota, kemudian ke provinsi dan tingkat nasional di dalam registrasi kita yang masuk di dalam *intangible cultural heritage* atau warisan budaya tak

benda, *gitu* lah istilahnya dalam Bahasa Indonesia, itu ada sekitar 2.000-an. Nah, sekarang kita baru terdaftar di UNESCO itu sekitar 13-an. Dan ini yang saya kira ingin kita tingkatkan bagaimana kehadiran dari warisan budaya dunia kita yang begitu kaya dan memang kekayaan budaya kita ini, saya kira tidak ada bandingannya di dunia lain, di negara-negara lain. Ini yang ingin kita optimalkan.

Kemudian revitalisasi tradisi lokal, melestarikan seni bahasa kearifan lokal yang mulai memudar dan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian. Tentu dalam hal ini juga saya kira kita perlu dukungan dari Komisi X dan rekan-rekan, karena semua *stakeholder* harus terlibat.

Budaya digital dan ekonomi budaya, yaitu bagaimana mengembangkan *platform* digital dalam karya budaya seperti film, animasi, video game untuk mendukung promosi budaya dan mempercepat pertumbuhan industri berbasis budaya. Saya kira di sini nanti ada irisan juga dengan mungkin K/L lain. Tetapi dalam persoalan konten budaya dan di hulu, saya kira kita sangat berkepentingan bagaimana kita mempromosikan budaya Indonesia di tengah dunia.

Kemudian diplomasi dan promosi kebudayaan. Menjalin kerjasama internasional melalui berbagai *event*, festival budaya, pameran, pertukaran budaya, gagasan rumah budaya Indonesia yang sebenarnya sudah lama juga hadir, kita berharap bisa kita realisasikan. Media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia, baik ke dalam negeri maupun ke dunia internasional, saya kira itu sangat-sangat penting.

Ada beberapa hal yang dalam beberapa hari ini kita coba untuk pikirkan dan memang banyak program yang sedang juga dijalankan, baik kita di dalam BLU, MCB itu museum dan cagar budaya itu kan ada 18 museum dan 32 cagar budaya, termasuk di dalamnya juga ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain.

Nah, selanjutnya ini saya kira adalah ya beberapa contoh hal yang saya kira bisa dalam waktu dekat bisa terus dilakukan. Kajian revitalisasi dan digitalisasi koleksi museum, bagaimana ada standarisasi terhadap museum, baik museum milik pemerintah, provinsi, maupun museum-museum milik swasta dan perorangan. Dan men-digitalisasi koleksi-koleksi yang ada di museum itu dengan narasi-narasi yang ada.

Lalu repatriasi benda bersejarah atau cagar budaya. Repatriasi ini sudah berjalan bahkan sudah puluhan tahun berjalan. Dan sejak awal kita merdeka juga sudah mulai diproses sebenarnya repatriasi benda-benda ini. Dan terus ber, di dalam proses itu kita menerima artefak dan benda-benda bersejarah yang *dulu* diambil oleh kolonial, baik itu Belanda, Inggris, Prancis. Prancis juga pernah, menjajah kita ya, *Nederland France Indische* itu ketika zaman Napoleon Daendles. Kemudian juga Jepang, dan lain-lain. Tetapi memang yang terbanyak tentu saja Belanda dan Inggris.

Nah, Belanda sudah ada MoU untuk proses pengembalian itu. Tetapi Inggris sampai sekarang tidak mau mengembalikan, padahal termasuk yang paling banyak. Kalau kita lihat Bu Hesti itu dalam peristiwa Geger Sepahi di tahun 1812, itu Raffles itu melakukan satu perampokan terhadap Keraton Yogyakarta sampai empat kapal. Dua kapal itu kemudian tenggelam. Nah, selebihnya kemudian sekarang berada di British Museum dan juga di British Library termasuk ratusan manuskrip yang sampai sekarang tentu saja belum ada yang kembali. Itu sebagai contoh dan kita akan lakukan terus upaya-upaya pendataan dan permintaan repatriasi ini.

Revitalisasi museum daerah dan taman budaya. Meskipun ini bukan berada di dalam domain Kementerian Kebudayaan, tetapi kita akan mendukung mungkin dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, agar museum-museum di daerah dan taman-taman budaya bisa memenuhi standar yang bagus dan bisa menjadi tempat yang menjadi suatu enklave kebudayaan.

Pemugaran situs Muaro Jambi yang sekarang ini sedang berlangsung dalam proses. Sangiran ini sebagai pusat prasejarah dunia. Saya kira tidak ada yang mengalahkan Sangiran ini secara artefak dan ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah peradaban tertua di dunia *gitu* ya dari artefak fosil dan lain-lain. Di sini, di Sangiran dan juga sekitarnya saya kira banyak kita menemukan situs-situs yang penting termasuk artefak-artefak yang penting, menunjukkan bahkan sebelum kita menjadi *homo sapiens*, sudah ada *meganthropus paleojavanicus*, ada *pithecanthropus erectus*, *homo erectus* yang usianya dua juta tahun, satu sampai, 1,8 juta tahun dan lain-lain. Menunjukkan bahwa kita ini adalah yang tertua. Saya kira teori ini juga harus kita *challenge* yang di Barat itu bahwa seolah-olah *homo erectus* itu berjalan dari Afrika kemudian menuju Jawa dan punah, di Jawa. Mungkin justru sebaliknya dari Jawa kemudian ke utara, ke Afrika *gitu* ya.

Kemudian kita melihat juga dari beberapa hal yang bisa dalam waktu dekat itu, kita lihat ada Lokananta sebenarnya ini mempunyai potensi yang besar untuk lebih cocok di Kementerian Kebudayaan. Ini ada dikelola sekarang, kita bisa mengisi, sudah direnovasi dan sudah cukup baik *gitu*, tinggal bagaimana bisa ada museum musik *gitu*. Karena tidak sekarang ini museum musik kecuali ada yang swasta di Jawa Timur ya. *Tapi* dalam skala nasional bisa menampung karena ini juga *treasure*. Di sini banyak saya kira musisi *tapi* kita bisa mengumpulkan kalau untuk musik artefak-artefaknya cukup banyak, baik itu Lokananta maupun yang lain-lain, baik dalam bentuk shellac, vinyl dan juga kaset-kaset, *real tape* dan sebagainya.

Museum sastra ini sudah kemarin dirintis meskipun tidak melalui tentu APBN, *tapi* kerjasama dengan komunitas, dalam hal ini juga artefak dari para penulis-penulis, penyair-penyair, mesin tiknya, kacamata, tulisan-tulisan tangannya, puisi-puisi dan drama-dramanya dari Asrul Sani dan lain-lain sudah berada di situ.

Ada juga museum PDRI yang sebenarnya sudah lama belum berfungsi. Ini juga *dulu* di Kemen, Kemendikbudristek ya. Nah, kita akan mencoba untuk meresmikan ini supaya ini bisa berjalan, karena rencananya ini juga kerjasama dengan tujuh kementerian lembaga, nanti ada Kementerian Pertahanan dan lain-lain, *tapi* ini bisa menjadi *kickoff gitu* ya.

Yang saya kira juga belum pernah, ada, kita, kalau situs candi dan lain-lain sudah banyak. Tetapi sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, *tapi* kita belum mempunyai museum semacam peradaban Islam di Indonesia yang unik *gitu* ya. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia ini agak unik, khas *gitu* ya. Dan juga ada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dari Samudra Pasai, Demak, Cirebon, dan lain-lain, ini belum ada, Wali Songo, akulturasi budaya dengan budaya-budaya sebelumnya, ada wayang, keris yang. Jadi ini saya kira kita juga memerlukan dan perlu memikirkan ini. Perlunya ada, karena juga tuntunan mungkin bisa bekerja sama juga dengan tentu saja kalangan komunitas, *private sector* dan bahkan internasional.

Museum Anak Indonesia. Tadi juga amanat dari OPK tadi, permainan-permainan tradisional dan lain-lain. Lalu juga peningkatan jumlah WBTB Indonesia yang sekarang ini 2.213. Kita harapkan ini bisa kita perbanyak lagi dan mungkin kita mempunyai *list* yang bisa diakses oleh publik dan meningkatkan kesadaran budaya kita, bagaimana di setiap daerah, di setiap kabupaten/kota, provinsi yang memang memenuhi standar itu.

Peningkatan nominasi ICH dan World Heritage UNESCO di tingkat internasional. Lalu Rumah Budaya Indonesia yang juga sebenarnya gagasan lama yang perlu kita realisasikan. Mungkin beberapa dulu, seperti di Belanda yang mungkin sudah ada asetnya. Ini harus kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Di Afrika Selatan yang mempunyai diaspora Indonesia sampai dua juta sebenarnya, tetapi kita tidak mempunyai cukup apa, *platform* untuk bagaimana diaspora yang dua juta di Afrika Selatan itu bisa mengenal kembali budaya Indonesia.

World Culture Forum mungkin suatu saat supaya kita bisa menjadi ibu kota budaya dunia. Tahun depan ada Asia-Afrika Cultural Forum. Revitalisasi penguatan ekosistem warisan budaya dunia. Peningkatan jumlah desa pemajuan kebudayaan, desa-desa yang unik saya kira ini dengan Kementerian Desa. Pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan.

Lalu, analisis dampak kebudayaan. Ini *Heritage Impact Assessment*, terutama yang situsnya statusnya *World Heritage* ya, seperti Borobudur. Kita memang sekarang ini akan datang delegasi dari UNESCO untuk melihat, mereka melihat *Heritage Impact Assessment*. Jadi harus ada juga mungkin analisis dampak kebudayaan, AMDAL kebudayaan, semacam itu.

Kekayaan intelektual budaya, advokasi tata kelola musik, konvensi musik ya ini, anugerah kebudayaan, penambahan layar sinema yang sekarang kita lihat bahwa film Indonesia memang sudah mendapatkan apa, kemajuan

yang cukup besar, paling tidak sekarang sekitar 60-70% layar itu didominasi film Indonesia. Meskipun memang temanya masih terbatas, temanya masih banyak horor ya. Jadi rupanya kita suka dengan film horor. Kemudian mungkin perlu afirmasi film-film kebangsaan, kepahlawanan, film anak, dan juga hal-hal yang lain. Jadi saya kira itu.

Lalu *slide* berikutnya, masih ada? Cukup.

Terima kasih Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhormat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Ini untuk teman-teman khususnya para pelaku seni kelihatan sekali bahwa pilar kebudayaan kita ke depan bukan hanya pendidikan salah satunya *tapi* juga ekonomi dan memang itu amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi film, musik, tenang ya, kita masih akan banyak mendiskusikan hal-hal itu ya, digital media, seni pertunjukan, seni visual, dan lain-lainnya.

Pasti *udah nggak sabar nih* teman-teman semuanya untuk memberikan tanggapan, saran-saran, dan mungkin pertanyaan juga kepada tiga mitra kita. Dan mengingat waktu, saya mohon kerja sama semuanya ya.

Pertama, saya ingin nanti memberikan urutan kepada fraksi-fraksi sesuai apa yang biasa kita lakukan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pertama. Nanti Kapoksi-nya silakan memperkenalkan anggota-anggotanya secara singkat. Nah, karena kita memiliki waktu kira-kira dua jam untuk tanya jawab ataupun tanggapan ini dengan 40 orang Anggota yang sudah hadir, kira-kira masing-masing memang hanya punya waktu tiga menit *gitu* ya. *Tapi* juga nanti ada waktu untuk perkenalan juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti semua memanfaatkan dengan baik.

Kepada Bapak Dokter, Doktor ya, Doktor Dokter Sofyan Tan. Kami persilakan ya untuk memperkenalkan *dulu* Anggotanya dan juga memberikan tanggapan ya, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Terima kasih.

Perkenalan itu jangan masuk di dalam tiga menit ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

**Yang sama-sama kita hormati, Ibu Pimpinan Komisi X, Wakil Pimpinan, sahabat-sahabat saya di Anggota DPR RI Komisi X,
Yang kami hormati, saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, beserta wakil menteri dan jajaran yang hadir,
Yang kami hormati, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beserta wakil menteri, beserta jajaran yang hadir,
Saudara Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dan wakil menteri beserta jajaran yang hadir,
Hadirin-hadirat yang saya muliakan.**

Pertama-tama, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat pada Saudara Menteri yang telah ditugaskan dalam Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja, semoga lima tahun ini kita dapat saling mengisi agar bisa mencapai harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita.

Saya selaku Kapoksi X, Fraksi PDI Perjuangan. Saya memiliki, kami memiliki delapan anggota, dengan ketuanya yang kami berikan penugasan di depan untuk mengatur acara jalannya rapat, yaitu Ibu My Esti, dari Yogyakarta dan juga bertindak apa, jabatan dia bukan hanya Wakil Ketua, *tapi* juga di Banggar. Jadi aman Pak, soal uang.

Saya juga didampingi oleh Bapak I Nyoman Parta dari Bali. Beliau selain Anggota, juga merangkap di Baleg, Badan Legislasi. Kemudian, kami memiliki cucu presiden pertama, Mbak Puti Guntur Soekarno, yang juga merangkap di BURT. Dan kemudian, Ibu Mercy yang masih bertugas di Maluku, juga di Banggar. Dan sejarawan kami, Bapak Bonnie Triyana dari Banten I.

Kemudian kami juga punya musisi yang hebat, Mas Once Mekel dari DKI Jakarta II. Dan kita punya komedian yang terkenal, Mas Denny Cagur dari Jawa Barat II. Dan saya sendiri dari Sumatera Utara I, dokter yang tidak buka praktik lagi. Kerjaan saya hari ini berubah mengobati kemiskinan yang diakibatkan kebodohan. Baru tiga periode, kalah dengan senior saya, Bapak Ferdiansyah yang sudah enam periode Pak. Jadi dia suhu kami Pak. Di komisarilah, utama dia.

Bapak dan Ibu, hadirin-hadirat yang saya muliakan.

Bapak Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah, kami sudah berkenalan jauh-jauh hari. Jadi tetap posisinya berada di depan kami, *tapi* hari ini sebagai menteri, kemarin sebagai narasumber. Sebagai latar belakang Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, merupakan satu lembaga keagamaan yang terkenal di Indonesia dan terbesar yang memiliki 3.334 sekolah. Sudah 6.000? Sudah 6.000, berarti saya ketinggalan. Berarti yang data saya itu terjadi peloncatan yang luar biasa. Ini saya ingin mengatakan bahwa dengan memiliki sekolah yang demikian banyak, tentu memahami persoalan-persoalan pendidikan yang ada. Jadi Bapak pantas jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dan saya tahu juga Pak, selama ini pendidikan yang diajarkan juga mengajarkan tentang hal-hal yang menyangkut tentang keberagaman. Ya, tesis Bapak saya baca juga. Artinya, saya tidak ragu lagi lah bahwa pendidikan inklusif yang ingin Bapak lakukan sesuai dengan ideologi negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ditemani sahabat saya, Pak Fajar, yang pernah, memberikan nilai kepada sekolah yang saya bangun, mendapat Maarif Awards pada tahun 2014. Artinya, Pak, kita sudah sehat, Pak.

Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Kita punya banyak masalah ya. Saya sendiri begitu baca, begitu Bapak terpilih ditugaskan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu muncul berbagai meme maupun di Facebook, di WhatsApp, di mana saja, yang seolah-olah Bapak adalah antitesis daripada Mas Nadiem Makarim. Semua yang dilakukan oleh menteri yang lama, itu akan dirubah, di-*delete*. Berbeda dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknik, saya akan meneruskan apa yang baik.

Tapi ternyata setelah saya mendengar langsung wawancara Bapak, ternyata Bapak bukan berpemikiran seperti itu. Bapak mengatakan bahwa saya akan menyiapkan satu bulan mendengar aspirasi dari berbagai pihak dan tidak akan segera memutuskan kebijakan yang berseberangan tersebut. Maaf, saya menggunakan hak konstitusi saya untuk berbicara pada hari ini. Pak Menteri, Pak Menteri, karena itu jangan muncul pameo setiap penggantian menteri adalah penggantian kebijakan maupun kurikulum. Hal-hal yang baik harus diteruskan.

Nah, karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya bahwa perubahan itu penting. Kita jangan terus melakukan perubahan-perubahan kurikulum. Itu akan mempengaruhi tiga ribu 328 ribu, 3.328.000 guru, yang harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru tersebut. Mereka akan bekerja, belajar dan belajar, yang nasibnya tidak pernah, berubah, yang saya menginginkan bahwa kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan.

Saya sangat sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua, berarti Bapak akan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan saya sepakat, pendidikan yang berkualitas harus dimulai daripada guru. Karena itu, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Yang sebaik-baik seperti apa yang baiknya? Adalah bahwa jangan lagi mereka punya hak penghasilan 230 ribu per bulan. Kita sudah ada instrumen. Undang-Undang Dasar kita, sudah menjamin itu.

Nah, karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Mas Menteri, bahwa jangan ada yang di bawah UMR lagi lah. Instrumen apa yang bisa digunakan? Sertifikasi, Pak, yang Bapak sampaikan itu. Nah, ini kan berhenti hari ini. *Inpassing* yang sudah tidak ada. Kalau itu kita gunakan, hari ini tidak ada guru kita yang penghasilannya di bawah UMR, atau bekerja sebagai pemulung, atau sebagai pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru.

Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa menurut *mandatory*, kita menerima 20% anggaran pendidikan, yang kalau dihitung pada tahun 2025, kita akan menerima sebesar 722 triliun, sungguh besar. *Tapi* kita sering, sering bilang bahwa itu bukan bagian daripada kami. Undang-Undang Sisdiknas di dalam itu mengatakan yang bertanggung jawab penggunaan pendanaan itu adalah Kementerian Pendidikan. Nah, bahwa dia bergeser ke mana-mana, Bapak bagaimana menangkap itu kembali agar bisa memenuhi menaikkan gaji guru?

Nah, saya ingin sampaikan bahwa berkaitan tentang kemiskinan. Untuk memutus kemiskinan berarti pendidikan harus berkualitas, tetapi juga harus mampu memberikan kesempatan belajar yang setinggi-tingginya.

Pak, saya mengunjungi Muhammadiyah yang di pedesaan, Al-Washliyah di pedesaan. Uang sekolah mereka cuma 15 ribu, Pak. Nggak, gaji guru 500 ribu. Kepala sekolah kerja delapan tahun, 800 ribu. Kita punya dana 722 triliun. Nah, komponen apa, komponen apa yang bisa kita berikan? Ternyata program Indonesia Pintar itu jitu untuk memberikan. Walaupun SD 450 ribu, itu bisa membebaskan uang sekolah mereka. 180 ribu bayar masih sisa 270 ribu. Nah, karena itu saya ingin menggambarkan Pak bahwa hari ini tahun 2025 program Indonesia Pintar kita ada 17,9 juta ya. Menghabiskan dana 9, menyediakan dana 9,67-an, 9,6 triliun. Nah, untuk dari, untuk 17 9 juta dari 44 juta, setengah juta peserta didik.

Nah, saya ingin mohon, Pak, kalau bisa yang PIP, SD, SMP, sudah lama *nggak* naik. Kemarin yang SMA, SMK sudah naik. Dari satu juta menjadi 1,8 juta, yang 450 ribu dan 750 ribu hendaknya dipertimbangkan untuk dinaikkan.

Saya kembali kepada Pak Menteri Pendidikan Tinggi. Saya sepakat Pak, bahwa hari ini pendidikan tinggi kita itu masih jauh, karena APK kita baru mencapai 39,37%, 2024. *Tapi* ingat bahwa itu terjadi kenaikan, Pak. Tahun 2020, APK kita hanya 30,85%. Hari ini 39,37%. Ternyata di dalam hal ini yang meningkatkan APK kita secara tidak langsung itu adalah program, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Pak, yang hari ini telah mencapai satu juta orang dengan dana 14,7 triliun ya. Jumlah mahasiswa kita 8 juta 422.

Nah, kalau kita ingin APK kita semakin naik, KIP Kuliah-nya itu harus dipertimbangkan untuk ditambah ya. Karena kita memiliki presiden yang suka pendidikan, presiden yang memiliki perpustakaan yang begitu mewah dan besar, dan tiap hari baca buku, nanti tinggal minta Pak Fadli Zon kasih sentilan dikit. Jadilah dana itu untuk KIP Kuliah untuk dipertimbangkan. Dan menurut saya ini adalah faktor.

Tetapi kita juga penting sekali, Tridharma itu kayaknya *nggak* seimbang, Pak. Penelitian kita itu kurang ya. Kalau yang lain, oke, *udah* ya. Dengan Profesor Stella yang kita *import* dari Tsinghua University, saya ingin menggambarkan bahwa guru besar kita hari ini cuma 2% dari 314 ribu dosen, 2%. Malaysia guru besar kita itu sudah 5,65%. Artinya, jiran kita itu jauh lebih hebat daripada kita. Padahal mereka *dulu* belajar daripada kita.

Nah, berdasarkan itu, anggaran riset kita. Saya kemarin saya baca-baca BOPTN, Pak, cuma 1,85 triliun, vokasi 110 miliar. Mau jadi apa, Pak? Ya. Kalau di BRIN 5,5 triliun, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan anggaran sekaligus menyeimbangkan bahwa riset merupakan hal yang utama di dalam Tridharma pendidikan tinggi tersebut.

Nah, yang saya ingin sampaikan, periset kita itu hari ini 216 ribu, Pak. Sama-sama kita merdeka dengan Korea Selatan, Korea Selatan 15 Agustus, 15 Agustus, kita 17 Agustus, tahun yang sama, mereka memiliki 545 ribu periset.

Saya berharap, Pak, Bapak seorang keluarga menteri, saya katakan. Jadi waktu saya sekolah SMP kelas 2, Pak, Bapaknya Menteri Pendidikan, Bapak Soemantri ya. Sekarang 51 tahun kemudian, Bapak berada di sini kembali. Selamat dan selamat berjuang untuk menuntaskan kemiskinan sesuai dengan Asta Cita Kabinet Merah Putih yang keempat dari Pak Prabowo.

Sekian dan terima kasih, selamat berjuang. Merdeka!

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Merdeka!

Terima kasih kepada Pak Sofyan Tan.

Dan sekarang kita mungkin aturan main agak sedikit dirubah *nih* atas sepakat, kesepakatan dari meja Pimpinan. Sekarang masing-masing fraksi satu *dulu* di putaran satu. Jadi, bisa lebih leluasa. Nah, nanti setelah itu, pada putaran berikutnya kita beri kesempatan lagi kepada Anggota dari fraksi yang bersangkutan.

Nah, jadi sekarang kita dari Fraksi PDI Perjuangan. Mohon sabar ya teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan. Kita pindah *dulu* ke Fraksi Partai Golongan Karya.

Dan saya ingin memperkenalkan di sini hadir, Bapak Haji Muhamad Nur Purnamasidi dari Dapil Jawa Timur IV, yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran. Nah, beliau ini mendapatkan *award* dari Komisi X sebagai pejuang guru honorer, ya Prof. Nunuk ya. Jadi mohon ini terus dikawal, Bu Nunuk, isu yang terkait guru honorer ini.

Dan kami juga ingin memperkenalkan tokoh yang mungkin kalau kami di Komisi X ini merasa beliau ini adalah komisaris utama yang memahami sekali ya seluk beluk sejarah dan juga tetap konsisten selama enam periode duduk di Komisi X, Kang Ferdiansyah, S.E., M.M., dari Dapil Jawa Barat XI dan beliau juga mendapatkan satu kepercayaan yang besar dari Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai Sekretaris. Jadi ini kalau sudah di Pimpinan MPR RI itu ibaratnya Prof. adalah negarawan yang sudah lewat urusan pribadinya. Nah, juga di

Baleg, budayawan. Jadi di Baleg juga Kang Ferdi ini sudah menginisiasi banyak sekali perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Cagar Budaya ya, dan undang-undang lainnya.

Kami juga perkenalkan ada Ibu Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., dari Banten I yang juga Anggota Banggar. Jadi ini tidak lazim di Golkar ini di komisi-komisi bahkan ada satu komisi yang *nggak* ada Banggar-nya. *Tapi* khusus Komisi X mau mengawal anggaran fungsi pendidikan, ada dua Banggar-nya ya, Bu Adde Rosi titip ya.

Dan juga Bapak Ashraff Abu, nah, ini tokoh kita dari Dapil Jateng X. Dan juga Bapak Agung Widyanoro, S.H., M.Si., dari Jawa Tengah IX yang juga Pimpinan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi semua Anggota Dewan *tuh* takut kalau sama Pak Agung ya catat, tercatat semua itu pelanggarannya.

Dan yang terakhir Bapak Drs. Juliyatmono, M.M., M.H., dari Jawa Tengah IV. Ini mantan kepala daerah dan sangat *concern* juga dengan berbagai isu pendidikan.

Mungkin untuk putaran pertama ini kami beri kesempatan kepada senior.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya mudah-mudahan kita bisa berbagi waktu cepat karena ini pertemuan yang baru pertama kali atau kalau di dunia perfilman *grand premier*.

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu,
Shalom.*

**Yang kami hormati Pimpinan dan para Wakil Ketua,
Bapak dan Ibu Anggota Dewan Komisi X yang kami hormati,
Para Menteri Mendik, Mendikdasmen, Mendik ini Mendik, *waduh*, Mendikti
Sains dan Teknologi dan Menteri Kebudayaan.**

Jadi kita sebenarnya sama Bu ya, cuma dibagi tiga saja. Untungnya cintanya bukan terbagi tiga. Baik, dan tentu para, kalau saya sebutkan kita menghabiskan waktu. Jadi...

Para hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Pertama saya tidak terlalu banyak berkomentar. *Tapi* kalau kita lihat bahasanya kalau dalam permainan politik kita lihat dulu, komitmen, konsistensi terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu terhadap jajarannya. Dan jajarannya nurut *nggak? Gitu*, yang penting jajarannya nurut apa *nggak?* Jadi kalau jajarannya *nggak* nurut, sikat, Pak. Oh iya. Oh iya. Kan kita kan mendukung Pemerintahan Pak Prabowo supaya juga lancar. Artinya, di sini perlu ketegasan. *Nggak* tegas Bapak dan Ibu akan disikat sama anak buah.

Ini bisa kebalik-balik kan. Untung Pak Satryo, saya rasa sudah paham soal itu kan. Karena sembilan tahun beliau jadi Dirjen Dikti kan.

Bapak/Ibu sekalian.

Ada beberapa hal. Yang pertama, saya terima kasih sudah bagus tindakan program berdasarkan peraturan perundangan dari Pak Mu'ti, Pak Fadli Zon, Pak Satryo. Jadi semua kita berpijak dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai di luar itu.

Nah, kaitan dengan hal tersebut, kami memohon. Jadi ada harapan juga dari kami. Cek ulang terhadap peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan undang-undang yang di atasnya.

Pak Ferdi bisa tunjukkan? Bisa, cuma kalau di sini nanti tiga jam tiga hari saya. Banyak peraturan menteri yang lalu, yang tidak sinkron dengan peraturan undang-undang. Itu dievaluasi. Artinya apa? Jangan sampai Bapak dan Ibu membuat kebijakan itu tiba saat di belakang tanpa melibatkan, *meaningful participation* terhadap rakyat, pada pemangku kebijakan tidak dilibatkan secara utuh. Itu yang kita inginkan.

Kegaduhan selama ini terjadi seperti itu, karena tidak pelibatangnya maksimal. Tidak pandai bergaul jajaran Kemendikbudristek pada waktu itu. Silakan kalau ada yang kurang senang sama saya. *Tapi* ini penilaian saya sebagai Anggota DPR RI. Jadi kebijakan-kebijakan itu hendaknya juga, juga pelibatan, juga ya ada dalam konteks juga mengajak dan sebagainya.

Nah, oleh karena itu peraturan menteri yang tidak sinkron terhadap peraturan undang-undang yang ada di atasnya, seperti di, tadi dengan baik dan bagus, Pak Mu'ti di antaranya menyebutkan runut dan runtut daripada Pasal 31, nanti kebudayaan Pasal 32, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, tolong diijajar, Pak. Mana, nanti Biro-biro Hukumnya ini harus dilatih *dulu nih*. Nanti yang mau jadi Sekjen juga harus dilatih. Dijajar, bener *nggak* ada timpang, ada irisan, ada deviasi terhadap urutan peraturan perundang-undangan? Karena tugas DPR di antaranya adalah legislasi.

Jadi kami akan tegas soal itu. Runut dan runtut pola pikir, pola tindak itu keberhasilan pendidikan. Tidak terjadi perubahan pola pikir dalam pola

pendidikan, berarti pendidikan gagal. Nah, itu kami mohon bantuannya dan kerja samanya. Oleh karena itu, hendaknya dalam membuat kebijakan publik dalam dunia pendidikan dan kebudayaan memiliki juga kajian.

Nah, tadi Pak Fadli Zon, saya sebelumnya DPR ya, artinya jangan sampai nanti Bapak-Bapak yang non-DPR ini kalah sama Pak Fadli Zon, kan *gitu* kan. Dalam artian apa? Saya ingin katakan, mohon maaf, ini gurau. Politisi berperilaku akademis, jangan sampai akademis berperilaku politisi. Ngerti kan saya rasa?

Artinya, selama ini kebijakan semua-semua partai dalam Bapak/Ibu sekalian melakukan kebijakan menentukan si A jadi pilkada, baik gubernur dan semua menjadi pileg. Itu punya dasarnya, hasil survei, hasil penelitian, dan sebagainya. Nah, ini jangan terjadi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan ya kan. Kalau kata Si Doel, Pak Fadli Zon, jangan sampai Si Doel Anak Betawi tak berbudaya ya kan, *gitu* kan. Nah, itu yang juga mohon pengertiannya.

Nah, oleh karena itu dalam membuat target-target. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama. Dalam membuat target, tadi baik APK, APM, dan itu baik di perguruan, pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tidak pernah, lagi disajikan atau tidak pernah, kami disajikan yang lalu itu adalah ketika kenaikan 1%, itu butuh duit berapa sih? Jangan minta dukungan terus kita kan bingung, Pak Bu, dukungan apa yang perlu didukung? *Nggak* ada argumentasinya, tidak ada *listening*-nya, tidak, tidak ada alasannya yang kuat buat 1% itu membutuhkan misalnya 2,6 triliun untuk pendidikan dasar, misalnya 1,8 triliun untuk pendidikan tinggi, misalnya. Itu tidak ada dibuat hal-hal seperti itu, perhitungan-perhitungan itu.

Jadi targetnya ya kira-kira saja, *out of the blue*. Itu yang kami juga mohon sekali lagi. Kalau soal dukung, kita dukung Pak karena Partai Golkar adalah budayanya partai birokrat. Jadi siapapun pemerintahan-nya, kita akan dukung dari Partai Golkar. Apalagi di sini kami juga pendukung Pemerintahan Bapak Prabowo. Nah, oleh karena itu, mendukung juga tentu punya argumentasinya. Artinya apa? Jangan sampai kita mendukung, tidak malah, tidak memperkuat. Mendukung dalam rangka konteks memperkuat.

Nah, oleh karena itu, ada juga empat, mungkin Pak Satrio ingat. Ada empat pilar dunia pendidikan dan kebudayaan waktu itu adalah yang pertama akses, dua mutu, tiga relevansi dan atau daya saing, dan, dan keempat tata kelola. Kami nilai kemarin relatif agak-agak kurang baik ya kan. Akses, mutu, tiga nya relevansi dan daya saing, dan tata kelola.

Oleh karena itu, juga komitmen konsistensi dan kompetensi dan pandai bergaul, tolong Bapak/Ibu sebelum menentukan para pejabat Eselon I dan II, tentukan ini menjadi syarat, punya kompetensi, punya komitmen, konsistensi, dan pandai bergaul. Karena kompetensi, tadi diutarakan Pak Mu'ti, ada juga dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Pejabat tidak punya kompetensi, kepribadian, dan sosial selayaknya tidak, bukan, tidak boleh, ataupun kalau perlu tidak boleh, ataupun

tidak perlu dipilih jadi pejabat, *nggak* punya kompetensi, kepribadian, kompetensi sosial. Kan kita makhluk sosial, yang penuh dengan perasaan kan *gitu*, ya kan. Saya rasa Pak Didi harus lebih paham. Harus dibalik lagi, Pak Didi jadi Sekjen nanti. Nah, itulah yang, yang juga.

Nah, jadi banyak hal. Jadi tolong nanti di berembuk bertiga, ada Undang-Undang Bahasa, bang, bang apa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, *gimana* sikapnya kan? Apakah akan dijadikan setiap penilaian uji kompetensi untuk Eselon II dan I digunakan? Jangan main keluar melulu Pak Badan, ini mainnya keluar. Di, diujicobakan di Dikbud *dulu*. Di lingkungan Dikbud sudah beres belum? Nah, itu yang juga menjadi bagian-bagian yang menjadi komitmen. Kan kita 28 Oktober kan baru memperingati Hari Sumpah Pemuda, menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Tapi, tolong juga nanti Pak Satryo, Pak Mu'ti dan Pak Fadli Zon paparan dilihat lagi, jangan ada bahasa asing lagi ya, *re-skilling*, *up-skilling*, buat apa kita punya Undang-Undang Bahasa? *Nggak* ada gunanya lagi.

Nah, itulah sekelumit sebagai pengantar. Di lain waktu dan lain tempat kita akan diskusi yang lebih panjang. Mudah-mudahan bisa sampai pagi sehingga terjadilah transformasi pemikiran kita. Jangan masursur sendiri, kata Bu Hetifah. Dalam ilmu politiknya, Pak Fadli Zon ya, jangan sursur sendiri.

Terima kasih, mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om, Om Swastiastu.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Ya, siap. *Hatur nuhun*, Kang Ferdi.

Walaikumsalam.

Selanjutnya, kepada Fraksi Partai Gerindra, Bang Ali Zamroni, S. Sos., M.A.P., mungkin bisa memperkenalkan *dulu* Anggotanya yang hadir dan langsung menyampaikan pandangan dan saran.

Silakan.

F-P. GERINDRA (ALI ZAMRONI, S. Sos., M.A.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X yang saya hormati dan saya banggakan.

Kami dari Fraksi Gerindra ini terdiri dari enam anggota ya. Saya Ali Zamroni, Dapil Banten I, itu meliputi Pandeglang dan Lebak ya. Untuk di meja Pimpinan ada Ibu Himmatul Aliyah dari Dapil DKI II ya, dan juga merangkap sebagai BKSAP. Hadir pula di sini *Teh* Melly Goeslaw ya dari Dapil Jawa Barat I dan juga BKSAP. Hadir pula Ruby, Ruby Chairani Syiffadia ya, dari Dapil Lampung I ya. Ada, di sini sebenarnya ada Ahmad Dhani *cuman nggak* ada ya dia, *nggak* ikut ya. Ada Ahmad Dhani Prasetyo dari Dapil Jawa Timur I. Dan juga ada Bapak La Tinro La Tunrung dari Dapil Sulawesi Selatan III ya, *tapi* tidak hadir ya Pak La Tinro ya. Jadi kami di sini hadir berempat.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,
Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Mu'ti,
Pak Satryo, Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Sains,
Pak Fadli Zon. sebagai Menteri Kebudayaan,
dan seluruh jajarannya, dan
Wakil Menteri yang saya hormati.**

Kami melihatnya ini adalah hanya ekspos saja ya dari program dari tiga kementerian ya. Saya tidak akan terlalu dalam menyampaikan, *tapi* hanya sepintas-sepintas saja terkait dengan apa namanya, apa yang disampaikan.

Sebetulnya saya kemarin-kemarin agak kaget dengan beberapa *statement* yang beredar di media massa terkait dengan luar biasanya Mas Menteri Pendidikan ini terkait dengan bagaimana merubah seolah-olah merubah yang lama akan saya *review* semua dan sebagainya. *Tapi* itu menarik ya, bagi saya dalam sebuah kebijakan itu ada, ada perubahan dan ada diteruskan. Jadi kami akan melihat bagaimana Mas Menteri ini kemudian melakukan perubahan-perubahan terhadap hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto.

Cuman memang ada banyak hal, Mas Menteri terkait dengan ini. Kami minta kepada seluruh menteri yang hadir di sini, tolong ketika menyampaikan kebijakan itu sampaikan di ruang komisi. Banyak sekali hal-hal yang kemudian kita baru mendengar karena menteri-nya itu menyamp, di komisi tidak ngomong apa-apa, kemudian di luar menyampaikan banyak hal. Kami bingung Pak ketika ditanya sama konstituen kami.

Hah? Pas reses lagi, susah kan? Jadi kita minta *nih*, kita minta tolong kerja samanya ini. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu disampaikan di sini. Kita, kita bisa urun rembuk lah, kita bisa menyampaikan *gitu*. Jangan kemudian ketika kita kemudian ditanya kita tidak tahu apa-apa kok. Itu yang perlu menjadi garis besar ya.

Yang kedua bahwa kebijakan-kebijakan baru ini yang, yang disampaikan oleh Mas Menteri Dikdasmen ini kita minta untuk dilakukan kajian secara mendalam ya. Kan yang di luar itu banyak beredar dikembalikannya lagi

ujian nasional, dihilangkan zonasi, dan sebagainya dan sebagainya. *Tapi* mohon ini jangan terlalu gegabah Mas Menteri ya. Karena ini harus dikaji secara mendalam. Bagaimana ini kemudian, masa kita harus kembali dari nol, kira-kira begitu. Ini menjadi sesuatu yang harus kita hindari ya.

Pendidikan vokasi ini dari beberapa survei ini harus ada perbaikan ya, dari jumlah rata-rata pengangguran di kita, rata-rata penyumbang terbesarnya, salah satunya adalah dari pendidikan vokasi. Mau tidak mau, itu faktanya ada, *survei* dari BPS-nya ada. Apa yang salah? Kita tidak tahu bagaimana. Di sini saya melihatnya tidak ada *link and match* antara dunia industri dan dunia pendidikan kita. Ketika lulus vokasi, pas mau mendaftar sudah ketinggalan zaman, nganggur jadinya. Nah, ini menjadi penting buat kita bersama.

Untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Prof. Satryo, dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto banyak sekali dibutuhkan riset-riset terkait dengan program yang ada, contohnya hilirisasi. Hilirisasi ini dalam, di dalamnya riset semua. Yang kedua swasembada pangan yang di target 2028 harus swasembada pangan. Itu melibatkan riset dari pertanian dan semuanya ya kan. Bagaimana sawit menjadi bahan bakar solar 50% ya, ini juga butuh riset. Kami minta dan sarankan kepada Prof. Satryo bagaimana ini pelibatan perguruan tinggi ya. Karena kami tidak mau perguruan tinggi atau PTN BH ini, itu hanya jadi penonton saja, sementara yang riset itu orang lain. Ini kan harus kita keroyok bareng-bareng ya. Ini menjadi *project* besar negara kita bagaimana dalam kemandirian energi, kemandirian pangan dan semuanya. Ini menjadi penting.

Bang Fadli Zon yang saya hormati ya.

Kami melihat apa yang disampaikan, saya baru mendengar setelah kebudayaan ini dipecah menjadi, dirjen ini menjadi kementerian rupanya banyak sekali program yang disampaikan *gitu*. Kami percaya Bang Fadli ini kan kuat dalam diplomasi. Banyak artefak kita, manuskrip kita yang ada di luar negeri ini supaya bisa kembali ke tangan kita. Bagaimana ini menjadi salah satu warisan budaya kita Pak. Dan juga kami sepakat bagaimana ada lobi-lobi terhadap UNESCO ya, terkait dengan warisan-warisan budaya yang nanti takutnya kalau kelamaan tidak disampaikan, dicaplok orang negara lain, baru kita teriak-teriak, percuma juga ya.

Dan yang terpenting lagi, Bang, bahwa kebudayaan ini juga harus diselaraskan dengan kearifan lokal di seluruh Indonesia ya. *Tapi* yang perlu Pak Menteri ketahui bahwa anggaran dinas pariwisata, kalau di daerah namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya. Saya pikir kalau di atasnya sama agak enak *gitu tapi* di sini sendirian *gitu*. Tetapi yang perlu Pak Menteri ketahui bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di daerah itu klasifikasinya C ya, di seluruh Indonesia.

Jadi kami, ya artinya harus *support*-nya harus dari pusat ya. Kegiatan-kegiatan bagaimana mempertahankan kearifan lokal yang ada. Kami Anggota DPR ini terdiri dari dapil yang berbeda-beda ya. Dari 45 orang ini mungkin hanya dapil saya yang tiga orang, saya, Bu Adde Rosi, dan Pak Bonnie, selain

itu satu-satu semua ya. *Tapi* kita keuntungannya lebih cepat selesai dalam mengeroyok dapil lah, kira-kira begitu. Kita akan bagi zona kira-kira *gitu*. Ini penting buat bagaimana kita di Anggota DPR di daerah ini kemudian bisa memper, mem, mem, memberikan sumbangsih kepada mereka.

Katakanlah begini Bang, jadi banyak sekali sanggar-sanggar tari dan sebagainya yang kemudian mempertahankan apa namanya, budaya mereka, baik itu tarian yang skalanya besar, menengah, dan biasa-biasa itu. Kemudian mereka tiap hari latihan terus, tetapi tidak ada yang nanggap, habis uangnya. Kadang-kadang ketika kita kasih bantuan-bantuan berupa alat buat seragam, itu mereka langsung luar biasa *happy gitu*. Jadi ini menjadi bagaimana kita mempertahankan budaya-budaya itu menjadi kebanggaan buat daerah ya. Karena ketika mereka menyampaikan ke provinsi, pemerintahan daerah, menolak tidak ada uangnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting.

Jadi kita berharap ini menjadi program kita bersama dan saya rasa itu Pimpinan hanya *highlight* saja nanti kita akan perdalam, penajaman itu pada saat kita rapat dengan masing-masing kementerian.

Saya rasa itu Pimpinan yang disampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Terima kasih Bang Azam.

Banyak hal yang disampaikan yang merupakan pasti isi hati dari banyak Anggota lain.

Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada Fraksi Partai Nasional Demokrat atau Fraksi Nasdem yang ini juga *full team nih*.

Mbak Ratih Megasari Singkaru, bisa perkenalkan Anggotanya termasuk yang di sebelah kirinya. Ini kita bangga, Ibu Lestari Moerdijat.

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Tamu spesial

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Mbak Reri, sebagai Pimpinan MPR RI juga ikut rapat kita pada hari ini. Mungkin Mbak Reri harus spesial *nih* ya nanti memberikan masukan.

Kita silakan, Mbak Ratih sebagai Kapoksi.

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Baik, terima kasih banyak.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati, Ibu Ketua beserta seluruh Pimpinan, beserta seluruh Anggota Komisi X dan juga para Menteri yang sudah hadir.

Ada Pak Abdul Mu'ti selaku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu, Bapak Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Lalu juga Bapak Fadli Zon. Senang Pak, akhirnya kita bisa bertemu dan bekerja sama kembali. Karena *dulu* bersama-sama di BKSAP bareng beliau. Sekarang beliau menjadi Kementerian Kebudayaan. Dan juga tentunya kepada seluruh para wamen yang saya hormati dan juga jajaran kementerian lainnya yang saya hormati.

Insyallah kita semua hari ini selalu dalam kondisi sehat *wal afiat, aamiin ya rabbal alamin.*

Sebelumnya saya mungkin izin memperkenalkan diri sendiri, Bapak-Bapak semua. Saya Ratih Megasari Singkarru. Saya dari Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Barat. Selain Kapoksi, saya juga ada di Banggar. Jadi di periode ini banyak sekali teman-teman di Komisi X yang ada di Banggar. Jadi insyaAllah, pasukannya semakin kuat untuk tetap bisa memperjuangkan anggaran bagi dunia pendidikan kita.

Lalu di sebelah kiri saya, ini ada tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Lestari Moerdijat selaku Pimpinan MPR dari Dapil Jawa Tengah II ya. Lalu juga tentunya di sebelah kanan saya, ada Ibu Eva Stevany Rataba dari Dapil Sulawesi Selatan III. Lalu ada Prof. Dr. Ir. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S. Kom., M.M., beliau ada di seberang sana dari Dapil Banten II yang juga merupakan Anggota Baleg. Lalu juga ada Ibu Lita Machfud Arifin, silakan berdiri dari Dapil Jawa Timur I. Dan terakhir ada Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, S.P., M.P., dari Dapil Sulawesi Tengah, ini beliau ada di belakang.

Jadi hari ini Fraksi Nasdem datang komplit, Pak Menteri semuanya, masyaAllah. Dan yang paling tampan hanya Prof. Furtasan sendiri, sisanya isinya diisi oleh srikandi-srikandi, perempuan semua, betul.

Tentunya terima kasih atas perkenalannya dari tiga Kementerian beserta seluruh jajaran yang kali ini sudah terpecah tiga, insyaAllah pertemuan hari ini berkah dan mudah-mudahan menjadi awalan yang baik untuk kita benahi seluruh sistem pendidikan kita dengan segudang permasalahan yang ada, yang tentu sampai dengan saat ini masih banyak PR-nya dan belum tuntas.

Dan di dalam kesempatan ini tentu ada beberapa catatan dari Fraksi Nasdem. Jadi karena ini baru sebatas perkenalan, jadi kami hanya meng-*highlight* beberapa hal yang menurut kami penting agar ini juga bisa sekiranya menjadi perhatian daripada kementerian terkait. Terutama, pertama adalah peningkatan pendidikan di daerah 3T, baik itu dalam bentuk sarpras, *let's say* seperti akses internet, teknologi, sarpras fisik, dan lain sebagainya. Ini sampai dengan sekarang masih sangat butuh perhatian Pak. Apalagi kalau kita bicara sarpras banyak teman-teman di Komisi X yang merasa tidak bisa berbuat banyak begitu kita pulang ke dapil masing-masing, karena kalau kita bicara fisik pendidikan itu semuanya ada di Kementerian PUPR.

Jadi besar harapan kami ya, Bu Ketua, mudah-mudahan terkait yang sifatnya fisik itu bisa dikembalikan lagi ke *leading sector* dunia pendidikan, yaitu ada di Bapak-Bapak semua yang ada di depan sini. Dan juga tentunya itu berkaitan dengan akses pendidikan yang sangat, yang harus inklusif serta merata Pak yang juga masih dirasa sangat kurang. Bahkan kita tidak usah bicara daerah 3T, bahkan di kota yang besar saja terkait keinklusan ini juga masih dirasa sangat kurang.

Lalu juga selanjutnya saya ingin sedikit membahas terkait kemampuan literasi anak-anak kita Pak. Ini juga penting. Kemampuan literasi serta penguasaan terhadap Bahasa Indonesia, mungkin terkhususnya di swasta. Banyak sekolah swasta sekarang yang bilingual ya, bahasanya yang dipakai bahkan ada yang lebih dominan menggunakan Bahasa Inggris. Artinya itu juga bagus, karena berdasarkan dari pusat bahasa yang *dulu* ada Prof. Amin. Saya tidak tahu Prof. Amin, sekarang di mana mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi terkait ini.

Saya ingat betul beliau mengatakan utamakan Bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai Bahasa Inggris. Jangan sampai tiga unsur penting utama ini jadi tergeserkan *gitu* Pak, ya. Walaupun kita tahu betul yang penggunaan Bahasa Inggris tentu harus kita gunakan, betul. *Tapi* kita banyak Pak, balik ke daerah masing-masing, bahkan di tempat saya saja kalau kita masuk ke pelosokan itu banyak orang yang anak-anak kendala sekali menggunakan Bahasa Indonesia *gitu*. Jadi menurut saya muatan Bahasa Indonesia ini masih tetap harus diutamakan Pak di dalam dunia pendidikan kita. Karena ini juga merupakan unsur universal kebudayaan ya, Pak Fadli ya, terkait kalau kita bicara bahasa.

Lalu tentunya berikutnya adalah kebutuhan SDM Pak. Tadi sedikit sudah dibahas oleh Pak Sofyan Tan, terkait distribusi guru Pak. Ini tidak berbanding lurus. Kita selalu merasa bahwa daerah itu masih sangat kekurangan guru. Sebenarnya mungkin gurunya ada, *cuman* mungkin pendistribusiannya yang belum merata sampai ke ujung daerah *gitu*. Dan kendalanya adalah mereka juga tidak mau ditempatkan sampai ke ujung daerah terkait kesejahteraannya yang menurut mereka tidak sesuai dengan di mana mereka ditempatkan. Jadi ini juga menjadi, harus menjadi skala prioritas terkait kesejahteraan guru *gitu* ya.

Lalu berikutnya terkait vokasi. Tadi sedikit juga sudah dibahas oleh Bang Azam untuk bagaimana SDM kita agar bisa memenuhi kebutuhan industri, yang di mana ini menurut saya berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait tantangannya relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Pak Satryo, saya, kami melihat Fraksi Nasdem bahwa pendidikan tinggi itu harus mampu mengikuti perkembangan industri dan juga teknologi. Dan harus melahirkan lulusan yang memang berada memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan masa kini *gitu*. Dan juga jika lulusan kita tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, itu sangat sulit sekali untuk kita bisa bersaing di tingkat global.

Lalu juga masih di pendidikan tinggi, saya ini mempunyai data yang berdasarkan oleh data BPS. Berdasarkan data, angka partisipasi lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi itu masih sekitar di angka 30 sampai dengan 40% Pak. Artinya mungkin boleh dikata setiap 100 siswa sekitar 30 atau 40 yang hanya mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kesenjangan ini sangat berdampak kepada daya saing tenaga kerja kita yang masih sangat tertinggal sekali dengan negara tetangga-tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, dan juga Singapore.

Jadi ketimpangan akses ini juga dirasa Pak oleh kaum penyandang disabilitas, Pak. Karena berdasarkan data, itu hanya sekitar 2,8% yang hanya mampu mengakses ke pendidikan tinggi. Kaum disabilitas ini yang paling sering merasa mereka itu tidak diperhatikan oleh negara. Bukan hanya untuk di pendidikan tinggi, *tapi* dari tingkat jenjang dasar ya mulai dari PAUD sampai dengan SMA ataupun SMK. Sekali lagi, itu kembali ke awal yang di mana inklusivitas itu, Pak yang masih sangat dibutuhkan. Seperti itu.

Lalu saya bergeser ke Pak Fadli Zon. *Dulu* manggilnya Pak Ketua, sekarang Pak Menteri ya, Pak Fadli. Ini kami senang karena dengan dipecah tiga seperti ini kementerian, artinya punya fokus anggaran tersendiri di Kementerian Kebudayaan. Dan tentunya kami berharap Fraksi Nasdem dengan adanya kementerian ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita Pak yang berkecimpung di bidang kebudayaan, terutama di daerah-daerah yang memang daerah tersebut sangat kaya sekali akan tradisi dan budayanya. Karena masih banyak kekhawatiran mengenai kurangnya kompetensi birokrasi dalam menangani masalah kebudayaan, Pak Fadli terutama di daerah di luar wilayah metropolitan, seperti Bali dan Jakarta *gitu*.

Jadi dengan fokus yang lebih besar pada pengembangan kebudayaan, kementerian ini menurut kami dari Fraksi Nasdem juga sangat berpotensi untuk bisa menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan juga pemberdayaan masyarakat. Sehingga potensi budaya Indonesia yang kaya itu dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik. Apalagi tadi saya melihat programnya Pak Menteri terkait empat pilar kebudayaan, itu juga menurut kami juga sangat luar biasa. Apalagi tadi saya melihat kebudayaan sebagai kekuatan diplomasi. Ini saya yakin Pak Fadli, Pak Menteri sangat *expert* terkait hal ini. Jadi tetap membawa kebudayaan, pergi mengglobal tanpa harus meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

Lalu terakhir untuk meng-*highlight* ini semua adalah porsi anggaran 20% yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dunia pendidikan. Kita semua tahu bahwa 20% tersebut tidak sepenuhnya berada di *leading sector* yang ada di dunia pendidikan *gitu* ya. Semua tersebar di berbagai kementerian lain. *Tapi* mungkin saya tidak akan *breakdown* secara detail di sini. *Tapi* yang jelas di periode yang lalu kita sudah buat yang namanya Panja Biaya Pendidikan, PR-nya banyak sekali di dalam situ yang harus dibenahi. Jadi mudah-mudahan terkait porsi anggaran ini bisa lebih condong dan banyak dan insyaAllah tentu akan diperjuangkan juga oleh kami semua di Komisi X yang di mana porsinya itu harus banyak memang di *leading sector* pendidikan yaitu adalah di tiga kementerian ini.

Jadi mungkin, Bu Ketua, PR kita kemarin itu yang Panja pendidik, Biaya Pendidikan mungkin nanti bisa diinfokan ke Pak Menteri semua di sini ya.

Terima kasih banyak mungkin itu, Ibu Ketua beserta seluruh Pimpinan beberapa *highlight* yang menjadi catatan dari Fraksi Nasdem. Semoga bisa mendapatkan atensi dari semua kementerian yang hadir di sini.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Mbak Reri mengikuti ini, itu *dulu* ya Mbak Reri ya. Nanti pasti ada kesempatan untuk Mbak Reri juga.

Kita lanjut ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Hadir Kapoksi, Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., sebelah mana ya tadi duduknya?

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Di sini.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Oh biasanya tuh di situ, sekarang pindah.

Oke, oke. Silakan diperkenalkan timnya dan langsung sampaikan pandangan dan tanggapannya.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera kepada kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X,
Yang saya banggakan para jajaran mitra kita.
Hari ini hadir Mendikdasmen RI, kemudian juga jajaran dari Mendikti
Sains Teknologi RI dan juga Kementerian Kebudayaan RI.**

Izinkan saya perkenalkan Anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadinya, jajaran Wakil Ketua ada Bapak H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., beliau dari Dapil Nusa Tenggara Barat II. Kemudian juga saya sendiri, Dr. H. Muhammad Kadafi, saya Dapil Lampung I selaku juga di Badan Anggaran. Kemudian juga di Komisi X ini, Bu Hetifah, PKB juga diwakili oleh pendiri Partai ini, Bapak Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si., beliau dari Dapil Sulsel II, jadi beliau juga sebagai BKSAP, penyair juga. Pokoknya kalau kegiatan nanti banyak catatannya dari beliau untuk bisa menjadikan renungan kepada kita untuk melahirkan suatu kebijakan apa, kebijakan dan juga kebijakan-kebijakan yang cukup luar biasa.

Kemudian juga hadir di sini, Habib Syarief Muhammad, beliau dari Jawa Barat I, beliau juga di Baleg (Badan Legislasi). Kemudian juga ada Bapak Haji Dedi Wahidi, beliau dari Jawa Barat VIII, beliau juga dari Baleg, beliau mungkin lagi berhalangan.

Jadi langsung saja Pimpinan agar waktunya bisa efektif. Tentunya, pertama adalah untuk Prof. Abdul Mu'ti beserta juga Prof. Satryo. Jadinya berdasarkan data BPS bahwa jumlah siswa kita dari SD ke SMP itu ada penurunan sebesar 58,5%. Kemudian dari SMP ke SMU maupun juga ke SMK itu ada penurunan sekitar 48%. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu dari SMU ke SMK ke perguruan tinggi. Itu penurunannya di angka 71%. Artinya, ini menjadi satu catatan yang cukup luar biasa bagaimana kita bisa melahirkan suatu kebijakan agar Indonesia Emas tahun 2045 benar-benar melahirkan SDM unggul dan juga berdaya saing. Oleh karena itu pendidikan menjadi peran utama.

Maka saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa program-program, seperti program Indonesia Pintar maupun juga program Kartu Indonesia Pintar ini menjadi salah satu solusi yang cukup luar biasa dalam mendorong, mendapatkan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia. *Tapi* dalam catatannya bahwa setelah 10 tahun penerima PIP ini Prof. Mu'ti, tidak pernah, bertambah jumlah penerimanya. Sedangkan dalam data, setiap jenjang itu ada peningkatan 3 sampai 4% jumlah calon siswa baru.

Oh, baru mulai ini kok *udah* kena.

Di setiap jenjangnya. Artinya apa? Kita harus melakukan suatu revisi dalam kebijakan karena banyak sekali masyarakat kita mengharapkan bisa mendapatkan akses pendidikan.

Hari ini bagaimana kita lihat masyarakat sangat, harus sangat bahagia dengan bisa mendapatkan akses seperti halnya Kartu Indonesia Pintar. Anak petani, anak nelayan, mereka tidak pernah bermimpi punya nanti akan menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Hari ini dengan program tersebut sangat terbantuan. Tinggal memang volumenya yang harus kita tambah. Kita baru menambah jumlah satuan rupiahnya di, di SMK maupun juga SMA. Nah, nanti mudah-mudahan yang SMP dan juga SD juga akan ditambah.

Kemudian juga berkenaan dengan tenaga pengajar *nih* juga butuh perhatian yang cukup luar biasa Prof. Mu'ti, bahwa dari tahun 2022 sampai 2030 rata-rata 60 ribu guru-guru kita yang akan pensiun. Ini masa puncak bonus demografi itu kan 2030. Ternyata di situ setiap tahunnya 60 ribu guru kita akan pensiun.

Oleh karena itu, kita mengharapkan ada satu kebijakan yang bisa mendorong bagaimana kita bisa membuat suatu pendidikan yang berkualitas dengan dihadiri oleh tenaga pengajar yang lengkap dan segala prasarannya yang juga lengkap. Dan tentunya yang paling penting adalah pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Karena jangan sampai bonus demografi itu hanya dirasakan di kota-kota tertentu. Haruslah ini kita berikan suatu pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Kemudian, ini di luar Komisi X. Kita ketahui bahwa bicara infrastruktur di bidang pendidikan itu ada di PUPR. *Tapi* setiap hari kita nonton TV selalu ada saja kasus-kasus ruang kelas rubuh menimpa siswa, ruang kelas yang tidak layak, videonya seram-seram sekali. Bangunannya *udah* retak-retak, kadang ditopang dengan kayu dan sebagainya. Ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita. Mudah-mudahan melalui jalur pimpinan dan juga kementerian, kita bisa kembali mengambil program-program tersebut agar bisa tepat sasaran.

Saya juga apa, menggambarkan Pimpinan, di irigasi yang tadinya di PUPR, sekarang berpindah ke Kementerian Pertanian. Tentunya, sangat mungkin nantinya perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan itu kembali di kementerian terkait. Nah, ini, karena mau tidak mau kita ke dapil, pasti masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan, berkenaan ruangan kelas rusak dan sebagainya, infrastruktur yang memang boleh dikatakan, Bu Sekjen sangat tahu itu berapa jumlah setiap tahunnya ruang kelas yang layak dibantu, tetapi anggarannya sangat minim, *gitu*. Nah, ini menjadi suatu upaya untuk bagaimana kita melahirkan suatu kualitas pendidikan Indonesia di masa yang akan datang.

Terakhir, tentunya Prof. Satryo, saya mengharapkan kita bisa melahirkan potensi-potensi unggulan-unggulan berbasis potensi daerah. Kita tidak mengharapkan lagi, lulusan kita itu general, dari Sabang sampai Merauke ekonominya sama, lulusan tekniknya sama. Harusnya mulai kita berfikir bagaimana fokus dengan potensi daerah. Misalnya dapil saya di Lampung bagaimana bisa fokus bicara tekniknya, bicara bagaimana teknik di pertanian, bicara tekniknya bicara teknik kelautan, bicara ekonominya juga mereka paham bagaimana ekonomi tentang pertanian dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita dorong nantinya LL Dikti ini berbasis potensi daerah. Jangan lagi kita melahirkan lulusan-lulusan yang *general*.

Mungkin itu Pimpinan sesuai dengan waktunya saya nanti berbagi dengan teman-teman lainnya. Saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kepada *Teh* Hj. Ledia Hanifa, S.Si., M.Psi.T.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Baik, terima

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Sebagai Kapoksi Fraksi Partai, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Yes.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Silakan *Teh*.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Bapak-Bapak yang mencari saya, saya ada di pojok sini.

Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama hadir.

**Yang saya hormati,
Pimpinan Komisi X,
Bapak/Ibu Anggota Komisi X,
Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Prof. Abdul Mu'ti,
Juga Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek, Prof. Satryo Brodjonegoro,
Menteri Kebudayaan, Pak Fadli Zon,
Beserta para Wamen,
Dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, empat orang yang ditugaskan di Komisi X. Di meja Pimpinan ada Bapak Mahfudz Abdurrahman dari Dapil Jawa Barat VI: Kota Depok, Kota Bekasi. Ada Mas Gamal, Mas dr. Gamal Albinsaid Dapil Malang Raya. Dan juga ada Bapak Drs. Mohammad Iqbal Romzi, saya tambahkan PPG (pakar pantun dan gurindam), dari Dapil Sumatera Selatan I. Nanti mungkin bisa banyak ngobrol sama Pak Fadli Zon. Saya Ledia Hanifa dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I: Kota Bandung, Kota Cimahi, se-dapil sama Mas Wamendikbud, *eh* Menbud.

Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih atas paparannya.

Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Catatan ini kami dapat dengan cukup lama ya berdiskusi saya sejak 2017 ada di Komisi X. Sehingga ada beberapa hal yang perlu dicatatkan.

Pertama, saya menitipkan kepada para menteri semua untuk melakukan *review* dengan hati-hati kebijakan yang lalu. Karena bagaimanapun juga sudah ada kebijakan yang digulirkan, sudah terlaksana, *tapi* tentu pasti perlu ada *review*. Contohnya misalnya di kurikulum di Kementerian Mendikdasmen dan juga Mendiktisaintek, atau ada juga jalur rempah itu, ya, di Kementerian Kebudayaan. Dan banyak hal yang perlu kita lakukan *review* secara hati-hati.

Masukan yang lebih spesifik kepada Prof. Abdul Mu'ti. Pertama, kita ini memerlukan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikannya saja, kita masih terbatas. Ada banyak sekolah yang belum ada di tempat-tempat yang seharusnya di sekitar penduduk tinggal. Salah satu contoh dapil saya saja, Kota Bandung. Dari 30 kecamatan, ada 11 kecamatan yang tidak punya sekolah SMA Negeri. Jadi bisa dibayangkan itu kota, bagaimana yang lain? Saya tidak bisa membayangkan. Artinya, kesempatan untuk mendapat pendidikannya juga jadi minim dan diperlukan yang berkualitas. Jadi nanti memang akan ada perdebatan yang lebih dalam apakah akan pemerataan, rata semua atau ada sekolah unggulan? Nah, ini kan tadi Prof. memaparkan tentang sekolah unggulan. Barangkali nanti perlu ditinjau lebih dalam lagi akan seperti apa? Apakah *pilot project*? Dan lain sebagainya.

Kedua, tentu kita perlu memastikan ketercapaian standar pendidikan. Standar pendidikan kita di Undang-Undang Sisdiknas. Selama undang-undangnya tidak diubah, maka standarnya pasti harus masih itu. Dan bagaimana alat ukurnya?

Yang ketiga, yang perlu juga dikaji lebih mendalam terkait dengan relawan mengajar *versus* guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun. Nampaknya ini perlu kita, kita kaji kita pilah mana yang bisa ada relawan mengajar, mana yang perlu diperhatikan terkait dengan guru honorer ini

Keempat, yang belum pernah, tersentuh oleh kita adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini tidak bisa semua hal dibebankan kepada guru. Pasti ada tenaga kependidikan, urusan administrasi, urusan, bahkan operator, operator sekolah itu kan kategorinya tenaga kependidikan. Ada bab-bab seperti, tenaga *support* ya, tenaga *support*, tenaga kependidikan ini hampir tidak pernah, diperhatikan. Jadi ini menurut saya menjadi catatan yang penting untuk diselesaikan.

Kelima, saya melihat bahwa guru kelas, karena adanya guru kelas itu adanya di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, di guru kelas ini memiliki beban yang sangat tinggi. Sehingga ketika kemudian didekati dengan pendekatan apa, pendekatan bimbingan konseling itu akan lebih berat lagi. Karena guru kelas juga harus mengajar muatan lokal, kemudian juga mengajar sebagaimana sesungguhnya. Ketika kita bicara tentang pendidikan karakter, saya lebih meyakini bahwa semua harus terlibat dalam membangun pendidikan karakter *plus* kalau di satuan pendidikan sekolah dasar diperlukan guru bimbingan konseling tersendiri. Jangan dibebankan kepada wali kelas. *Tapi* semua guru harus konsentrasi pada pendidikan karakter

Yang keenam, sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa teman. Kita perlu mendudukan secara pasti pembangunan sarana prasarana itu jangan lagi di Kementerian Pekerjaan Umum. Diletakkannya di mana? Karena gambarannya begini Pak Menteri, periode lalu itu semua diletakkan di Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal di akhir periode 2014 2019 ada Panja tentang Sarana Prasarana Pendidikan sudah menyebutkan, hitungan kami ada 1,3 juta ruang kelas rusak. *Tapi* karena dipindahkan, kita tidak bisa memantau sebenarnya ruang kelas rusak itu *udah* diselesaikan atau belum. Karena ternyata pola di Kementerian PU adalah membuat sekolah baru, unit sekolah baru. Dengan unit sekolah baru berarti kan yang, yang harusnya, direnov *nggak* bisa *gitu*. Nah, itu jadi persoalan.

Mohon nanti di, dibincangkan *gitu*, dibincangkan secara jelas di, di pemerintah, apakah nanti mungkin dengan presiden atau dengan Kementerian PU bahwa ini akan ditarik ke Dikdasmen dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensi artinya, berarti inspektorat jenderal-nya harus sangat kuat. Karena potensial *fraud*-nya juga memang cukup besar kalau tidak diawasi dengan baik.

Kemudian berikutnya tentang pembiayaan pendidikan. Teman-teman tadi menyampaikan tentang PIP, KIP Kuliah itu kan bagiannya pembiayaan pendidikan. Saya, saya sebetulnya sangat khawatir dengan pemecahan kementerian ini. Nanti ini, karena sebelumnya itu terpusat pembiayaan pendidikan nya, baik untuk dasar maupun untuk pendidikan tinggi, sekarang ditaruh di mana? Tadi kan sudah disampaikan programnya bagus *tapi* siapa yang akan mengelola? Ini menjadi catatan penting buat kita semua.

Kemudian yang kedelapan, standar penguasaan literasi baca. Pak Menteri, kita perlu segera menetapkan, berapa sesungguhnya kosakata yang harusnya di, kosakata Bahasa Indonesia yang dikuasai pada usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Supaya nanti kita bisa mengejar keseluruhannya.

Kemudian amanat Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, seharusnya di setiap Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten ada unit layanan disabilitas bidang pendidikan. Karena ada banyak sekolah selain SLB juga yang apa, sekolah-sekolah inklusi.

Pada Prof. Satrio, catatan saya pertama, kementerian ini sudah bolak-balik, pisah gabung, pisah gabung. Kalau cerai *udah* tiga kali tuh talak tiga *udah* ya, *nggak* boleh balik lagi *gitu*. *Tapi* ini 2014 karena saya juga apa, mendampingi dan ikut membahas Undang-Undang tentang Sistem Nasional IPTEK. Ini kan dipisah, Diktiristek. Terus kemudian jadi gabung, sekarang dipisah lagi.

Yang paling saya takutkan adalah justru bagaimana memastikan ketika gabung pisah, gabung pisah ini tidak ada penerima layanan pendidikan tinggi maupun birokrat yang dirugikan. Begitu gabung pisah, gabung pisah kan ini Eselon I turun, pindah lagi *gitu* kan, tugasnya apa? Terus kemudian juga tadi PD Dikti-nya yang disebutkan oleh Mas Kadafi berkaitan dengan KIP Kuliah itu kan basisnya adalah PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Ini nanti siapa yang ngurus *gitu*? Terus bagaimana? Dan banyak hal lagi yang nanti harusnya tidak tertunda.

Yang kedua, amanat Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK itu mengamanatkan pembuatan rencana induk pengembangan IPTEK yang seharusnya jadi acuan pembentukan RPJPN. Kita *udah* punya, kemarin *udah* diketok RPJPN-nya. *Tapi* ngga punya rencana induk pengembangan IPTEK. Nah, itu sebenarnya PR. Saya pikir ini kesempatan untuk, karena saya tidak tahu persis ya apakah riset yang dimaksudkan di sini saintek ini hanya untuk pendidikan tinggi atau pasca pendidikan tinggi juga *gitu*, yang, yang kami belum tahu. Karena kan ada BRIN juga kan. Ini akan seperti apa? Kemudian pembagian tugasnya bagaimana *gitu* dengan BRIN? Pembiayaan.

Nah, yang di amanat Undang-Undang 11 2019 itu kan ada dana abadi riset. Nanti juga barangkali perlu didiskusikan dengan Kementerian Keuangan bahwa peluang untuk, memajukan riset di pendidikan tinggi ini harusnya bisa menggunakan dana abadi riset ini *gitu*. Dan persoalannya adalah riset itu

seringkali harus *multi years*, tahun, dengan tahun jamak sementara APBN kita tidak mengharuskan itu.

Kemudian juga tahun ajaran dengan tahun anggaran tidak sama. Tahun ajarannya mulai Juli Agustus sementara tahun anggaran mulai Januari. Ini juga agak rumit. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan formulasinya yang lebih baik.

Sama juga ada amanat Undang-Undang 8 2016 tentang Unit Layanan Disabilitas di Kampus. Karena banyak sekali penyandang disabilitas yang harusnya sih sebenarnya bisa kuliah, tetapi karena tidak ada unit layanan disabilitas di kampus sehingga akhirnya mencari polanya agak sulit. Dan kebersambungan antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi. Nah, kita banyak belum ketemu *nih* di antara ini.

Terakhir pada Mas Fadli Zon, Menteri Kebudayaan. Mas, saya *nih* bolak-balik, bolak-balik selalu mengingatkan bahwa museum dan cagar budaya itu harus jadi pusat sumber belajar. Kan apalagi yang lalu kan berada dalam satu kementerian yang sama, pendidikan ya. Maksud saya *gini*, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di museum, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di cagar budaya. Bagaimana caranya supaya anak tuh senang ke museum dan kemudian bisa belajar di sana dan tidak takut *gitu* masuk museum. Nah, mungkin itu yang menurut saya perlu.

Yang berikutnya, karena budaya, budaya kita banyak yang sudah mulai dilupakan. Maestro masuk sekolah itu menjadi bagian yang penting menurut saya untuk kemudian ditumbuhkan. Kita juga punya, yang lalu kami ke Museum Semedo di Tegal yang ternyata sejarahnya lebih panjang, lebih lama daripada yang di Singosari. Jadi bab-bab beginian kan pelajaran besar. Dan museum-museum yang di, ada di daerah secara umum mereka hanya melepas begitu saja tidak menjadikan itu sebagai satu pusat sumber belajar.

Terakhir, karena tadi ada banyak yang di, di, apa, diangkat tentang *pop culture*, musik, film dan lain sebagainya. Saya menyarankan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, karena sebetulnya sudah ada rencana induk ekonomi kreatif yang menjadi payung adalah Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Supaya nanti bisa bersambung dan bisa mengembangkannya secara baik bersama-sama.

Demikian Pimpinan yang disampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Teh Ledia.

Dan sekarang kita beralih ke sebelah kanan dari Fraksi Partai Amanat Nasional kepada Ibu Dr. Hj. Dewi Coryati, M.Si., sebagai Kapoksi, Kami persilakan.

F-PAN (Dr. drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Baik, terima kasih Saudaraku Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Saudaraku Prof. Abdul Mu'ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Dan juga Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, M.Sc., Ph.D.,
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi beserta seluruh jajarannya,
Serta Saudaraku Dr. Fadli Zon, M.Sc., Menteri Kebudayaan.**

Sama tadi seperti Saudaraku, Ratih katakan sangat senang Saudaraku berada di sini, demikian pula saya. Karena beliau ini adalah Ketua kami yang paling keren, *cie*, kayaknya begitu.

Saudaraku yang berbahagia.

Sebelumnya, tentu kami ingin mengenalkan Fraksi Partai Amanat Nasional yang berada di Komisi X dan dengan kami mohon kesediaannya untuk berdiri, Saudaraku Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. dari Sulawesi Selatan III dan beliau ini adalah seperti yang lain, *eh* maksudnya yang lain yang ini, di samping saya, mantan kepala daerah dua periode sehingga sangat memahami tentang pendidikan dasar.

Yang kedua, ini yang paling keren di sini, mungkin pesaingnya adalah Saudaraku Fadli Zon, Saudaraku Verrell Bramasta, ya benar kan? Ya Jawa Barat VII dan juga sebagai di BKSAP. Dan Saudaraku Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., M.H., Jawa Barat XI, beliau sangat fokus untuk memperhatikan tentang pendidikan pesantren dan pendidikan yang difokuskan kepada keagamaan.

Saudaraku yang berbahagia.

Izinkan saya, tidak mewakili Anggota saya karena masing-masing sudah siap untuk menanyakan hal-hal yang penting. Nampaknya juga Verrel sudah dua bulan belajar, malah sudah pergi melakukan studi terlebih dahulu.

Saya ingin memulai dari pendidikan dasar. Saudaraku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya sangat berbahagia Saudaraku menjadi menteri karena *track record*-nya, riwayat pendidikannya semua sudah mumpuni. Sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di desa, oleh para murid-murid, para siswa, dan juga para guru. Karena itu, kebijakan beliau tentunya nantinya berlandaskan kepada apa yang sudah dialami dan ber, berfokus pada apa yang harus dicapai. Dan kebijakannya tentu tidak awang-awang dan mendasar dan sangat dibutuhkan.

Nah, dalam paparan Saudaraku juga disampaikan untuk mewujudkan bangsa cerdas, maju, diperlukan dua poin utama, yaitu menyediakan pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah maksudnya saya ingin bahas ini adalah pendidikan untuk semua.

Kita bisa melihat contoh misalnya di Dapil Bengkulu, kalau pendidikan untuk semua itu berarti harus tersedia, satu prasaranaannya dan yang kedua kurikulum yang cocok untuk berada di daerah-daerah yang terjauh. Kalau itu bagian Bu Anita, saya *nggak* mau ngambil ini poin terjauh 3T ini biar nanti Bu Anita. Adalah yang di pedalaman-pedalaman yang ini misalnya sinyalnya kurang dan sebagai dan sebagainya. Nah, karena itu kalau pendidikan untuk semua maka saya berharap Saudaraku nanti bisa memberikan satu kebijakan bahwa beasiswa PIP itu harus diperbanyak dan volumenya diperbesar.

Karena dengan PIP ini kita di Komisi X ini bisa melihat bahwa pendidikannya memang jadi bisa untuk semua. Pemerataan sampai ke ujung dan dirasakan. Dan terutama karena yang mengantarkan PIP itu, sebagian besar adalah dari Anggota Komisi X yang punya daerah pemilihan dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Nah, karena itu Saudaraku mohon kiranya PIP ini nantinya kedepan bisa lebih diperbanyak dan volumenya diperbesar.

Dan yang kedua mungkin juga perlu dipikirkan ternyata kalau PNS itu yang golongan paling dasar itu masih juga membutuhkan bantuan untuk anak-anaknya bisa sekolah.

Dan Saudaraku, yang kedua adalah sama dengan yang lainnya. Kami sangat merasakan kalau infrastruktur itu tidak berada di Komisi X, kita yang bisa merasakan bagaimana ruang sekolah itu banyak yang rusak sehingga anak-anak tidak bisa belajar dengan baik.

Saya mau ambil contoh Saudaraku, Profesor. Di Bengkulu ada namanya Daerah Lebong yaitu penghasil emas untuk Monas itu, itu sebagian besar dari Lebong. Di sana ada sekolah Muhammadiyah di ujung tanjong, di mana sekolahnya sangat rusak *tapi* anak-anaknya sangat bersemangat. Guru PNS-nya hanya satu dan bayarnya itu hanya dengan satu kaleng beras kalau panen. Kalau tidak panen, *nggak* bayar. Dan dengan kita waktu itu masih boleh

memperjuangkan ruang kelas baru, maka saya bisa merekomendasikan untuk dibangun kelas baru sehingga mereka bisa sekolah.

Nah, jadi kebutuhan kita di sini untuk bisa memastikan infrastruktur itu terbangun dengan baik itu memang sangat diperlukan dan harus orang yang memang pergi dari daerah ke daerah dan melihat kenyataannya. Mungkin kalau komisi, berada di Komisi V, itu mereka terlalu banyak memikirkan jembatan dan yang lainnya, sehingga yang sekolah-sekolah kecil yang receh-receh ini *nggak* terlihat Saudaraku. Mohon kiranya perjuangkan untuk bisa pulangkan kembali ke daerah Komisi X, *gitu* kira-kira. Nah, kata teman saya yang di samping ke wilayah dan kedaulatan Komisi X dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan pendidikan untuk semua bisa kita capai.

Saudaraku yang berbahagia.

Juga saya ingin menyampaikan bahwa dari pengalaman kami periode yang lalu bahwa pendidikan untuk pendidik dan tendik yang kompeten dan sejahtera itu bahwa ternyata guru-guru itu kalau kurikulumnya baru tidak ada sosialisasi sampai ke daerah. Kalau kami mengundang guru-guru dari daerah, misalnya Merdeka Belajar episode sekian *gitu* atau apalah programnya yang kemarin itu, ternyata guru yang di daerah di ujung itu tidak memahami. Jadi kalau sekiranya nanti akan ada program yang atau kurikulum yang berubah atau menguatkan kurikulum yang ada sekarang, perlu diperbanyak pelatihan dan bimtek bagi para guru sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang benar.

Dan saya juga berharap kelanjutan pengangkatan guru honorer melalui program P3K terus kita perjuangkan hingga tuntas dan saya harap ini masuk ke dalam program prioritas kita bersama.

Saudaraku yang berbahagia.

Saya ingin masuk ke poin dengan Kemendik, Kemendikristek RI, ya. Saudaraku, peningkatan akses pendidikan tentu perlu kita tempatkan di poin pertama dalam program prioritas. Beasiswa seperti KIP, ADik, beasiswa unggulan dan bantuan pendidikan lainnya ini adalah menjadi harapan bagi para siswa kita di tengah pelemahnya ekonomi. Dan Saudaraku, pada tahun 2024 ini target menerima KIP mencapai 200.000 sehingga saya merasa ini perlu kita tingkatkan mengingat manfaatnya dan dampak baik dari program ini. Kita bisa menyampaikan ini karena kami mengawal KIP-KIP yang kami berikan yang kita rekomendasikan untuk bisa diterima di daerah-daerah pemilihan kita seperti misalnya di Bengkulu.

Saudaraku, kalau perguruan tinggi negeri sudah selesai lah, *tapi* masalahnya perguruan tinggi negeri ini tidak, tempatnya tidak mencukupi untuk anak-anak yang mau kuliah, maka perlu dibantu oleh PTS. Sayangnya, PTS kita ini kadangkala kalau lagi dibutuhkan *nggak* pernah, di, mau. Maaf, maksud saya PTS ini kurang mendapat perhatian yang baik. Tidak ada subsidi untuk mereka yang bisa membuat mereka bertahan.

Saudaraku Menteri, sekarang saya mau ngambil contoh Dapil Bengkulu saja. Di Dapil Bengkulu itu ada nama daerah Rejang Lebong, Rejang Lebong itu tiga jam dari Bengkulu. Perlu ada PTS di sana karena untuk menyerap mahasiswa yang dari daerah sekitarnya jadi *nggak* perlu ke Bengkulu. *Cuman* sayangnya, itu ada, adanya PTS, tidak ada PTN. Sehingga yang seperti itu ke depannya mohon adanya perhatian khusus dari Saudaraku Menteri.

Dan juga kita mohon juga bahwa DUDI ya, program DUDI itu kalau PTN selesai. Nah, seperti tadi kalau PTS ini perlu bantuan khusus supaya anak-anak yang sudah mendapatkan KIP Kuliah, sudah bisa kuliah, terpikirkan bagaimana nantinya mereka bisa mandiri, bisa bekerja syukur-syukur, kadang-kadang, mudah-mudahan ada juga yang bisa melanjutkan sampai profesor seperti Saudaraku, ya.

Nah, ini yang kami harapkan sekali supaya nanti PTS kita mendapatkan perhatian dan mereka akan bisa membantu PTN-PTN yang kemampuan penyerapannya sangat sedikit dan kita tidak menelantarkan anak-anak yang sangat ingin kuliah.

Dan yang terakhir saudaraku yang berbahagia, minta izin karena ini penting menurut saya. Ini ada kementerian baru yang namanya Kebudayaan. Dan saya berbahagia orang yang tepat ditaruh menjadi menterinya karena Saudaraku, Dr. H. Fadli Zon ini memang sangat paham soal budaya. Bagaimana beliau bisa mengkomunikasikan budaya itu sehingga menjadi diplomasi budaya yang bernarasi yang sangat baik dan juga menjadi satu pemikat untuk ke Indonesia.

Dan yang saya ingin tekankan di sini soal museum. Persis seperti Saudaraku Ledia, mungkin karena kami sering sekamar kayaknya. Jadi museum kita itu perlu diberdayakan. Diberdayakan sehingga nanti mungkin ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa ada kewajiban dari para siswa untuk berkunjung ke museum. *Tapi* kalau sudah di, diberikan kewajiban ya museumnya juga ya harus oke lah ya, keren dan memberikan pendidikan. Sehingga waktu mereka pertama kali pergi ke museum dan dalam persepsi mereka datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kalau mau mencari apapun tentang budaya, pergi saja ke museum.

Demikian Pimpinan, terima kasih banyak atas budi baiknya memberikan waktu yang luang semoga Allah meridainya. *Aamiin ya robbal alamin.*

*Billahi taufiq wal hidayah,
Fastabiqul khairat,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Untuk Saudariku Dewi Coryati.

Dan dari Fraksi Partai Demokrat yang tak kalah viral dari Professor Wamen, Ibu Anita Jacoba Jah, Jacoba Gah.

Silakan Ibu Anita, ada tiga Anggotanya yang mungkin perlu diperkenalkan *dulu*.

F-P. DEMOKRAT (ANITA JACOBA GAH):

Baik terima kasih Ibu Pimpinan.

**Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang saya hormati,
Bapak-Bapak Menteri dan Bapak/Ibu Menteri yang saya hormati yang
hadir saat ini**

Perkenalkan nama saya Anita Jacoba Gah. Saya dari Fraksi Partai Demokrat mewakili Daerah Nusa Tenggara Timur, daerah 3T Pak. Nah, dicatat itu Pak 3T.

Kami di Komisi X ini saya tidak sendiri *tapi* saya didampingi oleh dua saudara saya juga, ada pak Bramantyo Suwondo, Mas Bram?

F-P. DEMOKRAT (BRAMANTYO SUWONDO, M.IR.):

Assalamualaikum.

F-P. DEMOKRAT (ANITA JACOBA GAH):

Dapilnya Mas Bram, Dapilnya? Dapilnya?

F-P. DEMOKRAT (BRAMANTYO SUWONDO, M.IR.):

Salam kenal Bapak/Ibu semua. Nama saya Bramantyo Suwondo, Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Jawa Tengah VI.

F-P. DEMOKRAT (ANITA JACOBA GAH):

Baik, terima kasih.

Yang kedua ada Bapak Sabam Sinaga. Bapak silakan, dapilnya Pak.

F-P. DEMOKRAT (Drs. SABAM SINAGA, M.M.):

Terima kasih Bu Anita.

Perkenalkan saya Sabam Sinaga dari Fraksi Demokrat, Dapil Sumatera Utara II, 19 kabupaten/kota.

Terima kasih.

F-P. DEMOKRAT (ANITA JACOBA GAH):

Banyak ya.

Horas!

Baik.

Ibu Pimpinan dan Bapak, Bapak Menteri, kami dari Fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru dan ada terobosan-terobosan baru apalagi untuk kami di daerah 3T. Supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar, dan terbelakang tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T.

Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, bentar Pak, selalu saya salah sebut *nih*. Ya, Bapak Menteri Men, Men, Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks.

Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu, kenapa Komisi X meminta kalau bisa pembangunan sekolah sarana prasarana sekolah itu diberikan ditarik kembali dari PUPR diberikan kepada kembali kepada Komisi X, karena kami lah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, *tapi* isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali. Apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu.

Saya berharap dengan pemerintahan yang baru dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang. Mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru.

Yang kemudian saya juga memohon semoga dengan pendidikan yang bermutu ini Pak kalau kita melihat masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD saya bicara soal angka putus sekolah Pak. Untuk anak yang tidak sekolah, itu datanya ada masih dari 23 juta siswa untuk SD saja itu masih ada 0,67% ya ada 160.368 siswa yang, yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah. Kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah data terakhir BPS itu 2015 memang ada 58.000.

Nah, untuk SMP masih ada 6,93% atau 698.000 siswa yang tidak sekolah dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi Pak masih ada 21,61% artinya dari lima juta siswa SMA masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah, masih ada lagi yang putus sekolah. Ini lah sebetulnya kegagalan sebetulnya yang kita melihat bahwa pemerintah mengatakan kita semua selalu mengatakan bahwa pembukaan undang-undang memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan Pasal 31 ayat (1), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat, Pasal 31 ayat (2), ayat (3), meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak putus, anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah? Ini lah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini. Ya menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin. Dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul, tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Pak sekali lagi, saya mohon perhatikan anak, angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini.

Yang berikut Pak, saya juga mau, sangat setuju dengan Asta Cita Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya karena memang semua program baik, semua anggaran kita setuju *tapi* yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang di, selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat. Contoh saya sudah katakan tadi salah satunya sarana prasarana.

Kemudian kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat apa pemerintah daerah, *tapi* kayaknya pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan tolong juga pengawasannya ditingkatkan Pak ya. Apapun yang Bapak, Bapak putuskan di tingkat pusat tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas. Karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini.

Kemudian saya juga mohon Pak ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa. Mereka walaupun di pedalaman, *tapi* mereka mau

mengajar. Melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus-ratus kilo lewat sungai apa, lembah yang cukup curam tetapi mereka menjalan.

Maksud saya adalah tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. *Tapi* yang di pedalaman *musti* naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa, kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. *Musti* tunggu kalau musim banjir, mereka *musti* tunggu *dulu*. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir.

Maksud saya, saya beri pemohon, penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau lakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi *reward* atau apa Pak, mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan *tapi* di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu Pak.

Kemudian saya juga minta kita masih tetap *musti* memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak, mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama. Tetapi ketika mau bicara soal P3K, mereka tetap dibedakan. Tahunya, ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348 poin 5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri maka ketika mereka lulus mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta? Yang awalnya mereka mengajar di situ *tapi* mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta.

Mohon Pak Menteri, Bapak-Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri, apakah ada pasal-pasal atau keputusan menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru, maupun sarana prasarana pendidikan.

Kemudian saya juga mohon Pak, semoga pendidikan untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua ini terutama layanan pendidikan inklusif. Bapak/Ibu, di pedalaman banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah Pak karena orang tuanya takut anaknya diperkosa di tengah jalan. Terlalu jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka. Akhirnya orang tua siapa yang mau melepaskan anaknya kalau pergi sekolah ternyata diperkosa di jalan.

Nah, ini menjadi, harus menjadi perhatian kita semua. Karena bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun mereka di pedalaman *tapi* mereka punya hak yang sama karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi saya mohon Bapak Menteri yang baru betul-betul memperhatikan, baik guru maupun siswa-siswa, anak-

anak yang ada di daerah-daerah pedalaman Pak, karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengancam pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini.

Kemudian untuk terakhir sekali lagi Bapak/Ibu mohon juga untuk, saya senang mendengar berita bahwa akan kembali ke ujian nasional. Ya betul sekali kata Saudara saya tadi mengatakan ini jangan terburu-buru tetapi saya yakin pasti Pak Menteri bisa memberikan keputusan yang terbaik. Karena memang kenyataannya sekarang banyak anak SMP SMA lulus tetapi tidak tahu membaca, literasinya jelek sekali. Nah, ternyata saya tanya, kenapa ya kok anak-anak tidak pintar *tapi* lulus? Ternyata katanya, kalau saya *nggak* salah ya, saya *nggak* tahu *nih* ada Bu Sekjen, katanya kemarin itu diharuskan wajib lulus. Apakah itu benar?

Kalau menurut guru-guru, wajib lulus. Jadi pintar, tidak pintar wajib lulus. Pantasan suruh baca, *nggak* bisa baca. Nah, ini menjadi persoalan penting Pak. Hati-hati karena bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik agar kualitas pendidikan anak-anak kita khususnya di literasi, numerasi, dan sains teknologi itu benar-benar menjadi fokus kita bersama. Jadi walaupun mereka lulus mereka betul-betul pintar dan cerdas bukan hanya sekedar lulus.

Masih banyak lagi Pak Menteri mengenai banyak sekali ada permintaan juga dari guru-guru untuk PMM yang kemarin diadakan kalau bisa ditiadakan. *Tapi* masih ya kita serahkan semua kepada Pak Menteri yang baik saja bagaimana, yang penting jangan menyusahkan guru-guru dengan program-program yang harus menggunakan data dan lain sebagai macam. Akhirnya mereka kehilangan jam mengajar hanya melelahkan para guru dan akhirnya tidak maksimal program ini. Merdeka Belajar, baik *tapi* mari kita kalau bisa kita lihat lagi Pak apakah ini perlu dilanjutkan atau apa kita ganti dengan yang model lain *tapi* harus tetap tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk pendidikan tinggi ya kita berharap semoga nanti diharapkan kementerian bisa membuat *roadmap* mengenai arah riset dan inovasi perguruan tinggi kita Pak, agar riset dan teknologi kita selaras dengan kebutuhan industri kita serta berjalan dengan arah pemerintahan kita saat ini.

Terima kasih Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Terima kasih Bu Anita.

Sebelum kita lanjutkan, saya harus memperpanjang waktu mungkin sekarang 30 menit. Dan saya ingin memberikan kesempatan *dulu* kepada meja Pimpinan, mudah-mudahan bisa tiga menit satu orangnya. Walaupun terus terang ini Prof. dan juga Bang Fadli Zon, kami sudah mendapatkan banyak sekali surat-surat masukan aspirasi, permintaan audiensi, RDPU, dan lain-lain. Baik itu dari para mahasiswa yang ingin mungkin minta kita menyampaikan *gitu*

ya soal peluang karir, soal kampus yang aman dari intimidasi, soal tantangan-tantangan lain di dunia pendidikan tinggi, juga dari teman-teman pekerja kampus, dosen-dosen, juga tenaga kependidikan, kemudian juga ada permintaan dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang intinya tentunya ingin ada *support* lebih dalam hal pendanaan regulasi maupun perizinan.

Nanti kami akan meminta sebagian *nih* dari Pimpinan untuk menyampaikannya secara singkat saja termasuk juga dari berbagai lembaga masyarakat, lembaga kursus, pelatihan, organisasi-organisasi ini untuk Prof. Mu'ti *gitu* ya, dengan harapan pendidikan non-formal, informal, termasuk pendidikan ke-orangtua-an, itu juga harus terus mendapat dukungan dalam program ke depannya.

Dan juga terakhir kemarin kami mendapatkan kesempatan beraudiensi dengan lembaga-lembaga vokasi, termasuk Politeknik yang mungkin khawatir juga ini kira-kira ke depan bagaimana dengan organisasi yang baru, termasuk Akademi Komunitas Negeri dan tentunya nanti sumber daya manusia di dalamnya juga.

Mungkin kami beri kesempatan sebelum Bu Esti kepada Pak...

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Nanti baru...

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Izin.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Ronde kedua.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Izin, Ibu Pimpinan.

Tadi saya sengaja tidak menanyakan tentang masalah kebudayaan, karena saya mau nyedi, mau menyerahkan...

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Kepada...

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Siap, siap.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Pak Triyana untuk...

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Pasti, pasti, pasti.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Sejarawan dia.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SOFYAN TAN):

Makasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Tapi saya ingin memberi *dulu* kesempatan kepada, kita masih punya waktu. Saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang nanti belum *gitu* di dalam ronde kedua.

Jadi siap-siap nanti mungkin dari Fraksi PDIP dan selanjutnya. Masih ada waktu, siap.

Silakan Pak Mahfudz mungkin singkat-singkat saja.

F-PKS (MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. Sos.):

Ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Ibu Ketua.

**Yang saya hormati teman-teman Komisi X,
Yang saya hormati para Menteri beserta Wakil dan jajarannya.
Bapak/Ibu sekalian.**

Ya kita cukup bangga dan bersenang hati, tiga menteri ini adalah orang yang cukup mumpuni dalam bidangnya ya. Maka saya optimis dan insyaAllah dalam mengelola kementerian-nya akan menjawab harapan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Yang pertama untuk Mendikdasmen. Itu Asta Cita Kabinet Merah Putih adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Mendikdasmen untuk mewujudkan Asta Cita tersebut dalam ranah pendidikan dasar dan menengah?

Yang berikutnya, pada *slide* keempat disebutkan bahwa program prioritas Kemendikdasmen adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, di antaranya adalah pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Mohon bisa dijelaskan Pak Menteri konsep dari sekolah unggul itu bagaimana bentuknya.

Kemudian yang berikutnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Pertama, kebijakan pendidikan tinggi pada saat ini memiliki paradigma baru, antara lain pembelajaran yang mentransformasi dan membuat peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis. Bagaimana batasan-batasan dari berpikir kritis ini? Apakah setiap orang kemudian berhak menyampaikan gagasan kritisnya di berbagai media ataukah bagaimana?

Yang kedua, kemarin sore kami menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Kampus yang mengeluhkan rendahnya kesejahteraan dosen di tengah tingginya tuntutan dan beban kerja mereka. Rata-rata dosen hanya mendapatkan gaji pokok di bawah tiga juta rupiah. Bagaimana kiranya langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikti untuk mengatasi permasalahan ini?

Yang ketiga, bagaimana Kemendikti menghadapi permasalahan ketimpangan akses pendidikan tinggi dan ketimpangan dalam hal kualitas serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi?

Yang terakhir, buat Kementerian Kebudayaan, Pak Fadli Zon, sahabat saya. Saya sepakat ketika Anda *declare* bahwa Indonesia akan menjadi ibu kota kebudayaan dunia karena memang nilai-nilai budaya dan kebudayaan di Indonesia ini sangat, amat sangat banyak aneka ragamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Kementerian Kebudayaan menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat yang membawa dampak signifikan terhadap budaya lokal di Indonesia?

Yang kedua, masalah dalam kebudayaan antara lain adalah kurangnya regenerasi. Budaya lahir sejak beratus-ratus tahun yang lalu sehingga diperlukan regenerasi tiap generasi. Seiring berkembangnya zaman membuat budaya kurang diminati oleh para kaum muda. Bagaimana Saudara Menteri menanggapi hal ini?

Jadi saya pikir perlu ada rekayasa eksistensi kebudayaan dan nilai budaya yang ramah bagi anak muda dan kaum milenial ya. Jadi soal *packaging*-nya, seperti ini Pak Menteri, kayak *stand-up comedy*. Sebenarnya ini budaya Betawi yang dimodernisir. Jadi orang-orang Betawi itu dengan budaya candanya itu biasa dia, ada lenong dan sebagainya. Jadi *stand-up comedy* itu juga asalnya itu kalau di Betawi sudah sejak turun temurun itu dilakukan dalam keseharian.

Kemudian yang seperti lagu-lagu daerah yang dipakai buat senam kan. Ini juga bagian bagaimana pendayagunaan dari nilai budaya baik musik, tari, dan sebagainya itu menjadi satu produk kebudayaan yang bisa kemudian dikonsumsi, diakui, dan dinikmati oleh bangsa kita dan bahkan lebih dari itu juga diakui di dunia internasional.

Terima kasih Bu Ketua, ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Lanjut kepada Ibu Esti.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Terima kasih Bu Ketua.

Bapak Menteri Dikdasmen RI, Diktisaintek RI, berikut juga Menteri Kebudayaan yang saya hormati.

Izinkan saya My Esti Wijayati, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sangat ringan karena itu sudah biasa kita dengarkan dan kita sampaikan. Tetapi secara faktual itu belum bisa kita lakukan.

Yang selalu mendasari pada langkah perjuangan kita mengabdikan kepada bangsa dan negara adalah konstitusi dan, dan undang-undang. Kita akan berpijak kepada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saya pertegas bunyinya, supaya kita ingat apa yang harus kita lakukan.

Di Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Kemudian ayat (4), negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Dilanjutkan pada Pasal 49, Nomor, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini juga sangat prinsip, kalau sekiranya kita tidak mampu melaksanakan, ya mari regulasi ini harus kita rubah. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN, selain gaji pendidik. Itu ada di Undang-Undang Sisdiknas kita.

Kemudian juga di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 80 tentang Pendanaan Pendidikan, anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APBD, APBN setiap tahun sekurang-kurangnya 20%. Lalu ini kembali berulang karena memang itu perintah konstitusi yang harus kita taati.

Yang ketiga ayat ke-3, menteri-menteri menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan.

Saya menyampaikan ini di awal pernyataan saya untuk bertemu dengan Bapak Menteri, karena berdasarkan data-data yang kita miliki terkait dengan alokasi anggaran maupun tadi yang disampaikan oleh kawan saya dari Demokrat, Ibu Anita. Baru saja kemarin kami juga menerima data, data yang diambil dari Pusat Data Kemendikbud bulan Agustus tahun 2024. Lebih rinci lagi, anak usia tujuh sampai 12 tahun belum pernah, sekolah, itu ada 676.851, 676.851. Belum lagi rincian yang totalnya kemudian sampai dengan SMA ada empat juta karena putus sekolah, tidak punya biaya, bekerja mencari nafkah, menikah muda, korban kekerasan, ijazah ditahan sekolah sehingga *nggak* bisa melanjutkan, jarak sekolah jauh, disabilitas, dan lainnya, itu mencapai angka 4,6 juta.

Sekarang kita bertumpu pada pendidikan dasar. Ketika kita mengatakan pendidikan dasar seharusnya SD, baik negeri maupun swasta itu tidak ditarik bayaran sedikitpun. Tetapi faktanya, kita bisa melihat negeri walaupun sudah tidak ditarik, *tapi* masih ada banyak iuran. Swasta apalagi, tidak mungkin hidup tanpa iuran, karena harus menggaji guru dan yang lainnya.

Maka saya sebenarnya menginginkan Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang saya hormati dan saya banggakan karena *dulu* juga Sekretaris Majelis Dikdasmen di Muhammadiyah. *Dulu* ngurusi Muhammadiyah sekarang ngurusi seluruh Indonesia. Yang sudah dilakukan di Muhammadiyah dan menjadi baik mari kita lakukan juga untuk seluruh Indonesia.

Berikutnya, ketika saya menyampaikan itu dengan angka yang sedemikian rupa, termasuk ketaatan kita kepada konstitusi. Harapan kami gebrakan utama kita adalah sungguh, mari kita berikan pendidikan gratis. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya, tidak peduli itu swasta atau negeri, harus gratis, Pak. Kalau kemudian ada sekolah swasta, kalau gratis kan berarti kami *nggak* bisa menarik.

Ya mari, kita tanya, kita kaji lebih dalam. Mana sekolah swasta yang tidak mau untuk diberikan secara keseluruhan anggaran dari pemerintah, *tapi* tidak boleh menarik. Mungkin itu ada berjenjang. Sepertinya di, di DKI sudah mulai *nih* ada *grade* A, B, C, D, E. Yang D, E ini kan *nggak* mau *nih* kalau gratis karena mereka dianggap sekolah favorit lalu menarik banyak.

Tetapi prinsip utamanya, saya sungguh berharap gebrakan dan kita dukung ini Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, kita berikan kebijakan yang sungguh-sungguh sesuai konstitusi. Karena Pak Menteri tadi tidak memberikan Pasal 2-nya dilompati tadi Pak Menteri. Nah, saya curiga *nih*, kenapa Pasal 2-nya dilompati? Ah, di situ ada kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pembiayaan secara gratis bagi seluruh anak bangsa kita. Kalau kalau kita mau mengejar pendidikan kita tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang tidak sekolah yang SD. Maka itulah saatnya, mari kita benahi. Utamanya dari fondasi untuk memberikan pendidikan gratis di SD, baik negeri maupun swasta.

Yang berikutnya, jika tadi saya sampaikan, di Undang-Undang Sisdiknas dikatakan selain gaji. Mestinya itu 20% itu selain gaji pendidikan. Faktanya, hitungan 20% kita ini, yang tersebar di seluruh kementerian, itu sudah dipotong juga 20% itu di dalamnya termasuk gaji, baik Dikdasmen, Mendiktisaintek, dan yang lainnya, kementerian yang lainnya. Mari kita wujudkan itu. Kalau tidak bisa, kami sekarang sedang menelorkan harapan melalui Prolegnas Revisi Undang-Undang Sisdiknas.

Saya berharap ini juga ditangkap oleh Kementerian Pendidikan, baik Dikti maupun Dikdasmen juga Kementerian Agama karena di situ juga ada dunia pendidikan untuk merubah Undang-Undang Sisdiknas. Poinnya adalah bagaimana negara ini bisa mewujudkan tidak sekadar menyusun undang-undang *tapi* tidak dilaksanakan.

Dan kemudian catatannya Bapak, kalau kita ada kecamatan 228 kecamatan tanpa SMP, ada 681 kecamatan tanpa SMA. Bagaimana kita mampu mewujudkan pendidikan kita untuk semua, merata. Bahkan di Jogja juga ada tuh masih Kecamatan Berbah itu *ndak* punya, tingkatan. Berbah itu Prambanan, Pak Arif, ada di situ, masih kurang.

Berikutnya Bapak/Ibu, kami juga berharap matematika sejak dini. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak sulit. Saya ini anak bakul brambang, bawang, minyak waktu kecil. Saya menjadi agak cepat menghitung karena saya biasa menggayungi minyak. *Nek* segayung seratus, berarti kalau dua gayung dua ratus. Ternyata itu cepet. Sampai sekarang saya kalau disuruh ngitung duit cepet Pak, termasuk angka-angka ya.

Jadi sebenarnya itu sesuatu yang tidak susah. Maka pendidikan matematika sejak dini, ini bagian dari strategi kita untuk mengejar angka PISA kita Pak. Walaupun dua tahun terakhir ini sudah naik. Kita terima kasih kepada Pak Nadiem Makarim. Tetapi faktanya PISA kita walaupun sudah naik sedikit masih berada di garis bawah untuk literasi dan numerasi, juga untuk sains.

Kemudian selanjutnya, untuk Pendidikan Tinggi Saintek. Saya yang utama supaya Bapak tahu di atas sana Pak ada fraksi balkon. Hadir yang sudah sehari-hari saya sampai bingung ini harus menjelaskan bagaimana. Mereka adalah bagian dari BPI, harusnya, mendaftarkan BPI (Beasiswa Pendidikan Indonesia). Mereka sudah meninggalkan ketugasannya sebagai dosen sehingga sudah dipotong tuh pendapatannya. Keluarganya sudah ikut pindah. Harapannya *dulu* dibukanya sekian ribu untuk penerima BPI tetapi faktanya hanya sekitar 300-an, artinya banyak. Ini yang harus segera kita beri jawaban Pak.

Belum lagi di samping mereka juga ada yang tadi sudah disampaikan, gaji dosen Pak. Kita ngelus *dodo* mendengarkan Ibu, *tapi* beliau semangat waktu menyampaikan, Serikat Pekerja Kampus, dosen maupun tenaga kependidikannya. Apa kita akan diam? Tidak. Kita mesti membuat langkah bagaimana bisa menyelesaikan itu. Itu pesan utama yang mungkin selama ini agak jauh dari harapan yang bisa kita berikan.

Kemudian yang terakhir, Pak Menteri Kebudayaan, Bapak boleh tinggi cita-cita. Saya suka. Ada tadi target-targetnya. *Tapi* anggaran Bapak kecil lho, Pak. Cuma 1,8, *ndak, ndak*, tadi sudah ada. Pemajuan dan pelestarian, pelestarian bahasa dan kebudayaan 1, 8, pendidikan tinggi 37.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

2, 2.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Sudah naik, ya?

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

2025.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Oh, iya lumayan. *Tapi*, bapak tadi nganggarkan berapa? Kurang kan Pak? Iya.

Kita hanya menginginkan begini, ini nanti kan ada pemilahan anggaran dari Kementerian Pendidikan menjadi tiga, tiga Kementerian. Saya harus sampaikan secara regulasi, keputusan untuk memindahkan anggaran *split* dari kementerian ini menjadi tiga, ini harus persetujuan DPR Komisi X harus diajak bicara. Jangan sampai kemudian Bapak tiba-tiba sudah menerima atau kami diberikan, kami sudah pisahkan ini untuk Kebudayaan sekian, untuk Ristekdikti sekian, atau, masih agak ini Pak mulutnya, Diktisaintek sekian, Dikdasmen sekian. Kita tidak bisa seperti itu.

Dan yang terakhir, tanggung jawab 20% pendidikan, anggaran pendidikan mohon kami tidak pernah, memperoleh data secara pasti. Bapak Kementerian Bapak, Pak Mu'ti, minta tolong 20% itu sebenarnya seperti apa rinciannya? Dan saya mendorong Bapak untuk menuntut anggaran lebih banyak bagi di Dikdasmen, Mendiktisaintek maupun Kementerian Kebudayaan. Karena ini berkaitan dengan anggaran pendidikan. Mengapa harus saya mengatakan menuntut lebih banyak? Faktanya kita belum melaksanakan apa yang menjadi ketentuan di dalam konstitusi negara kita yang sebenarnya kita harus pegang teguh sebagai bangsa Indonesia.

Demikian Ibu, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Merdeka!

Selanjutnya dari sebelah kanan saya Bapak H. Lalu Hadrian, dilanjutkan Ibu Himmatul Aliyah.

F-PKB (H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.):

Terima kasih Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi X DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati. Yang saya hormati, saya banggakan para Menteri, Menteri Dikdasmen, Menteri Diktisaintek dan Menteri Kebudayaan beserta seluruh wamen dan seluruh jajaran yang hadir.

Saya singkat saja tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman anggota maupun pimpinan. Dan semua yang disampaikan itu adalah merupakan problem-problem, kemudian persoalan-persoalan yang hari ini telah banyak disampaikan oleh masyarakat kita, baik melalui media, kemudian bersurat ke kami dan melalui teman-teman anggota. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang ingin saya pertegas sekaligus mempertanyakan.

Pertama ke Pak Prof. Menteri Dikdasmen. Di beberapa kesempatan, Pak Menteri menyampaikan bahwa akan menaikkan gaji guru sebesar dua juta Pak. Nah, ketika Pak Menteri menyampaikan itu semua rebut, semua ribut. Ributnya ini, ribut senang, kemudian khawatir. Khawatirnya itu, nah, yang dua juta ini apakah diberikan ke seluruh guru kita yang ada hari ini, yang notabene berstatus PNS. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru kita yang di swasta, Pak? Nah, ini juga perlu menjadi kajian dan mohon di dalam forum ini Pak Mendikdasmen menjelaskan. Walaupun belum diumumkan secara resmi menjadi keputusan dan kebijakan dari Menteri Dikdasmen.

Nah, kemudian yang kedua melalui forum ini juga saya menyampaikan, mohon kiranya pengangkatan ASN dan P3K, khusus bagi guru-guru kita ini Pak. Kalau ternyata kendalanya adalah koordinasi antar kementerian, *monggo* Pak, kita akan bantu semaksimal mungkin. Kami Komisi X akan mem-*backup* Bapak-Bapak untuk berkomunikasi, menyelesaikan masalah ini. Kalau sekiranya kendalanya di anggaran untuk pengajian mereka Pak, kami di DPR ini kan Banggar-Banggar hebat-hebat Pak, orang-orang hebat. Sampaikan saja nanti kepada kami kira-kira apa yang menjadi kendala, sehingga apa namanya, pengangkatan guru ASN maupun P3K ini informasinya akan ditiadakan. Nah, itu yang kedua.

Kemudian untuk Mendiktisaintek, memang harus ada perbedaan, perbedaan tupoksi nanti terutama terkait dengan riset. Nah, sementara BRIN Pak sudah memiliki *job desk* sendiri. Nah, bagaimana nanti dengan Mendiktisaintek? Ini yang harus dijelaskan kembali kepada kami.

Nah, di beberapa kesempatan juga Prof. Wamen, Prof. Stella itu punya gagasan untuk meninjau kembali LPDP. Dana Abadi Pendidikan kita Prof. Stella ada 126,1 triliun. Nah, yang Prof. Stella maksudkan itu seperti apa LPDP ini? Tentu kita menginginkan di republik ini makin banyak Prof. Prof. Stella yang lain. Jadi Prof. Stella tidak hanya satu, yang kita inginkan itu makin banyak Prof. Prof. Stella yang lain.

Nah, mohon pada kesempatan ini dijelaskan kira-kira konsepnya seperti apa. Agar semakin banyak apa namanya, orang-orang Indonesia yang bisa sekolah di Harvard dan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri yang terkenal itu. Nah, mungkin bisa nanti disampaikan gagasannya di forum ini. Karena ketika Prof. Stella menyampaikan di publik, itu banyak juga yang menanyakan terkait dengan program yang ingin disampaikan itu.

Saya rasa itu Bu Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Silakan Bu Himma.

F-P. GERINDRA (Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ibu Ketua.

Yang saya hormati Ketua dan para Pimpinan Komisi X, teman-teman Komisi X,

Yang saya muliakan dan saya hormati para Profesor dari Mendikteksaintek, Mendiktisaintek Republik Indonesia, Profesor Satryo. Kemudian juga Profesor Mu'ti dari Mendikdasmen RI.

Dan ini abang saya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.

Ketua saya juga di BKSAP waktu itu bersama dengan Bu Dewi dan tadi siapa? Ratih ya. Betul memang Ketua yang paling keren, belum tergantikan ini. *Tapi* sekarang sebagai menteri ya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Dikdasmen, ada satu saya kayaknya belum melihat struktur ya yang diusulkan dari Dikdasmen. Sedangkan dari Kemendikristek ini sudah ada organisasi yang diusulkan.

Nah, untuk yang Dikdasmen, tadi yang formal dan informal yang disebutkan oleh Bu Esti itu, itu masuknya butuh perhatian yang sangat-sangat prioritas. Karena saya banyak mendapatkan pengaduan dari berbagai pendidikan formal maupun informal, non-formal maupun informal.

Terkait dengan tadi disampaikan bahwa di Pasal 31 ayat (3) amanat undang-undang mengenai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, ini ada isu guru agama ini menguat Pak mengenai khususnya antrian PPG. Mungkin perlu duduk bareng dengan Kementerian Agama karena contohnya saja di NTB, Bima aduan ada 140.000 guru agama Islam yang anti, yang antri sertifikasi. Sementara Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang Guru dan Dosen itu mewajibkan sertifikasi pendidikan. Dan ini juga kan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Karena memang di Kemenag sendiri terkendala anggaran yang mungkin perlu duduk bareng Pak. Karena ini pengaduan terus-menerus ada di media sosial saya dari guru agama.

Kemudian mengenai pembiayaan pendidikan di halaman tiga, mengenai pendidikan afirmasi. Mungkin ada perlu perbaikan ini Pak, dari peraturan dari Perme, dari Sekretariat Jenderal yang mengenai transfer transfer PIP. Nah, ini ada yang perlu dikaji diantaranya adalah Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Juklak Program Indonesia Pintar Dikdasmen agar pencairan beasiswa PIP lebih cepat dan praktis. Karena sekarang ini agak lama berbelit-belit. Kami yang terus-menerus ditanya. Kami yang lelah untuk menjawab ini.

Kemudian untuk yang tadi BIP sudah disampaikan ya bahwa terjadi masalah terkait penerimaan dari BIP sudah disampaikan oleh Bu Esti saya tidak akan mengulang. *Tapi* saya mendukung untuk terus ini diselesaikan dengan baik.

Mengenai pengembangan talenta unggul, Pusat Prestasi Nasional cukup membanggakan. Saya waktu, waktu itu diundang oleh Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbud ada talenta-talenta SMP dan SMA yang menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, terapannya juga baik. Nah, ini bagaimana mereka kelanjutan mereka selanjutnya agar talenta-talenta ini harus difasilitasi untuk mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Kemudian untuk kebiasaan anak Indonesia, tujuh kebiasaan anak Indonesia yang akan dirancang. Pak Johar Profesor yang kemarin selalu menanamkan bahwa di Jepang saja bab antri itu sampai empat bab *gitu* untuk anak TK. Nah, bagaimana di kita ini bagaimana pembiasaan-pembiasaan disiplin, antri khususnya itu juga bisa ditingkatkan di Indonesia.

Saya pernah, ketemu dengan OECD ya. Saya tanyakan kenapa Indonesia selalu turun peringkatnya begitu kan. Dia bilang tidak ada peringkat. Oke memang tidak ada peringkat *tapi* skor kita menurun *gitu* dari tahun ke tahun. Nah, mereka mengatakan, saya minta rekomendasi dari Anda apa? Lalu mereka mengatakan bahwa harus perbanyak *early education learning*. Saya katakan, di Indonesia PAUD tidak kurang-kurang, banyak *gitu*. Nah, berarti adalah fokus sasaran kita untuk pendidikan ini, betul saya setuju dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Mendikdasmen bahwa harus dimulai dari pendidikan usia dini. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan skor PISA kita.

Kemudian untuk Dikti, Profesor Satryo, nomor halaman empat tentang hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Kemarin dengan, RDPU dengan ITB mengeluhkan bahwa prototipe itu mudah, cepat. *Tapi* ketika harus ke industri itu memer, banyak sekali kendala. Nah, ini mungkin perlu dicarikan solusinya kendalanya supaya prototipe itu bisa menjadi produk massal. Terus juga anggaran riset juga mungkin perlu ditingkatkan. Sumber-sumber riset juga mungkin bacaan-bacaan dari scopus itu diberi, dipermudah karena hanya beberapa PTN yang bisa menembus bacaan-bacaan, riset-riset *gitu*, jurnal-jurnal, sehingga supaya mudah publikasinya.

Kemudian kesejahteraan dosen kemarin juga dari itu meminta agar tukannya segera dirapel begitu. Itu PR ya.

Kemudian untuk Kebudayaan, tadi ada sebelum Kebudayaan saya ada juga yang perlu dikaji ya yang perlu dikaji dari selain tadi PIP. Kemudian ada tata kelola guru yang harus ter, yang masih terfragmentasi. Nah, di sini ada yang perlu dikaji ini karena terlalu banyak undang-undang, ada UU PT Nomor 12 Tahun 2012, UU ASN Nomor 5 Tahun 2017, lalu Undang-Undang APBN, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang PD Nomor 23 2014, pengelolaan sertifikasi guru pada Undang-Undang GD Nomor 14 2005. *Nih* tumpang tindih dan beda aktor sehingga saling bertabrakan.

Kemudian kasus uang kuliah tunggal juga untuk Dikti ini perlu dikaji ulang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 karena rentan menimbulkan komersialisasi pendidikan, Pasal 11 menyebutkan UKT ditetapkan setelah mahasiswa diterima. Jadi memang ini ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan dalam hal apa namanya, peraturan-peraturannya jangan tumpang tindih. Nah, untuk juga Dikti ini kemarin ada usulan agar dosen jangan terlalu dibebani BKD begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan.

Untuk Pak Menteri Fadli Zon, ada supaya cagar budaya *nih* harapannya buka lapangan kerja baru. Jadi di situ untuk menampung banyaknya lulusan yang sejarah, arkeolog yang masih bingung kerja di mana. Semoga dengan optimalisasi cagar budaya bisa membuka banyak lapangan kerja baru.

Kemudian juga terkait dengan digitalisasi budaya mungkin perlu dimodernisasi ya museum *tapi* tidak meninggalkan kekunoannya. *Tapi* ada ruang tertentu yang mungkin terpisah *gitu* untuk ditampilkan secara *virtual reality* secara mungkin AI atau apa sehingga anak-anak muda sekarang generasi Gen Z ini tertarik untuk datang ke museum yang sifatnya lebih modern.

Kalau di DKI Jakarta itu di perpustakaan mungkin sudah mulai tuh ada yang visual-visualnya begitu. Kalau di luar negeri mungkin ada misalnya daun kecium, wanginya minyak kayu putih, daun kayu putih misalnya. Ada visualisasi harumnya tercium. Jadi perlu 3D dan lain sebagainya.

Kemudian bantuan anggaran untuk sineas muda *nih*. Kemarin saya banyak usulan dari para sineas muda agar dipermudah dan diperbanyak. Karena ada Undang-Undang Nomor 5 2017 Pemajuan Kebudayaan itu ada Dana Abadi Indonesiana. Ini belum dimaksimalkan. Jadi harus dipro, disosialisasikan.

Kemudian juga duta budaya kuliner kita belum ada. Baru beberapa saja yang duta budaya kuliner, itu ada Santy di China misalnya itu. Ada juga yang di Belanda itu yang juga sudah menjadi duta budaya kuliner. Ini belum mendapatkan bantuan-bantuan. Mereka masih biaya sendiri.

Kemudian tempat ekspresi. Nah, ini ondel-ondel sekarang ini kan keliling jadi seperti mengemis *gitu*. Mereka ini saya tanya kenapa begitu? Karena kami tidak punya tempat ekspresi. Tidak ada yang bisa bekerja sama untuk mencarikan kami untuk atraksi begitu. Karena mungkin kalau Kemenparekraf kemarin kalau ada kegiatan dia selalu menampilkan tarian-tarian *gitu*. Mungkin bisa diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya sehingga mereka punya tempat untuk ekspresi.

Nah, satu lagi situs Gunung Padang usianya kemungkinan 10.000 tahun, tertua di dunia, di Cianjur. Nah, ini mungkin kita, kan ini lebih tua dari Mesir, dari piramida di Mesir kan banyak tuh turisnya. Nah, ini jadi satu hal yang menarik *nih* bisa dikelola karena ini kita bisa jualannya tertua *gitu* dibanding yang di Mesir. Nah, mungkin apa namanya, karena kita pariwisata ya Bu, pisah *gitu*. Kita ingin ada pariwisata gabung dengan kebudayaan. Karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengamatkan budaya bagian dari pariwisata.

Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Masih banyak *tapi* bergiliran dengan yang lain.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Izin ya, saya perpanjang lagi aja deh setengah jam. Soalnya sudah ada yang mendaftar dan mohon maaf tidak saya beri *dulu* kesempatan untuk menanggapi. Karena ada ronde kedua yang sudah mendaftar Pak Bonnie Triyana dari Fraksi PDI Perjuangan, kemudian Pak Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar, kemudian *Teteh* Melly Goeslaw ya? Iya. Dan dari? Oh, iya ya, Fraksi PAN *nih* ada siapa nanti Bu Dewi?

Jadi *wait, wait*. Kita ini aja *dulu* ya Mbak Reri ya.

Kemudian dari Fraksi PAN ini *gimana nih*?
Ada dua, siapa *nih* yang duluan dulu?

PDI, *udah*. Mbak Puti juga ya ama Mas, Mbak Puti ya?

Oh, karena, oke, jadi teman-teman problem-nya hanya waktu *nih*. Jadi mohon teman-teman lebih singkat *gitu* ya kita berbagi supaya tadi hak konstitusi semuanya bisa juga diwujudkan *gitu*.

Sekarang, jadi Pak Bonnie sama Mbak Puti, bisa ya merelakan Mbak Puti *dulu* ya. Jadi nanti, silakan Mbak Puti.

F-PDI PERJUANGAN (PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP.):

Terima kasih Pimpinan.

Izin karena saya ditunggu ada rapat di fraksi, maka saya sedikit menyampaikan dalam forum ini.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh teman-teman Poksi, Anggota Komisi X, Dan yang saya hormati Profesor Satryo, Mendiktisaintek RI, Yang saya hormati Profesor Abdul Mu'ti, Mendikdasmen RI, Dan yang saya hormati Bapak Fadli Zon, Menteri Kebudayaan dengan seluruh jajarannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu.

Perkenalkan saya Puti Guntur Soekarno Fraksi PDI Perjuangan 213 Dapil Jatim I: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo.

Mungkin beberapa pertanyaan atau tanggapan tadi sudah disampaikan dari beberapa teman-teman. Dan saya juga secara singkat ingin menyampaikan mungkin lebih fokus kepada Pak Fadli Zon dari Kementerian Kebudayaan. Karena menurut saya ini menjadi sangat penting. Karena saya melihat di dalam paparan tadi disampaikan bahwa kebudayaan menjadi pemersatu kekuatan dan diplomasi jati diri bangsa.

Jadi artinya payung besar daripada kebudayaan ini adalah Pancasila. Ini menjadi sangat penting. Dan kebudayaan dapat mewarnai, artinya kerja-kerja Pak Fadli Zon itu juga terkait terkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Jika dikatakan kebudayaan sebagai pemersatu, kekuatan dan diplomasi jati diri bangsa, maka saya belum lihat di sini apa sih sebenarnya *blueprint* dan *platform* dari Kementerian Kebudayaan terkait dari pengembangan kebudayaan dan kebudayaan itu sendiri bisa menjadi bagian dari identitas nasional kita.

Kalau hari ini kita selalu berbicara atau melihat, misalnya kesuksesan daripada Korea dengan Korean Wave-nya. Kesuksesan daripada India identitasnya bisa, bisa, bisa di, diperlihatkan lewat, misalnya Bollywood dari filmnya. Atau Korea dengan musiknya atau K-Popnya. Amerika dengan industri filmnya, musiknya. Ini semua menjadi identitas. Kalau kita bicara India, ingatan kita langsung identitasnya kepada, misalnya Bollywood atau film-filmnya. Maka *platform* kebudayaan itu menjadi sangat penting.

Keberhasilan pembentukan jati diri itu tidak bisa dihitung dari lima tahun, sepuluh tahun, tetapi, kenapa saya bicara soal *blueprint*? Harus dimulai mau tidak mau dari sekarang *blueprint* kebudayaan itu harus ada. Mungkin, mungkin keberhasilannya tidak bisa dilihat lima tahun, sepuluh tahun, tetapi tiga puluh tahun ke depan. Mengapa? Karena ini yang saya pelajari. Keberhasilan dari negara-negara lain yang kemudian memiliki identitas kebudayaannya, *blueprint* dan *platform* kebudayaannya itu dimulai 30 tahun yang lalu dan hasilnya baru dilihat sekarang, baik secara identitas maupun dari dampak ekonominya. Maka kemudian saya juga mendorong agar ada juga koordinasi dan juga kolaborasi mungkin dengan kementerian lainnya, ada Kementerian Pariwisata, ada Badan Ekonomi Kreatif, ini sebenarnya saling berhubungan.

Lalu kemudian juga saya juga mendorong agar untuk mendorong kebang, kebangkitan seni dan pertunjukan apa, pertunjukan tradisional, maka nasib kaum seniman ini juga harus diperhatikan. Terutama untuk para pekerja seni pertunjukan yang memiliki upah di bawah rata-rata Pak. Mungkin sekitar 87 sampai, 87% para pekerja seni ini memiliki upah rata-rata di bawah UMP atau UMK atau sekitar 1,9 juta per bulan. Ini berkaitan mungkin dengan industri

ekonomi kreatif tetapi ini juga bisa menjadi bagian dari bagaimana koordinasi dan kolaborasi Bapak dengan kementerian terkait.

Dan ini juga berharap, saya berharap kalau tadi bicara soal seni budaya, museum. Bapak mengatakan kebudayaan tidak hanya bicara soal masa lalu, tetapi kebudayaan juga bicara masa depan. Kita belum ada museum yang berbicara tentang *modern art*. Kalau di New York ada museum, ada MoMA, *Museum of Modern Art* yang kemudian menjadi tempat wadah ruang bagi para seniman-seniman kreatif, muda, seniman-seniman yang bicaranya lebih futuristik, *tapi* di Indonesia belum ada. Mungkin satu-satunya yang saya lihat Museum Macan yang memilih, yang punya apa namanya, *private* atau dalam sektor swasta. Jadi artinya pemerintah juga harus bisa mendorong atau Kementerian Kebudayaan juga bisa mendorong adanya museum seni yang modern.

Lalu kemudian juga terkait dengan, sebentar Pak, direktorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Ini penting karena saya selalu mendapatkan masukan keluhan dari masyarakat adat dan juga masyarakat penghayat kepercayaan. Harus menuntaskan penyusunan naskah urgensi untuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, guna memperkuat perlindungan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat di Indonesia.

Penyusunan naskah ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang terlebih terstruktur dan mendalam bagi komunitas penghayat kepercayaan yang kerap menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan keyakinan maupun tradisinya. Ini bagian dari Indonesia Pak. Ini bagian dari identitas nasional kita. Diharapkan dengan terbentuknya sistem perlindungan ini maka akan ada pengakuan keberadaan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Tetapi juga mereka dapat menjalankan tradisi dan keyakinan mereka tanpa hambatan tanpa kemudian menjadi bagian dari kaum yang termarginalkan dan terdiskriminasi. Ini tentunya saya memiliki kepercayaan kepada Kementerian Kebudayaan untuk kemudian bisa lebih melihat hal ini menjadi hal yang isu-isu ini menjadi isu strategis juga untuk keberlangsungan dan perlindungan bagi kaum penghayat dan masyarakat adat.

Kemudian juga saya sangat berharap, kalau tadi bicara soal, ini berkaitan dengan Prof. Mu'ti. Kalau bicara soal pendidikan karakter dengan tujuh kebiasaan yang baik, maka ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita menghargai sejarah Indonesia. Pak Fadli Zon, Pak Mu'ti ini pasti juga harusnya bisa saling berkolaborasi, bagaimana kita menghargai Indonesia kalau kita tidak menghargai sejarah kita. Bobot pelajaran sejarah di dalam kurikulum kita ini juga menurut saya harus ditinjau kembali.

Ketika tadi disampaikan oleh teman-teman harus ada salah satu apa, ada, ada aturan untuk bisa berkunjung ke museum. *Tapi* kalau mereka semua tidak mengerti sejarah bangsa Indonesia, maka artinya kunjungan ke museum itu tidak, tidak ada artinya. Mereka tidak menghargai, apa artefak-artefak yang

ada di museum itu mereka tidak akan bisa menghargai. Maka ini menjadi bagian dari pendidikan karakter, menjadi bagian dari tujuh kebiasaan yang baik dan bobot dari pelajaran sejarah itu yang berbasis kepada nilai-nilai dalam Pancasila.

Terakhir untuk Pak, terkait dengan pendidikan karakter, Prof. Abdul Mu'ti tentunya sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 22 2018, salah satu bagian dari pendidikan karakter adalah upacara bendera. Di sekolah negeri ini mungkin masih dilaksanakan dengan baik, tetapi dipertanyakan di sekolah-sekolah swasta. Tidak bisa dipungkiri bahwa upacara bendera adalah bagian dari pendidikan nasionalisme dan patriotis terhadap Indonesia. Dan ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang hari ini menjadi bagian yang harus kita cermati.

Karena hari ini kita mendapatkan angka-angka di mana akhlak semakin menurun, saling menghargai tidak terjadi, intoleransi, rasa nasionalisme semakin menurun, patriotisme kita juga menurun, anak-anak kita. Pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi sangat penting karena kasus kekerasan, kekerasan seksual, *bullying*, fisik, kekerasan fisik, kekerasan psikis, ini semua terjadi di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.

Saya rasa ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan tentunya kolaborasi, koordinasi antara kementerian tidak menunjukkan ego sektoralnya ini menjadi sangat baik untuk kemudian membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi terutama dalam pendidikan budi pekerti dan identitas kita sebagai suatu bangsa.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Mbak Puti.

Dan langsung dilanjutkan karena temanya juga sangat lekat dengan singkat ya pada Mas Bonnie Triyana.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Karena memang Anggota Fraksi Partai dari PDIP dan juga Golkar *nih* yang paling banyak. Jadi kita beri kesempatannya dua *tapi* berturut *tapi* singkat-singkat.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Kemudian Pak Nur, Pak Agung. Setelah itu Mbak Melly, eh *Teh* Melly Goeslaw. Ibu, Ibu Reri. Kemudian Mohammad Iqbal, tadi sudah dipesankan. Dan juga Pak Muslimin Bando, dan...

F-PKB (HABIB SYARIEF MUHAMMAD):

Habib Syarief, PKB.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Oh, Pak Habib, Habib. Dan terakhir Hoerudin, Mas Bram.

F-P. DEMOKRAT (BRAMANTYO SUWONDO, M.IR.):

Ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Bram.

Ya, jadi paling susah ini karena baru pertama kali rapat. Saya juga mohon maaf bagaimana mengaturnya seadil mungkin. Ini masih menjadi *exercise* kita *nih*, ya, masih mencoba-coba. *Tapi* mudah-mudahan kita coba atur. Dan mohon direlakan nanti waktu makannya saja ya kita persingkat.

Ya, silakan, Pak Bonnie.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Ya, terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Singkat ya, semuanya ya. Pak Nur. Kemudian Pak Agung juga.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati dan banggakan, Mendiktisaintek, Profesor Satryo Brodjonegoro,
Yang saya hormati dan banggakan, Mendikdasmen, Mas Abe Mu'ti, ya sahabat saya,
Dan yang saya banggakan juga hormati, Menteri Kebudayaan. Ini senior saya, Bang Fadli Zon, juga dengan Bro Giring dan juga teman-teman jajaran dari Kemendik, Mendiktisaintek, Mendikdasmen, dan Menteri Kebudayaan.**

Ini singkatan juga soal kebudayaan, Bang Fadli. Kita senang menyingkat-singkat.

Ya, langsung saja. Saya pertama ke kementerian, ke apa, Bang Menteri Kebudayaan *dulu*. Mungkin kita ingat ada surat kepercayaan gelanggang ya tahun 50, ada Asrul Sani dan Rivai Apin.

Dalam surat kepercayaan gelanggang itu saya kira itu salah satu roh spirit kebudayaan yang kita pernah rumuskan pada awal-awal kemerdekaan kita. Di situ disebutkan kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak. Dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Ke-Indonesia-an kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan. Tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami ini yang penting, terakhir, yang penting, kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat.

Saya kira dari surat kepercayaan gelanggang yang dirumuskan oleh Rivai Apin dan Asrul Sani ini kita dapatkan jiwa yang sama, yang searah, yang senada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya kira. Sifatnya kebudayaan itu tidak retrogresif, tidak ke belakang *tapi* justru ke depan, maju ke depan. Jadi kalau disingkat jangan Menbud Bang Fadli, Menkebud karena kemajuan itu harus ngebut.

Namun di sini saya catat dari presentasi Bang Menteri Kebudayaan tadi, Menkebud tadi, ada visi misi Kementerian Kebudayaan. Sementara, ada saya catat, ada Perpres, Peraturan Presiden Nomor 115 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025 sampai dengan 2045 yang juga ada visinya, ya kan. Kalau di sini disebutkan visi Bang Menkebud ini melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara, di peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, *sorry*, Nomor 115 tentang RIPK juga dirumuskan bahwa visi dari pemajuan kebudayaan kita Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang

mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Jadi ini kesinambungan atau kesesuaiannya di mana Bang Menteri? Antara visi misi kementerian dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang tentu sumbernya dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri.

Kemudian catatan saya yang lain adalah ini disebutkan perlindungan kebudayaan dan tradisi. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah bedanya kebudayaan dengan tradisi? Ataukah tradisi itu bukan dari kebudayaan, bukan bagiannya? Itu.

Kemudian tadi juga disinggung mengenai Museum Islam. Saya kira kita tuh punya total 400 museum, baik yang milik nasional, pemerintah nasional maupun daerah, ataupun swasta. *Tapi* kurang optimal di dalam memanfaatkan, mengembangkan narasinya. Kita punya Museum Islam Indonesia Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Kenapa kita tidak maksimalkan saja museum tersebut yang di Jombang itu? Karena narasinya juga Islam Indonesia. Daripada membuat yang baru *gitu* ya, mendingan mungkin dimaksimalkan cerita di ke-Islam-an ke-Indonesia-an itu di museum tersebut. Karena kan riset museum juga panjang, Ibu Ketua. Harus ada *provenance research*, harus ada *knowledge reproduction* nya seperti apa, panjang sekali. Jadi kalau bahannya *enggak* ada juga ya nambah-nambah kerjaan dan nanti buang-buang uang juga.

Kemudian soal rumah budaya ini, Bang Menteri. Ini tanggung jawabnya nanti terutama anggarannya itu pada Kemenlu ya atau pada Kementerian Kebudayaan? Pengelolanya siapa? Apa Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Kebudayaan? Kita tahu kalau di Jerman ada Goethe, di Belanda ada Erasmus Huis. Ya itu, itu seperti apa ya?

Dan banyak sebetulnya, soal layar saya pertanyakan *tapi* ini sudah disemprit. Nah, dengan program Bang Menteri yang sangat ambisius dan besar ini, apa cukup cuma enam sampe 7T? Kan di sini sebutkan idealnya. Apa dasarnya? Bagaimana perhitungannya? Ya kan? Dan kita juga belum punya gedung kesenian yang representatif, yang berkaliber standar internasional. Begitu juga galeri nasional, itu juga kita kalah sama Singapura. Bang Menteri tahu, kalah dia baru aja dibanding kita *tapi* dia hebat koleksinya, akuisisi koleksinya hebat.

Kemudian juga soal repatriasi. Yang terpenting menurut saya dari repatriasi adalah produksi pengetahuannya. Jadi mungkin ini dengan Mendiktisaintek, perlu didorong itu beasiswa untuk *provenance research* terhadap benda-benda tersebut. Karena kalau datangin barangnya saja, kita sudah mendatangkan 472 tahun 2023. Kita sudah mendatangkan 288 tahun ini, baru 84 berikutnya akan datang lagi. *Tapi* pengetahuannya itu apa? Karena yang dibagi ke publik itu pengetahuannya. Kalau barangnya disimpan di museum, pengetahuannya seperti apa?

Terakhir Bu Ketua, mohon maaf kepada Pak Menteri Mendikdasmen. Ini soal pelajaran sejarah. Tadi sudah disinggung. Pelajaran sejarah kita itu

hendaknya kita bisa mengajarkan tentang wawasan kebangsaan, kecintaan kita pada tokoh-tokoh, pada inspirasi kita di sejarah. Dan itu berkurang jamnya. Bagaimana selain berkurang jamnya, bobot pengajaran juga berkurang. Memang sebelumnya ada sejarah peminatan. Misal anak SMK, usul saya ya diajari tentang sejarah sains. Sejarah sains itu ya kalau misalkan sejarah teknik, ya belajar bagaimana sejarah penciptaan mesin. Jadi sejarah sains ini penting.

Jadi sejarah kita itu bukan melulu soal politik, perebutan kekuasaan, berdarah-darah, yang seringkali kita sadar atau tidak sadar itu seperti melestarikan dendam dari masa lalu dan kemudian menjadi kental nuansa kekerasan. Padahal, pelajaran sejarah itu harus memutuskan apa, mata rantai praktik kekerasan di dalam politik itu sendiri. Dan saya pikir alangkah baiknya jika pelajaran sejarah di tingkat sekolah itu ditambah ya, bobotnya diperkaya, dan juga ada fokus pada sejarah sains. Supaya *nggak* belajar yang itu-itu saja gitu.

Mungkin dari saya sekian Ibu Ketua, mohon maaf apabila terlalu panjang, Pak Mendiktisaintek, Pak Mendikdasmen, dan Bang Menteri Kebudayaan.

Sekian.

*Muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Waalaiikumsalam.

Ya semua masukan kita juga menikmati ya, *tapi* ini memang hanya semata-mata waktu *nih*. Mohon Pak Nur Purnamasidi, mungkin pengantarnya, yang terhormatnya bisa dihilangkan juga lah. Lumayan menghemat satu menit. Kemudian juga Pak Agung nanti.

F-P. GOLKAR (MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S. Sos.):

Ya, terima kasih.

Langsung kepada Pak Menteri Kebudayaan dan wamen. Singkat Mas Menteri. Jadi saya ini resah dengan budaya kekerasan kita sekarang. Saya takut anak-anak saya itu pulang itu kepalanya berdarah. Pernah, kejadian sekali. Kita setiap hari ditunjukkan berita seorang mantan suami memotong kepala istrinya, mantan istrinya dan banyak hal lah. Mumpung belum buat program detail, menurut saya, Kementerian Kebudayaan harus menjadi *leader* bagaimana budaya kekerasan ini bisa kita hilangkan di muka bumi Indonesia. Itu satu.

Yang kedua, ke Pak Mendikdasmen. Hati-hati Pak Menteri, tanggal 17 itu ada dua PGRI yang melaksanakan Hari Guru. Gara-gara guru honorer,

PGRI terbelah dua, ada KLB di Surabaya. Prof. Nunuk paham lah itu. Karena Prof. Nunuk orang yang masih punya hati untuk menjawab seluruh pertanyaan dari semua guru se-Indonesia. Jadi saya berharap Prof. Nunuk ini bisa diajak diskusi Pak Menteri.

Jadi besoknya ada di Malang, ke-kepemimpinan Pak Teguh dan ada kepemimpinan Prof. Unifah. Yang terakhir dimenangkan Prof. Teguh di PTUN, jadi hati-hati. Dan mohon difasilitasi bahwa problem penyelesaian guru honorer ini ada di Kemendagri, PAN RB, dan BKN. Di Kemenkeu, oke. Di Kemendikbud, oke. *Tapi* Kemendagri, BKN dan PAN RB ini problem-nya di situ. Nah, itu.

Yang, yang, yang terakhir, Kemendiktisaintek. Saya setuju dengan berita Detik hari ini. Perguruan tinggi hanya melayani kebutuhannya sendiri, tidak melayani masyarakat. Itu bisa dilihat seluruh APBD uangnya banyak *tapi* sumbernya selalu banyak dari APBN. PAD nya kecil, Kenapa? Karena potensi daerahnya tidak didampingi oleh perguruan tinggi untuk dikembangkan. Setiap tahun nambah anggarannya, *tapi* kemiskinan tetap.

Jadi, jangan sampai masa *dulu* saya kuliah terulang lagi, kampus menara gading. Menurut saya itu problem terbesar kita, jadi bagaimana sekarang, kalau seluruh kepala desa dibiarkan tanah bengkoknya itu ditanam tebu, yang dampaknya tujuh bulan *ndak* bisa untuk pertanian. Sehingga akhirnya bergeser dari petani menjadi buruh tani sekarang jadi, kalau di Lumajang di dapil saya, jadi pengedar narkoba. Nah, ini menurut saya PR besar.

Di Lumajang ini ada 2.700 penderes gula kelapa. Dari *dulu* sampai sekarang, masaknya tetap seperti itu, *gitu*. Padahal ada potensi pengembangan, misalnya gula, gula apa namanya, gula semut yang bisa meningkatkan daya. Itu pun tidak diintervensi oleh perguruan tinggi.

Jadi itu menurut saya, saya setuju dengan visi Bapak dan seluruh tim yang ada. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Saya berharap sebenarnya makin hari, makin hari APBN kita makin berkurang, karena orang makin mudah untuk melakukan sesuatu yang lebih efisien, karena terliterasi, kan begitu. Itu juga menjadi bagian *note* kami bahwa literasi pun membuat akhirnya anggaran, rendahnya literasi kita membuat anggaran pembangunan kita makin hari makin membengkak tanpa dampak yang positif terhadap masyarakat.

Saya pikir itu Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Pak Agung Widiantoro. Tadi yang sudah daftar *dulu*-an ya.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Saya geser Bu.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Gimana?

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Saya geser.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Senior. Waduh luar biasa.

F-P. GOLKAR (Drs. JULIYATMONO, M.M., M.H.):

Terima kasih.

Izin Bu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Tiga menit ya Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. JULIYATMONO, M.M., M.H.):

Iya.

Izin Bu Ketua.

Bapak/Ibu yang terhormat.

Dari beberapa yang telah disampaikan, ada dua yang perlu kami tambahkan. Pertama, pendidikan soal zonasi. Zonasi itu tidak memenuhi syarat berdirinya sekolah-sekolah. Karena berdirinya sekolah *dulu* tidak pernah, ada pertimbangan zonasi, kan menimbulkan problem baru. Oleh karena perlu dirubah, ditinjau kembali. Jika perlu kembali kepada sistem masuk sekolah dengan standar NEM. Sehingga sekolahnya akan terukur, mana sekolah yang unggul, mana sekolah yang disiapkan dengan berbasis mutu.

Saya sependapat Pak Menteri. Saya tentu mendukung penuh karena beliau merasakan susahnyanya mengelola pendidikan, mengelola pendidikan swasta, dan beliau sangat memahami itu. Dan hampir seluruh hidupnya Pak Menteri nyaris untuk pengabdian sehingga harus menyelesaikan persoalan ini. Dan bangsa ini sangat berharap menaruh perhatian teruntuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemudian yang kedua, ini Menteri kebudayaan Pak Fadli Zon. Pak Fadli Zon mungkin cukup akrab dengan Empu Basuki yang ada di wilayah Gondangrejo yang bikin keris. Dan kerisnya Pak Fadli Zon luar biasa, kolektor top, dan oleh karena auranya luar biasa Bapak Fadli Zon, kerisnya besar.

Nah, kemarin ada problem sedikit. Ada Permendik-ri-seteknologi itu terhadap cagar budaya. Berkali-kali 10 tahun saya berjuang, *ndak* ada respon sama sekali di pusat. Di wilayah kabupaten saya, Kecamatan Gondangrejo itu 13 desa, kampungnya Pak Jokowi itu, nyaris semuanya ditetapkan sebagai cagar budaya. *Ndak* bisa dimanfaatkan apapun. Makin hari, makin miskin, makin miskin. Di tengah kota nanti jadi kampung primitif itu. Oleh karena bagaimana cara mencabutnya dan ini bergeser kemana nanti? Apakah Peraturan Menteri Kebudayaan menggeser, mencabut cagar budaya? Termasuk di Solo itu ada Benteng Vastenburg. Itu SHM-nya milik dua orang, Sertifikat Hak Milik Perorangan. *Ndak* bisa diapa-apain.

Padahal Solo butuh bintang 5 satu lagi yang ingin di sampingnya Benteng Vastenburg. Benteng tetap dipelihara dengan baik, jadi destinasi juga yang baik. Dua hal ini saya kira perlu secepatnya didiskusikan agar ada solusi.

Sangiran, luar biasa. Perkembangan di Museum Sangiran bagus. *Tapi* jangan semua wilayah menjadi cagar budaya. Ini susahnya minta ampun.

Terima kasih Bu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Pak, *matur suwun*.

Dan kita optimalkan waktu sampai 13.30 WIB ya.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut kepada *Teh* Melly dan bersiap-siap Ibu Reri.

F-P. GERINDRA (MELLY GOESLAW):

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat, *eh*, terima kasih Bu Ketua.

**Selamat siang Prof. Satryo, Prof. Abdul Mu'ti dan Pak Fadli Zon,
Semua wamen dan seluruh jajarannya.**

Saya singkat saja, ada dua poin. Ini mungkin bisa termasuk dalam pendidikan dan kebudayaan juga. Saya cuma mau mengusulkan untuk memperkuat muatan kebudayaan dalam kurikulum pendidikan formal.

Mengingat budaya kita ini kan sangat kaya, sangat banyak yang harus diketahui. Saya curiga dan saya juga mungkin sedikit apa, meyakini anak sekarang *nggak* tahu bedanya angklung sama kolintang. Ya kan? Bedanya gendang Sunda sama gendang Jawa itu apa? Bentuknya seperti apa?

Suling Sunda sama suling Minang itu bunyinya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Gambar atau motif apa sehingga bisa di, dimasukkan ke dalam kategori batik? Atau gambar dan motif apa yang tidak dimasukkan ke dalam kategori batik? Itu anak-anak sekarang *nggak* tahu. Jadi saya mengusulkan untuk memuat lebih kuat lagi kebudayaan di dalam kurikulum pendidikan formal.

Lalu hal yang kedua, tadi Pak Fadli Zon membicarakan tentang banyak museum. Saya juga tahu, Pak Fadli punya museum Pak Fadli Zon. Terus ada kerabat Pak Fadli Zon, saya pernah ke sana juga, Museum Taufiq Ismail. Itu sangat baik. Yang sudah ada museum, *udah*. *Tapi* saya punya usul kalau bisa ada satu wilayah yang ada gedung museum *gitu ya, tapi* apa ya? Jadi kalau kita tuh ngopi, anak sekarang kalau ngopi ke dalam, ke, ke, pergi ke sebuah kedai kopi itu bukan minum kopi *tapi* lebih ke *lifestyle gitu*.

Nah, *gimana* caranya anak-anak sekarang *nggak* alergi untuk datang ke museum? Karena kan sesuatu yang pasti kalau untuk anak sekarang *boring*. Jadi mungkin di sini Pak Fadli Zon didampingi oleh Giring yang aku tahu pasti bisa lebih membuat *gimmick* yang lebih *catchy gitu* untuk museumnya, yang pengen juga memuat semua *library* tentang seniman, tentang budayawan, tentang semua yang apa namanya, yang terdahulu. Sekarang kita *nggak*, sangat kesulitan untuk mencari film-film nya Bing Slamet, filmnya Sjumandjaja, musiknya Idris Sardi, Usmar Ismail, Teguh Karya, Arifin Senur, Chairil Anwar. Nah, kalau museum itu ada *library*-nya apa, seniman-seniman tersebut, akan akan lebih baik.

Pada intinya, saya ingin generasi sekarang tidak hanya tahu tentang Mahalini tanpa tahu Titiek Puspa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Kasih hadiah *dulu* ah.

Melly Goeslaw ahlinya mengubah lagu,
Bang Once bernyanyi bikin hati luluh.

F-P. GERINDRA (MELLY GOESLAW):

Wow.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Kita semua sangat menunggu-nunggu,
Kolaborasi Menteri baru dengan Komisi Sepuluh.

F-P. GERINDRA (MELLY GOESLAW):

Yey.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Nah.

Yuk lanjut kepada Ibu Reri.

F-P. NASDEM (LESTARI MOERDIJAT):

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Dan siap-siap Bapak Habib. Nanti Pak Andi, Puang Andi nanti ya.

F-P. NASDEM (LESTARI MOERDIJAT):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan,
Dan tentu yang terhormat dan yang mulia kawan-kawan semuanya,
Serta, tadi diminta tidak menyebutkan satu-satu, seluruh kementerian dan
jajarannya dengan tidak mengurangi serasa, rasa hormat.**

Izinkan saya, saya dapat tugas dari Kapoksi. Pak Menteri Kebudayaan, bukan Mendikbud lagi khususnya. Tadi khusus, secara khusus bagi yang berhubungan kebudayaan. *Tapi* sebelumnya ini *rap up* saja dari apa yang tadi sudah kita bicarakan. Rupanya empat jam ini menyenangkan sekali Bu Heti. Wah *nggak* terasa. Jadi nampaknya kita memang perlu berbicara lebih panjang berdiskusi lebih panjang karena PR kita banyak sekali.

Tapi kepada Kementerian Pendidikan, baik Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Pendidikan Tinggi. Izinkan saya menyampaikan atau kami menyampaikan dari Fraksi Partai Nasdem beberapa catatan.

Pendidikan ini masalah yang rasanya tidak pernah berhenti kita bicarakan. Dan ini juga yang saya rasa ketika kita berbicara nanti dalam lima tahun ke depan, bagaimana pendidikan kita lihat dalam menyelesaikan masalah yang pasti tidak bisa diuraikan dalam satu masa, lima tahun ini.

Bagaimana *quality, equity, inclusivity, dan equality*. Saya kira ini harus menjadi bagian yang menjadi dasar dari kebijakan kita ke depan.

Kemudian permasalahan hendaknya kita urai, ini saya bikin catatan, dari hulu ke hilir, dimulai dengan pemetaan. Dan berangkat dari perjalanan kita rasanya, selama ini kita menyelesaikan masalah ini *symptomatic solution*. Tapi tidak berangkat dari *fundamental solution*.

Nah, wajar tentu sangat tahu. Jadi kalau kita gatal, kita selesaikan gatalnya saja digaruk. Tapi kita *nggak* pernah tahu kenapa kita korengan, apa airnya yang kotor, atau memang badan kita punya alergi. Nah, mungkin ini perumpamaan yang ingin saya sampaikan.

Berangkat dari data dan jangan lupa pijakan kita adalah kelembagaan, keluarga dan masyarakat. Prinsip dari tiga ranah, pendidikan, yang kemudian juga saya rasa menjadi pemikiran kami dari Fraksi Partai Nasdem. Sepakat juga dengan kawan-kawan bagaimana kita menilik lagi Undang-Undang Sisdiknas ini. Rasanya sudah dimulai, sudah masuk ke Prolegnas ya, Pak Pimpinan. Ini mungkin kita bersama-sama mengawal. Karena banyak sekali hal-hal yang sangat fundamental yang harus kita bereskan.

Banyak sekali *overlapping*, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang selama ini justru tidak ditilik karena kita, itu tadi, menyelesaikannya berangkat dari *symptomatic solution*. Termasuk sebelum akhir periode yang lalu bersama Bu Harti, kita bicara secara khusus mengenai anggaran pendidikan. Yang 20% itu ternyata tidak 20% ke pendidikan. Setelah dipreteli, hanya 12% kalau *nggak* salah ya Bu ya. Dan, dan itupun juga, 15 ya. Dan itupun juga banyak terpakai sebagai anggaran rutin biaya. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian kita.

Nah, saya tadi senang sekali Pak, Pak Soemantri, di dalam presentasinya bahwa ujung dari ini semua bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs.

Saya kira, saya baru berkumpul dengan beberapa kawan-kawan. Ada yang, ini parlemen kok *nggak* pernah, bicara SDGs sih? Nah, ini juga menjadi, menjadi pikiran kita semua bagaimana nanti di Komisi X bersama para mitra betul-betul SDGs menjadi, menjadi tujuan kita sehingga tidak hanya menjadi *paper* yang bagus saja berhenti di Bappenas dan tidak bisa diturunkan.

Menuju masuk ke Pak Fadli Zon. Ini urusan BRIN, Pak. Memang kita punya sesi sendiri. Saya ingin masuk, kebetulan saya ini sekolahnya arkeologi, tapi memang Pak, karena memang sekolah tidak sesuai dengan pemenuhan, ini termasuk salah, bukan salah jurusan, saya sangat mencintai, tapi tidak terpakai. Akhirnya terpaksa menjadi pindah pekerjaan lain dan mengantarkan saya di sini.

Satu hal, hari ini dengan berubahnya sistem di mana semua dijadikan satu di bawah BRIN. Saya kira ini pasti terjadi di tempat lain. *Tapi* izinkan saya berbicara karena ini berhubungan kebudayaan.

Pak, di arkeologi itu ada yang namanya Balai Penelitian Arkeologi (Balar). Nah, para teman-teman di Balar ini semua sekarang ditarik ke BRIN dan gudangnya atau barang-barang yang selama ini menjadi barang-barang penelitian, semua ditarik ke gudang di Cibinong. Yang lebih menyedihkan lagi, Pak. Saya baru dapat cerita dari kawan-kawan, itu identifikasi ini barang apa, itu tidak ada. Bagaimana menaruhnya, bagaimana menyusunnya, padahal penelitian arkeologi atau penelitian kebudayaan itu bagian, benda dan artefak itu bagian dari data.

Ini salah satu hal yang saya rasa kita bicara tata kelola dan harus segera diselamatkan. Karena belum lagi kalau kita bicara sekarang masalah bukan hanya bendanya. Masalah bagaimana kalau orang nemu barang di daerah, terus sekarang mau ke mana? Mau dibiarkan sampai rusak, agak menyimpan.

Saya, dapil saya, ada situs, Pak. Namanya situs Pati Ayam. Itu salah satu situs yang bahkan Raden Saleh pernah, datang, kemudian membuat lukisan, tentu *panjenengan* semua tahu. Di situ banyak ditemukan orang namanya Balung Buto. Januari kemarin, karena *nggak* tahu harus bagaimana, akhirnya kami me, ini, bersama-sama kawan-kawan dari di bawah Pimpinan Profesor Truman Simanjuntak melakukan penggalian dan menemukan *elephas* utuh. Utuh Pak. Utuh betul.

Nah, *tapi* ini sekarang bingung. Ini situs belum masuk sebagai situs nasional. Karena apa? Karena lagi-lagi urusan administrasi. Padahal untuk menentukan bahwa situs ini situs nasional, Profesor Truman duduk di situ. *Tapi* beliau yang kami mintain karena itu dapil kami Pak, untuk menggali, tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil sekarang, tanah, 15x15 kami sewa, setelah digali kami tutup. Tentu yang menggali adalah teman-teman arkeolog.

Nah, sekarang tempatnya di mana? BRIN sendiri sampai hari ini begitu banyak situs di Indonesia hanya boleh menggali di situs Bumiayu. Lalu bagaimana kalau ketemu di tempat lain? Bagaimana dengan penelitian yang lain? Lagi-lagi ini masalahnya keranjangnya tata kelola. Di mana simpangannya.

Izinkan kemudian. Saya ditugaskan oleh Kapoksi bicara mengenai kebudayaan.

Jaman saya sekolah dulu, saya menambahi Mas Bonnie. Harus hafal kita *dulu* karena itu bagian, kalau *nggak* kita di-*gojlog*. Kebudayaan sebetulnya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Masih hafal saya Mas.

Nah, jadi lingkupnya memang besar sekali. Bagaimana hanya dengan dana 2T ya, sekarang ya? 2T. Kita bisa bekerja dan saya rasa mungkin harus menjadi bagian dari tugas kita semua Komisi X untuk bisa berpikir. Karena kebudayaan itu payung dari semua apa yang kita lakukan. Itu pandangan saya.

Dan sekarang saya juga ingin menitipkan kawan-kawan dari Kemendikbud mengenai Undang-Undang Cagar Budaya. Saya rasa kita perlu menilik lagi dan perlu ada sinkronisasi karena banyak sekali undang-undang lain yang tumpang tindih. Misalnya undang-undang mengenai pembangunan gedung, undang-undang yang ada berhubungan. Dan ini juga berhubungan dengan masalah pembagian, keuangan pusat dan daerah.

Contoh sekarang, di kabupaten/kota, tidak sama. Ada yang kebudayaan ditempelkan di pariwisata, ada yang kebudayaan ditempelkan di pendidikan, ada yang kebudayaan juga tidak dipahami, ada yang berpikir kebudayaan itu cuma nari *gonjreng-gonjreng* selesai.

Nah, pemahaman mengenai kebudayaan ini sendiri, ini berhubungan juga mungkin dengan Kemendikbud, *sorry*, Kemendiknas. Jadi kami *sosolot*. Bagaimana kemudian kita semua memahami ini? Saya rasa ini menjadi tugas kita.

Dan yang terakhir Pak, izinkan juga kami meminta perhatian dari Bapak-Bapak di, ini khususnya mengenai tadi kita bicara kesetera, kesejahteraan guru. Kita juga bicara kesejahteraan pelaku kebudayaan, keseluruhan. Bukan hanya pelaku industri atau, seniman juga tetapi kawan-kawan yang berada di lapangan yang sekian lama bekerja menjadi aset, menjaga aset kita karena kondisi mereka tidak lebih baik daripada kawan-kawan lain yang kita perjuangkan.

Yang terakhir, Pak. Ketika kita bicara kebudayaan, kita tidak boleh melupakan masyarakat adat. Ketika kita bicara sekarang, RUU Masyarakat Adat sampai hari ini masih belum selesai. Tetapi titik beratnya lebih banyak di masalah kepemilikan tanah dan agraria. Belum secara khusus kita berbicara aspek kebudayaan itu sendiri.

Tadi sempat disampaikan mengenai tradisi, *value*, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian nanti, mumpung kita sedang memperjuangkan RUU Masyarakat Adat ini ada di Prolegnas.

Eh, di Prolegnas ya, *udah* ya?

Dan sedang masih dalam pembahasan di Baleg. Mungkin bisa ada DIM dari pemerintah juga untuk memasukkan aspek kebudayaannya. Karena saya beberapa kali menyampaikan kepada kawan-kawan, ketika kita bicara masyarakat adat, kita tidak cuma bicara kepemilikan tanah. Kita tidak bicara masalah perhutanan sosial. *Tapi* di situ ada sistem nilai, sistem gagasan yang juga harus kita masukkan, untuk kemudian mendapatkan perhatian dan perlu juga pengamanan secara hukum.

Yang terakhir ada beberapa. Kalau ketemu nanti banyak sekali. Saya berterima kasih Bapak menjadikan repatriasi adalah salah satu bagian dari program. *Tapi* kami menitikkan Prasasti Pucangan yang sekarang tergeletak begitu saja. Dan ada beberapa prasasti penting karena prasasti-prasasti yang sekarang sedang dan harus kita perjuangkan berisikan data-data dan fakta bahwa sejak masa lalu kita sudah berada dalam kebhinekaan. Dan saya rasa kalau kita bisa mengembalikan barang-barang itu akan menjadi langkah yang baik buat kita.

Itu saja Bapak, terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Terima kasih, Ibu Reri.

Teman-teman semua, ini tercatat ada delapan orang lagi. Habib, Iqbal, Pak Iqbal, Pak Muslimin Bando, Hoerudin, Mas Bramantyo. Kemudian ronde ketiga Verrel, Gamal, dan Pak Sabam.

Nah, jadi, karena kebetulan rapat dengan Menpora. Kita sudah lobi tadinya mau ditunda *tapi* nampaknya tidak mungkin karena juga tidak ada waktu untuk besok dan selanjutnya. Jadi mohon sekarang kita dua menit. Jadi didiskon ya, yang belakangan ya.

Habib bisa ya, Bib ya? Mohon deh tepat apa, langsung pada sasarannya.

Silakan.

F-PKB (HABIB SYARIEF MUHAMMAD):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu saja, saya ingin mendengar langsung dari Pak Menteri Dikdasmen berkaitan dengan kejelasan dan ketegasan rencana untuk menaikkan kesejahteraan guru. Apakah yang dimaksud guru di sini hanya guru ASN? Sebagaimana keberpihakan pemerintah hampir 70 tahun. Sama sekali pemerintah memberlakukan kepada sekolah swasta itu sangat diskriminatif, tidak adil, dan *unhistory*.

Saya yakin Pak Mu'ti lebih paham, ya. Guru yang 300.000, 500.000, tidak saya dengar itu dari guru ASN. Itu guru swasta. Guru yang sementara ini nyambi jadi pemulung, gojek, jual bakso, dan sebagainya. Itu guru swasta.

Kemudian, hasil OJK yang terlibat kasus pinjol terbesar profesi guru dan gurunya guru-guru swasta. Bisa saya bayangkan kalau yang naik ini guru ASN,

guru ASN tiga juta gajinya, guru swasta 300 ribu. Disparitasnya itu semakin dalam. Sampai hari ini, baik gedung untuk pembangunan untuk renovasi, guru, tidak pernah mendengar saya guru swasta. Apa sih salahnya lembaga swasta, pendidikan swasta? Apa sih salahnya guru swasta? Apa sih salahnya anak-anak yang belajar di sekolah swasta? Mereka juga anak bangsa. *Tapi* perlakuannya sangat diskriminatif ya, sangat diskriminatif.

Saya bisa menyampaikan hal ini karena saya juga mengelola sekolah swasta. Kalau ada bantuan di satu sekolah 30 bantuan untuk alat-alat lab, 30 negeri *dulu*. Kalau ada sisa yang tidak diambil, baru ditawarkan kepada sekolah swasta. Nah, mudah-mudahan Pak Menteri untuk bisa bersikap bijak.

Hadirnya sekolah swasta lebih *dulu* daripada sekolah negeri ya, 22 Ki Hajar Dewantoro, 26 Kayutanam, kemudian juga Sunario berkaitan dengan perguruan swastanya tahun 2020, 1928. *Tapi* dalam perjalanannya masyaAllah. Di satu pihak pemerintah terus membangun sekolah negeri dan di pihak lain ribuan sekolah swasta yang terbunuh, yang tutup.

Terima kasih. Sekian.

Sekali lagi, saya ingin mendengar langsung kejelasan dan ketegasan Pak Menteri berkaitan dengan rencana kenaikan gaji guru ini. Karena ditunggu, sangat ditunggu sekali oleh guru-guru swasta.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Teman-teman nampaknya ya kita hanya bisa memberi kesempatan terakhir kepada Pak Iqbal. *Tapi* saya mengusulkan kita akan melanjutkan dalam bentuk FGD atau apa ya untuk pendalaman. Karena para menteri juga ingin pasti merespons dengan lebih, lebih detail pertanyaan-pertanyaan kita.

Jadi kalau misalnya sekarang, kita mungkin hanya bisa memberi...

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Closing statement. Tetapi...

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Heem.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Kalau...

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Jam 14.30 itu, Pak, mendapat info betul ya, ada Rapat Kabinet di Istana *gitu*? Jadi kita sebenarnya masih sangat menikmati diskusi. Dan ini, dan nanti teman-teman yang belum mendapat giliran akan diprioritaskan untuk sesi berikut atau pertemuan berikutnya.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Tentang FGD Bu. Usul, tentang FGD.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

FGD.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Kalau bisa satu hari untuk satu kementerian.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya, satu hari satu kementerian.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Jadi tuntas.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Kalau perlu tempatnya tidak harus di sini deh, *cieh*, biar lebih, lebih nyantai *gitu* ya. Kita diskusinya bisa dalam. Saya juga *surprise* dengan semangat kita semua dan semua masukan, tanggapan itu benar-benar sangat berisi dan penting, *gitu*.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Jadi sayang kalau dilewatkan.

Iya, Pak, Hoerudin?

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Masukan ini masukan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Dalam konteks proses kita Raker. Saya, saya berharap taat asas akan tatib. InsyaAllah cukup waktunya. Tiga menit.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Nah, jadi...

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Asas keadilan. Karena semua punya hak konstitusional. Dan hak konstitusional semua Anggota itu dijamin oleh tatib-nya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya, baik.

Jadi mohon ya, berarti ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa mentaati aturan yang ada. Walaupun karena ini mungkin pertemuan pertama begitu banyak isu yang ingin disampaikan dan sulit untuk dipotong, ya.

Baik, mungkin kepada Bapak Iqbal.

F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI):

Ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Setelah itu kita beri kesempatan kepada para menteri untuk memberikan semacam *closing statement* dan jawaban detailnya nanti mungkin di dalam tertulis saja *dulu*.

F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ibu Ketua, Pimpinan Komisi X DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri Dikdasmen Profesor Abdul Mu'ti.
Bapak Menteri Dikti dan Ristek, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Bapak Menteri Kebudayaan, Datuk Bijo Rajonan Kuniang, Pak Fadli Zon
yang saya hormati.**

Pertama izinkan saya menyampaikan sebuah pantun:

Pohon pepaya, pohon kemari,
Tumbuh subur di tengah taman,
Izinkan saya mengenalkan diri,
Supaya akrab kita berteman.

Saya Mohammad Iqbal Romzi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nomor Anggota 443.

Pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat dalam kepada mitra kami yang sangat akrab pada saat ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan terus akan melahirkan kebaikan-kebaikan.

Tubuh berkeringat disengat mentari,
Terasa sejuk dinaungi awan,
Sungguh memukau tampilan para menteri,
Wajahnya asri senyumnya menawan.

Wajahnya Asri ini singkatan Pak (aspiratif, solutif, responsif, dan inovatif). Mudah-mudahan tidak ada aspirasi yang terhambat, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, dan tidak ada permasalahan yang mandak tidak direspons, dan tentu ada inovasi-inovasi baru untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kedua, senyumnya menawan. Menawan itu artinya memperhatikan kawan, *gitu*.

Apa cantiknya seorang dara,
Kalau tak berhias bunga melati,
Apa menariknya sih kita bermitra,
Kalau tak mau saling mengerti.

Mohon dicatat itu ya.

Yang ketiga Bapak, ada sebuah kaidah tentang kebijakan yang sangat menurut saya menginspirasi. Bunyinya seperti ini:

"Lā fā'idahta min wijhatis siyāsah idzā lam yakun tuntajil faḍīlah"

Tidak akan bermanfaat sebuah arah kebijakan, kalau tak melahirkan kebijakan.

Kebijakan adalah saudara kembar dari kebijakan. Sejauh mana arah-arah kebijakan yang terumuskan, program-program yang sudah disampaikan dan efek langsung untuk kesejahteraan secara luas barakat. Itu namanya kebijakan yang melahirkan kebijakan.

Itu harapan kita semua, mudah-mudahan kebijakan terpadu akan melahirkan kebijakan bermutu, membuat bangsa ini menjadi maju. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Selanjutnya untuk apa ini, Dikdasmen. Kami sangat mendukung tentang bangsa yang cerdas dan bangsa yang maju. Karena itu kami sampaikan sebuah pantun, Pak:

Mata melihat kebaikan dilirik,
Berebekal ikhlas memuji syukur,
Kita bangun bangsa yang terdidik,
Berakal cerdas berbudi luhur.

Inilah ruhnya. Pendidikan moral dan karakter harus di-ke-depankan. Ibarat matahari yang mengalir, meresap kepada seluruh kebijakan dan program kami, yang dirasakan memberikan kesejukan dan kedamaian kepada bangsa dan negara ini. Itu maknanya.

Bapak/Ibu yang dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Untuk itu kita mengapresiasi dan mendorong sekuat-kuatnya agar para pelaku pendidikan, dosen, dan guru mendapatkan perhatian yang serius, meningkatkan kesejahteraan mereka.

Gaharu cemara di dataran rendah,
Gaharu jati di taman tinggi,
Guru sejahtera pendidikan bergairah,
Guru berbudi, ikhlas mengabdikan.

Jangan sampai keikhlasan mengabdikan itu nanti terganggu oleh faktor-faktor tentang kesejahteraan. Ini harus menjadi. Jangan sampai negara berhutang kepada tuhan yang menjadi hak mereka. Bertahun-tahun jadi penyakit mentahun, tunaikan hak mereka sebelum keringat mereka kering.

Bapak-Bapak yang saya hormati dan saya muliakan.

Karena itu kami sangat setuju kepada kementerian untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Dan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah:

"Innallāha yuḥibbu idhā 'amila aḥadukum 'amalan an yutqinah"

Sesungguhnya Allah itu sangat senang dan sangat suka, cinta kepada seorang, apa dia, apabila dia melakukan pekerjaan, dia jaga mutu pekerjaannya itu. Menjaga mutu pekerjaan dengan mazhab tersebut dengan *itqan* dan *ihsan*. Ini menjadi *concern* kita, kita bersama.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan dimuliakan.

Karena itu peningkatan mutu pendidik sangat tergantung juga oleh pelakunya. Dan ini harus andil besar negara menciptakan pendidik-pendidik yang berbudi luhur.

Izinkan menyampaikan pantun:

Suasana belajar ketika belia,
Ilmu melekat dalam ingatan,
Karena tampil berakhlak mulia,
Guru dipercaya menjadi panutan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Cukup ya Pak.

F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI):

Bapak-Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya muliakan.

Terakhir kepada Kementerian Kebudayaan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Pak Hoerudin, Pak Hoerudin.

Udah di-*gini*-in belum berhenti.

F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI):

Tampaknya kita, Pak Menteri, perlu kampanye sadar budaya.

Betapa dahsyat peran budaya ini menegakkan, mengokohkan sendi-sendi kebangsaan. Karena beliau dari Minang, izinkan saya menyampaikan sebuah pepatah:

Kuwait rumah kareno sandi,
Rusak sandi rumah binaso,
Kuwait bangso karena budi,
Rusak budi hancurlah bangso.

Hadirin yang dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Ini menjadi penting.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Cukup ya Pak, cukup.

F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI):

Menjadi penting. Orang, saya rasanya tidak tahan pak, karena bahasa apa, Padang itu, gelar itu memang diutamakan Pak ya. Jadi kalau saya ribut gelar, ya sudah.

Ya.

*Cubadak tumbuah sabatang,
Tumulu ruyik ndak kek pardi,
Nan rancak ngeliat orang,
Budi halui mamiket hati.*

Itu lahir dari budaya bangsa dan pendidikan yang terbaik, menciptakan manusia yang berkarakter tinggi. Inilah SDM yang akan memajukan bangsa dan negara ini.

Hadirin yang saya muliakan.

Saya rasa itu yang dapat saya katakan.

Curug Kujang udaranya bersih,
Air mengalir masuk pergi,
Cukup sekian terima kasih,
Di waktu lain insyaAllah berjumpa lagi.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wabillahi taufiq li akhsani tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Saya lihat Mas Iwan juga gembira sekali *nih* yang dari Sumatera Barat *nih*. Aduh.

Teman-teman semua, sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Muslimin Bando, Pak Hoerudin, Mas Bram, Verrel, Gamal, dan Pak Sabam, juga mungkin teman-teman lain yang belum berkesempatan. Kita akan lanjutkan di dalam pertemuan yang nanti mungkin akan kita bahas kapan dan

sebaiknya mungkin setiap kementerian, tadi ada usulan, terpisah secara tersendiri supaya bisa ada pendalaman.

Kami beri kesempatan mungkin beberapa menit, bukan untuk menjawab satu persatu karena memang waktunya tidak memungkinkan, Bu Esti, ini mungkin katakanlah kata-kata penutup dari masing-masing. Walaupun kita juga belum dengar *nih* suara wamen-wamen ya, nanti saja waktu FGD bisa lebih banyak mendengar. Dan kita minta kepada Bapak, Bapak-Bapak Menteri untuk memberikan kata penutup.

Silakan kepada Prof. Mu'ti.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Terima kasih.

Ini mengikuti jenjang pendidikan dari SD *dulu* yang mulai.

Baik, saya ada pantun:

Buah rambutan buah alpukat,
Mengandung gizi dan berkhasiat,
Para Anggota Dewan yang terhormat,
Terima kasih telah memberi nasehat.

Biar *nggak* kalah sama Pak, Pak Iqbal.

Saya ingin menyampaikan tiga hal saja secara singkat mengulas beberapa tadi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Yang pertama, bahwa sekarang ini kami belum mengambil kebijakan terkait dengan ujian nasional, PPDB, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu. Karena itu bukan pernyataan kami. Itu aspirasi masyarakat.

Tapi yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya tinggal nunggu sidang isbatnya, itu soal kesejahteraan guru. *Tapi* jumlahnya nanti ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan. InsyaAllah kalau didukung oleh kawan-kawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, yang tadi disebutkan angkanya itu dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025, insyaAllah sudah ada di dalamnya dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Yang kedua, terkait dengan masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan. Kami menyampaikan terima kasih termasuk juga beberapa hal yang berkaitan dengan Bahasa Indonesia dan bagaimana mengambil kebijakan. *Tapi* prinsipnya kami ingin mengambil prinsip yang moderat terkait dengan kebijakan pendidikan itu. Itu juga yang saya sampaikan di hadapan

Mas Nadiem pada saat serah terima, ada Prof. Satryo juga dan juga ada Bang Fadli.

Saya pakai qaidah yang juga sangat populer:

“Al-muhāfazah ‘ala al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlah”

Saya kira yang NU tidak perlu saya jelaskan. Yang Muhammadiyah saja *faham*, apalagi yang NU kira-kira begitu. Jadi yang baik-baik akan terus kita, kita, kita terus pertahankan, *tapi* yang belum tentu harus kita sempurnakan. Kalau sama semua untuk apa menterinya baru, kan begitu.

Kemudian yang ketiga, beberapa kendala menyangkut kebijakan memang menuntut perubahan regulasi. Misalnya soal guru P3K, memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan. Tadi terima kasih Pak terkait dengan Undang-Undang ASN, kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah dan beberapa undang-undang lain yang membuat kita ini kesulitan untuk menempatkan guru di tempat-tempat yang memang sangat diperlukan.

Izin kalau saya boleh menyampaikan, rasio guru murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal, sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri karena memang kami masih ada, ada perdebatan mengenai rujukan undang-undangnya, antara mengikuti Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Guru Dosen atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Kami akan mengundang pada tanggal 11 nanti, insyaAllah hari Senin, itu mengundang para kepala dinas seluruh Indonesia untuk memberi masukan kepada kami terkait dengan P3K, terkait dengan zonasi. Dan kami juga mengundang Anggota Dewan yang terhormat Komisi X, mudah-mudahan juga ada yang nanti ikut hadir di acara kami. Cuma mohon maaf acaranya di Jakarta, jadi berlaku untuk dapil yang dari Jakarta.

Untuk kunjungan ke daerah, Ibu, Ibu Anita, insyaAllah kami akan sering-sering bersama-sama dengan DPR. InsyaAllah kalau sering bersama DPR minimal soal jaminan anggaran akan lebih aman. Kami sudah bersama dengan Ibu Hetifah waktu meluncurkan Bulan Guru Nasional. Dan mudah-mudahan insyaAllah Bu, Ibu dari NTT, kami sekarang sudah memantau pendidikan yang ada di daerah yang sekarang terdampak oleh, oleh gunung, letusan Gunung Lewotobi. InsyaAllah nanti kami akan ke sana Bu melihat langsung sekolah-sekolah yang terdampak oleh, oleh musibah Gunung Lewotobi laki-laki ini, mungkin ada perempuannya ya, saya *nggak* tahu.

InsyaAllah nanti pada waktunya kami akan ke sana dan kalau Ibu berkenan nanti kita akan bersama-sama ke dapil Ibu. Tentu dengan kunjungan bersama ini nanti kita bisa memetakan dan merencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk, untuk memberikan bantuan bagi masyarakat.

Semangat kami Pak, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian, terkait dengan, terkait dengan paradigma di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kami punya semangat yang kami sebut dengan menjadikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah. Kalau boleh tadi juga ada singkatan, RAMAH itu adalah akronim dari (responsif, kemudian akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis).

Kami ingin hubungan kami dengan DPR terbangun dengan harmonis. Dan juga kami ingin agar semangat kita bersama untuk memajukan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang cerdas dapat kita wujudkan bersama-sama dengan sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Bapak/Ibu sekalian Komisi X DPR RI.

Kami kira demikian tanggapan saya secara umum.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Mudah-mudahan.

Ya?

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Izin Pimpinan.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Ya, silakan.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Masih belum berselang Pak Menteri, masalah aspirasi teman-teman yang masalah infrastruktur.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Ya.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Yang tadinya di PUPR...

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Betul.

F-PAN (MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H.):

Kita ke Komisi X atau ke...

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH RI (Prof. ABDUL MU'TI, M.Ed.):

Iya itu juga termasuk kendala kami Bapak. Dan menurut informasi yang kami terima, itu perlu dukungan dari Komisi X karena memang termasuk, termasuk dalam catatan kami, banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya karena pembangunannya tidak oleh kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *tapi* oleh Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini. Dan kami sudah ada rencana untuk nanti bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum membicarakan persoalan ini.

Dan mohon maaf, ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden mengenai kendala ini. Sehingga kami mengusulkan kalau tidak bisa seluruhnya, opsinya bisa opsi yang moderat. Kita ingin solusi yang moderat. Misalnya dalam nominal tertentu itu oleh Menteri Pekerjaan Umum *tapi* dalam nominal yang tertentu juga boleh oleh kita sehingga dikerjakan bersama-sama, parallel, sehingga pencapaiannya lebih cepat. Itu usulan kami dan dukungan kami untuk, untuk program ini dari Komisi X sangat kami harapkan.

Termasuk untuk guru agama Pak, kami juga nanti akan ketemu dengan Menteri Agama. Karena sekarang ini kami mendapat banyak keluhan, Ibu Hetifah juga bersama dengan saya. Guru agama yang di sekolah umum, ini nasibnya seperti anak yatim atau anak tiri. Dan itu mungkin mereka harus kita, kita berikan solusi, jalan keluar. Karena dapat informasi, kalau mengikuti sistem yang sekarang, untuk dapat sertifikasi mereka harus antri 40 tahun. Dan itu berarti sudah pensiun masih belum dapat sertifikasi. Nah, ini yang memang harus kita cari jalan keluarnya. Dan banyak hal yang nanti kita harus koordinasi dengan, dengan kementerian-kementerian terkait. *Tapi* ini kan juga baru pertemuan yang pertama, mudah-mudahan tidak pertemuan yang terakhir *gitu*.

Dan kemudian yang terakhir, soal tadi Bu mengenai bagaimana kita me, memenuhi apa, pendidikan untuk semua. Paradigma kami bukan paradigma sekolah *tapi* paradigma belajar. Jadi pendidikan itu tidak harus di sekolah, tetapi belajar. Sehingga karena itu kalau jaraknya jauh dan jumlah penduduknya sedikit, maka terlalu mahal kalau kita mendirikan sekolah di situ. Sehingga solusinya adalah membuka semakin banyak akses layanan yang memungkinkan mereka belajar.

Dan karena itu, maka partisipasi masyarakat sangat kita perlukan, termasuk afirmasi bagi masyarakat. Dan termasuk tadi relawan mengajar Bu.

Bukan guru mengajar, *tapi* relawan mengajar. Yang bisa jadi mereka bukan guru *tapi* siap untuk mengajar di situ atau dengan sistem pendidikan daring dan sebagainya. Kami memiliki banyak opsi yang nanti bisa kita bicarakan bersama-sama.

Kemudian yang terakhir, saya kira yang berkaitan dengan masukan-masukan untuk bagaimana perbaikan-perbaikan pendidikan. Kami berterima kasih dan sekali lagi kami sampaikan bahwa secara tahun ajaran sekolah itu sekarang berada di pertengahan tahun ajaran. Tidak mungkin kita melakukan perubahan kurikulum di tengah tahun ajaran. Atau perubahan atau penyempurnaan di tahun tengah ajaran juga tidak mungkin. Sehingga karena itu kami punya, masih punya waktu beberapa bulan ini untuk nanti melakukan pengkajian-pengkajian menyerap aspirasi. Sehingga pada tahun ajaran baru, mudah-mudahan nanti bisa ada kebijakan yang bisa kita ambil yang terbaik untuk memajukan pendidikan nasional kita.

Saya kira demikian dan yang sudah kami lakukan baru dua sebenarnya, yang satu adalah tadi tentang Bahasa Indonesia. Pada saat Bulan Bahasa kami mencanangkan, apa yang kami sebut sekali lagi kedaulatan bahasa, kesedaulatan Bahasa Indonesia. Di mana kita mendorong untuk bangsa Indonesia ini bangga, kemudian mahir dan maju dengan Bahasa Indonesia.

Kemudian yang tujuh kebiasaan, tadi juga sudah kami sampaikan, insyaAllah nanti kami akan luncurkan itu di bulan Desember. Sehingga pada bulan Januari itu sudah menjadi paradigma baru. Penanaman pendidikan karakter yang tidak harus melalui berbagai macam teori, *tapi* membangun karakter dengan membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu terbangun kebiasaan, dari kebiasaan terbentuk kepribadian, dari kepribadian terbangun peradaban.

Saya kira demikian, terima kasih.

Karena semua tadi sudah wallahul muafiq, izinkan saya dengan...

*Naşrum minallāhi wa fat-ḥung qarīb, wa basysyiril-mu`minīn,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Luar biasa.

Dan sekarang kita beri kesempatan kepada Prof. Satryo.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Ir. SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO, M.Sc. Ph. D.):

Terima kasih.

Ibu/Bapak sekalian.

Seluruh masukan yang disampaikan oleh Pimpinan maupun Anggota Komisi X adalah sesuatu yang sangat baik dan kami akan wujudkan. Dan insyaAllah sesuai dengan program kami yang dicanangkan selama ini itu bisa dicapai.

Selain itu, ada hal yang agak spesifik dari permintaan dari Pimpinan tentang BPI. Jadi setelah kami pelajari kondisinya, maka mereka yang sudah dalam kelompok yang masuk dalam BPI yang kecatet selama ini, itu akan kami penuh beasiswanya itu sampai selesai.

Tadi juga ada permohonan untuk kenaikan gaji dosen atau pembayaran tukin yang dirapel. Kami sedang pelajari. Dan untuk kenaikan gaji dosen, kami juga akan membuat skenario bahwasanya kalau gaji dosen ASN dinaikkan swasta tidak, itu menimbulkan juga suatu permasalahan baru. Oleh karena itu, nanti dengan bantuan dari Komisi X memperjuangkan mengenai anggaran dibutuhkan untuk menaikkan gaji dosen, baik ASN maupun swasta. Di mana kami paham juga mekanisme di Kemenkeu bahwa membayar atau mendanai program-program yang didengar oleh swasta itu tidak begitu mudah *tapi* bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

LPDP memang sedang dalam proses untuk penataan kembali memastikan bahwa program LPDP itu menunjang program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk pencapaian dari swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi untuk pembangunan Indonesia mencapai ekonomi 8% pertumbuhannya dan untuk mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2029.

Kami sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Terima kasih atas *support*, dukungan dari seluruh Pimpinan, Anggota Komisi X yang terhormat.

Sekian. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Makasih Prof.

Selanjutnya kepada Bang Fadli Zon.

MENTERI KEBUDAYAAN RI (Dr. FADLI ZON, M.Sc.):

Ya. Terima kasih Pimpinan.

Saya kira masukan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi X sudah cukup jelas. Ada hal-hal yang kalau kita bahas mungkin nanti akan lebih panjang lagi. *Tapi* sesuai tadi arahan kita akan perdalam pada waktu FGD. Ada hal-hal yang terkait dengan regulasi, ada substansi, dan juga mungkin program, tentu sekarang ini masih dalam tahap awal. Kita berusaha untuk konsolidasi sebagai kementerian baru.

Tapi tadi masukan-masukan tadi saya kira sangat penting dan sangat berharga. Dan mudah-mudahan kita ke depan akan lebih banyak lagi bekerja sama. Karena persoalan kebudayaan, persoalan kita semua. Tentu saja kita berharap dukungan dari Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Komisi X. Saya kira kita juga bisa membuat juga satu program bersama yang bisa kita diseminasi, terutama di daerah-daerah tertentu yang mempunyai program-program budaya. Pasti hampir semua daerah juga. Dan terkait juga dengan, ya kalau *nggak* nanti kita bahas lagi jati diri dan lain-lain.

Mohon maaf, *tapi* pada intinya kita berharap dalam FGD nanti akan ada lebih banyak lagi pendalaman. Mungkin saya tutup saja dengan pantun ya:

Tunas padi tumbuh di sawah,
Menghijau subur tanah berjaya,
Dengan dukungan Dewan yang penuh ramah,
Kita majukan kebudayaan Indonesia.

Supaya ada, sedikit ini *nih* Pak Iqbal.

Mentari pagi bersinar terang,
Menyapa alam penuh pesona,
Bersama Dewan langkah kita kian gemilang,
Warisan budaya kita jaga bersama.

Ke hutan mencari rotan,
Di tepi sungai menjala ikan,
Kepada Dewan kami ucapkan,
Terima kasih atas dukungan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Nanti habis itu nyanyi ya.

Kita sekarang memiliki kewajiban untuk membacakan laporan singkat. *Tapi* bagian depan tidak perlu dibacakan, hanya langsung kepada kesimpulan keputusan. Dan ini pun saya kira bisa kita bahas bersama-sama. Kita lihat ya mudah-mudahan tidak ada komentar-komentar yang sifatnya mendasar untuk mengubah dan mendiskusikannya panjang lagi.

1. Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen Republik Indonesia, Kemendiktisaintek RI, dan Kementerian Kebudayaan RI memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, mengembangkan sains dan teknologi, serta memajukan kebudayaan Indonesia.
2. Komisi X DPR RI menin, menekankan kemendikti, kemdikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, dan Kementerian Kebudayaan RI agar dapat merumuskan kebijakan dan program kerjanya, agar dalam merumuskan kebijakan dan program kerjanya dipastikan memiliki:
 - a. Landasan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kang Ferdi.

- b. hasil kajian yang komprehensif; dan
 - c. hasil evaluasi yang cermat dari kebijakan dan program sebelumnya.
3. Komisi X DPR RI menekankan Kemdikdasmen RI, Kemdikti *Science* RI, saintek RI, dan Kementerian Kebudayaan RI untuk *me-review* peraturan menteri bidang pendidikan dan kebudayaan yang memiliki potensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemdikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain agar:
 - a. implementasi distribusi 20% anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi dan undang-undang;
 - b. anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dapat dikelola kementerian yang membidangi pendidikan.
5. Komisi X DPR RI mendorong Mendikdasmen RI, Mendiktisaintek RI, dan Menteri Kebudayaan RI untuk segera menyelesaikan struktur organisasi dan tata kerjanya agar dapat maksimal dalam melaksanakan kebijakan, program, dan tugas-tugas kementerian.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemdikdasmen RI dan Kemendiktisaintek RI untuk mempersiapkan kajian Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk diajukan sebagai RUU dalam Prolegnas prioritas tahun 2025.
7. Komisi X DPR RI mendorong Kemdikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, dan Kementerian Kebudayaan RI untuk membangun pola komunikasi yang baik sebagai mitra kerja, agar kebijakan dan program yang dikeluarkan bermanfaat untuk masyarakat.

8. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemdikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, dan Kementerian Kebudayaan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang belum dijawab, paling lambat...

12 November boleh *ngga*? Nawar cepat banget ya.
Berapa? Satu minggu? Dua minggu?

Dua minggu ya, karena saya kira pertanyaannya banyak yang sangat mendasar dan juga penting *gitu* ya. Saya kira kita beri waktu yang cukup.

Dan baiklah. Apakah?
20 November

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

10 hari.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

10 hari?

Oke. 20 November 2024.

F-P. GOLKAR (MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.):

Bu.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Oh, yang tadi.

Iya?

F-P. GOLKAR (MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.):

Yang nomor tujuh coba. Kembali nomor tujuh sebentar.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Ya.

F-P. GOLKAR (MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.):

Mungkin ditambahkan yang nomor tujuh itu.

Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen, Kemendik dan bla-bla-bla itu, membangun pola komunikasi yang baik sebagai mitra kerja agar

kebijakan program itu akan bermanfaat untuk masyarakat dan dikoordinasikan hasilnya kepada Komisi X.

Artinya, hasil koordinasi tiga, ketiga kementerian itu kemudian disampaikan hasilnya kepada Komisi X.

F-PKB (H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.):

Nomor lima Bu, usul, tambahan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya.

F-PKB (H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.):

Karena di situ ditulis SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), apakah secara *mutatis mutandis* berubahnya tiga kementerian ini menjadikan berubah juga di tingkat OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah)? Jadi dinas pendidikan itu juga otomatis pecah atau tidak? Ini yang belum sempat.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Ya mungkin, mungkin perlu, perlu dikaji ya, konsekuensinya

F-PKB (H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.):

Makasih Bu.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Iya.

Selain menyelesaikan sekaligus juga mengkaji kemungkinan konsekuensi logisnya terhadap UPT-UPT ataupun juga terhadap SKPD di pemerintahan daerah.

Ya, OPD ya.

Pak Bupati siap.

Baik, Bapak/Ibu sekalian, saya kira kita sudah sepakat ya dengan isi dari kesimpulan kita. Jadi bagaimana sudah keputusan dan kesimpulan yang sudah diperbaiki, sudah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

F-P. GERINDRA (Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.):

Izin Bu.

Pak Menteri Dikdasmen kan tadi bilang, ada kata gantung lagunya *Teh Melly*. Nah, tuh, *Teh Melly* tanggung jawab. Nyanyiin lagu Gantung.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Gantung.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Gantung.

Tadi saya, oh iya, saya tadi menantang.

F-P. GERINDRA (MELLY GOESLAW):

Oh, iya spesial buat Bapak Menteri di Dikdasmen. Habis ini Pak Giring *tapi ya*.

Jangan sampai kami gantung,
Semua anggaran memberi harapan,
Sabar jika semuanya beres,
Anggaran tak mungkin kami gantung.

Gitu Pak, hatur nuhun.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Hatur nuhun.

Dan kita tutup acara ini, sekaligus juga kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ali Zamroni. *Yeay*.

Luar biasa ya hari ini, rapatnya sangat produktif dan juga sangat membesarkan hati.

Seger-seger minum es degan,
Pelepas dahaga di siang hari,
Memimpin rapat ini sebenarnya saya deg-degan,
Alhamdulillah akhirnya baik sekali.

Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di rapat-rapat berikutnya dengan atmosfer yang sama.

Terima kasih dan juga mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman yang tidak puas dengan kesempatan yang sangat sedikit ya diberikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya tutup dengan membaca *hamdalah*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.52 WIB)

Alhamdulillah.

**a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd.

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP.197206221999032001